



Estimasi Populasi Dewasa Rawan Terinfeksi HIV 2009





ESTIMASI POPULASI DEWASA RAWAN TERINFEKSI HIV 2009

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

2009

Kata Pengantar

Epidemi HIV di Indonesia dalam 5 tahun terakhir telah terjadi perubahan dari *Low Level Epidemic* menjadi *Concentrated Level Epidemic*. Hal ini terbukti dari hasil survei pada sub populasi tertentu yang menunjukkan prevalensi HIV di beberapa provinsi telah melebihi 5% secara konsisten. Penularan utama terjadi pada kelompok Pengguna Napza Suntik (Penasun) dan pada kelompok yang melakukan hubungan seksual berisiko. Meskipun respons yang telah dilaksanakan meningkat namun masih kalah dengan kecepatan peningkatan epidemi yang terjadi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 bagian Lampiran Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Sub-Sub Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit. Urusan pemerintah meliputi pengelolaan surveilans epidemiologi kejadian luar biasa skala nasional, pengelolaan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular berpotensi wabah, dan yang merupakan komitmen global skala nasional dan internasional, Pengelolaan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu skala nasional, Penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah skala nasional. Melalui surveilans yang baik kita akan mampu melakukan pengamatan suatu penyakit, menilai kecenderungan dan dapat menggunakan data untuk perencanaan, evaluasi dan estimasi populasi terinfeksi HIV dan populasi rawan tertular HIV.

Sebagai salah satu fungsi dari pelaksanaan surveilans, estimasi populasi rawan tertular HIV dan terinfeksi HIV telah dilakukan oleh Departemen Kesehatan yang didukung oleh mitra kerja terkait. Tahun 2002 dilakukan estimasi pertama sekali di Indonesia dan merupakan estimasi yang dikategorikan sebagai best practice oleh ahli epidemiologi dimana setiap keputusan dan asumsi yang dilakukan dicatat dengan jelas.

Tahun 2004, Departemen Kesehatan kembali mencoba melakukan estimasi dengan pendekatan provinsi dimana estimasi dilakukan di tingkat provinsi. Pendekatan ini digunakan karena kita bisa mendapatkan informasi yang relatif mendekati pada hal yang sebenarnya. Selain itu, hasil yang diperoleh adalah data pada tingkat kabupaten/kota. Namun sayang mengingat keterbatasan sumber daya estimasi tersebut hanya bisa kita lakukan di 14 provinsi sedangkan sisa provinsi yang ada dilakukan estimasi di tingkat Pusat dengan asupan data dari provinsi.

Tahun 2006, pendekatan yang dilakukan agak berbeda dengan tahun 2004 yaitu dengan mengumpulkan data dari kabupaten/kota seluruh Indonesia. Data yang terkumpul diolah menggunakan metode *multiplier* dengan pendekatan kabupaten/kota. Hasil sementara disosialisasikan kepada pihak terkait untuk memperoleh tanggapan dan masukan, dilanjutkan dengan proses finalisasi.

Tahun 2009, penyusunan estimasi dilaksanakan kembali. Proses dimulai bulan Agustus dengan pengumpulan data dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia untuk kemudian dilakukan proses penghitungan, metodologi yang dipergunakan tidak jauh berbeda dengan tahun 2006, hanya pada tahun ini lebih lengkap karena selain dengan metode *multiplier* juga dilakukan triangulasi, sampai dengan regresi. Data yang digunakan pada proses estimasi kali inipun lebih banyak, beragam dan akurat dibandingkan dengan data yang dipergunakan pada estimasi sebelumnya. Hasil pendataan dari berbagai instansi (Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kemhukham, BPS, Kepolisian, KPAN dan

KPAD, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pariwisata, Lembaga Swadaya Masyarakat, Jaringan Organisasi), serta hasil Survei Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP), Survei Potensi Desa (PODES), dan Sero Surveilans memberikan andil yang besar untuk proses estimasi ini.

Setelah melalui proses yang cukup panjang dan kompleks serta hasilnya sudah disosialisasikan, kami berharap buku ini dapat dipergunakan sebagai salah satu pedoman dalam program pengendalian HIV dan AIDS di Indonesia.

Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah ikut membantu serta terlibat dalam proses penyusunan estimasi ini, mudah-mudahan kerja keras kita dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, Maret 2010

Direktur Jenderal PP & PL

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'T' followed by a long, sweeping horizontal line that ends in a small hook.

Prof. Dr. Tjandra Yoga Aditama, SpP(K)



MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Sambutan Menteri Kesehatan RI

Kementerian Kesehatan sebagai Instansi yang membawahi masalah-masalah bidang kesehatan, dimana pencegahan dan pemberantasan penyakit merupakan salah satu sub-sub bidang yang menjadi tanggung jawab dari Kementerian Kesehatan. Penyediaan informasi yang akurat bagi semua pihak di bidang kesehatan sangat diperlukan sehingga peran surveilans penting untuk memenuhi kebutuhan akan hal tersebut.

Dalam program pengendalian HIV dan AIDS, estimasi populasi rawan terinfeksi HIV dan Orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) yang akurat merupakan kebutuhan yang mendesak. Estimasi disusun setidaknya 3 tahun sekali, estimasi terakhir disusun tahun 2006, oleh karena itu pada tahun 2009 melalui kegiatan Surveilans HIV disusun kembali estimasi populasi rawan terinfeksi HIV dan Orang dengan HIV dan AIDS (ODHA). Kebutuhan akan data tersebut dipicu oleh adanya keinginan untuk mengetahui seberapa besar masalah epidemi HIV dan AIDS dan sebarannya di Indonesia sampai tingkat kabupaten/kota.

Penyelenggaraan estimasi ini menunjukkan suatu upaya yang terintegrasi dari program pengendalian HIV dan AIDS karena melibatkan banyak pihak dalam penyusunannya. Hasil estimasi diharapkan dapat menjadi milik kita bersama dan bermanfaat untuk melakukan advokasi pada pemangku kepentingan. Selain itu, kita juga dapat mengembangkan program pengendalian HIV dan AIDS sampai tingkat kabupaten/kota.

Pada kesempatan ini saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih untuk semua pihak yang terlibat dalam proses estimasi, baik dari sektor kesehatan maupun sektor non-kesehatan, dari tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Mudah-mudahan dengan adanya estimasi ini akan lebih meningkatkan upaya kita dalam menekan laju epidemi di Indonesia.

Jakarta, Maret 2010

Menteri Kesehatan RI

Endang R. Sedyaningsih, Dr. P.

Dr. Endang R. Sedyaningsih, Dr. P

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA	iii
Sambutan Menteri Kesehatan RI	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	vii
Daftar Istilah	viii
Ringkasan Eksekutif	ix
1 Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	2
2 Metodologi	3
2.1. Umum	3
2.2. Pemilihan Subpopulasi	4
2.3. Sumber Data	7
2.4. Metode Penghitungan	7
2.4.1. Penghitungan Estimasi WPS, Waria, LSL, dan Penasun	8
2.4.2. Penghitungan Estimasi Pelanggan WPS dan pasangannya	13
2.4.3. Penghitungan Estimasi Pelanggan Waria	14
2.4.4. Penghitungan Estimasi Pasangan Tetap Penasun	15
2.4.5. Penghitungan Estimasi Warga Binaan Masyarakat	16
2.4.6. Penghitungan Estimasi Populasi Umum Tanah Papua	17
3 Data dan Parameter	19
3.1. Data Pemetaan	19
3.2. Data Survei Potensi Desa	22
3.3. Data Surveilans Perilaku	25
3.4. Data Surveilans HIV	26
4 Hasil	29
4.1. Estimasi Populasi Rawan Tertular HIV dan ODHA	29
4.1.1. Penasun dan Pasangan Seks Tetap Penasun	31
4.1.2. Wanita Penjaja Seks	32
4.1.3. Waria dan LSL	34

4.1.4. Pelanggan WPS dan Pasangan Seks Tetap Pelanggan	36
4.1.5. Warga Binaan Pemasyarakatan.....	38
4.2. Distribusi ODHA menurut Provinsi dan Subpopulasi.....	39
4.3. Hasil Estimasi Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota.....	41
5 Diskusi	59
6 Rekomendasi	63
Lampiran	65
Hasil Pemodelan Regresi Poisson	66
Formulir Pengumpulan Data Pemetaan	72
SK Kelompok Kerja Estimasi.....	74
Daftar Hadir Pertemuan.....	77

Daftar Tabel

Tabel 1. Struktur Data Hasil Penggabungan Hasil Pemetaan Subpopulasi dan Data Podes..	8
Tabel 2. Sumber data pemetaan atau listing menurut subpopulasi.....	9
Tabel 3. Variabel data Podes yang digunakan sebagai penduga dalam model regresi	10
Tabel 4. Banyaknya Sampel Blok Sensus dan Responden STHP 2006 Tanah Papua menurut Kabupaten/Kota Terpilih.....	17
Tabel 5. Jumlah Kabupaten/Kota menurut Sumber Data Pemetaan dan Subpopulasi	20
Tabel 6. Jumlah Kabupaten/Kota dengan Banyaknya Sumber Data Pemetaan menurut Subpopulasi	21
Tabel 7. Perbandingan Jumlah Kabupaten/Kota yang Memiliki Sumber Data Pemetaan Populasi Rawan Terinfeksi HIV Tahun 2006 dan 2009	21
Tabel 8. Rerata Jumlah Populasi Rawan Terinfeksi HIV Hasil Pemetaan Tahun 2006 dan 2009	22
Tabel 9. Hasil Surveilans Perilaku 2007 dan 2009 yang Digunakan untuk Penghitungan Estimasi	25
Tabel 10. Estimasi Jumlah Populasi Rawan Terinfeksi HIV dan Jumlah ODHA di Indonesia Tahun 2009.....	30
Tabel 11. Estimasi Jumlah Populasi dan ODHA Penasun Serta Pasangan Seks Tetap Penasun menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2009	31
Tabel 12. Estimasi Jumlah Populasi dan ODHA WPS Langsung dan Tak Langsung Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2009	33
Tabel 13. Estimasi Jumlah Populasi dan ODHA Waria dan LSL menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2009.....	35
Tabel 14. Estimasi Jumlah Populasi dan ODHA Pelanggan Penjaja Seks dan Pasangannya menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2009.....	37
Tabel 15. Estimasi Jumlah Populasi dan ODHA Warga Binaan Pemasyarakatan Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2009	38
Tabel 16. Ringkasan Hasil Estimasi Populasi Rawan dan ODHA Tahun 2006 dan 2009.....	60
Tabel 17. Nilai koefisien regresi poisson, standard error, p-value, dan 95% confidence interval untuk model WPS langsung	66
Tabel 18. Nilai koefisien regresi poisson, standard error, p-value, dan 95% confidence interval untuk model WPS tak langsung	67
Tabel 19. Nilai koefisien regresi poisson, standard error, p-value, dan 95% confidence interval untuk model waria	68
Tabel 20. Nilai koefisien regresi poisson, standard error, p-value, dan 95% confidence interval untuk model LSL	70
Tabel 21. Nilai koefisien regresi poisson, standard error, p-value, dan 95% confidence interval untuk model penasun	71

Daftar Gambar

Gambar 1. Diagram alir estimasi dengan model regresi poisson	11
Gambar 2. Proses Estimasi WPS, Waria, LSL, Penasun, dan ODHA.....	12
Gambar 3. Proses Estimasi untuk Pelanggan WPS dan Pasangannya.....	14
Gambar 4. Proses Estimasi untuk Pelanggan Waria Penjaja Seks.....	15
Gambar 5. Proses Estimasi untuk Pasangan Tetap Penasun.....	16
Gambar 6. Distribusi Persentase Desa yang Memiliki Lokalisasi/Tempat Mangkal Penjaja Seks menurut Kabupaten/Kota, Podes 2008.....	23
Gambar 7. Distribusi Persentase Desa yang Memiliki Kasus Penyalahgunaan Narkoba dalam Setahun Terakhir menurut Kabupaten/Kota, Podes 2008	24
Gambar 8. Prevalensi HIV Hasil Surveilans 2007 – 2009 menurut Subpopulasi dan Lokasi	26
Gambar 9. Distribusi Estimasi Jumlah Populasi Rawan Tertular HIV menurut Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2009.....	30
Gambar 10. Distribusi Estimasi Jumlah Penasun Menurut Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2009.....	32
Gambar 11. Distribusi Estimasi Jumlah WPS Menurut Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2009.....	32
Gambar 12. Distribusi Estimasi Jumlah Waria Menurut Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2009.....	34
Gambar 13. Distribusi Estimasi Jumlah LSL Menurut Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2009.....	34
Gambar 14. Distribusi Estimasi Jumlah Pelanggan Penjaja Seks menurut Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2009	36
Gambar 15. Distribusi Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan menurut Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2009.....	39
Gambar 16. Distribusi Estimasi Jumlah ODHA Menurut Subpopulasi dan Provinsi di Indonesia Tahun 2009.....	40
Gambar 17. Distribusi Estimasi Jumlah ODHA 15-49 Tahun dari Populasi yang di Estimasi Menurut Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2009.....	40

Daftar Istilah

AIDS	Acquired Immunodeficiency Syndrome
BNN	Badan Narkotika Nasional
BPS	Badan Pusat Statistik
Concentrated Level Epidemic	Tingkat Epidemi Terkonsentrasi
Kemhukham	Kementerian Hukum dan HAM
Dirjen PP & PL	Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
FHI	Family Health International
GWL INA	Gay Waria LSL Indonesia
HIV	Human Immunodeficiency Virus
JOTHI	Jaringan Orang Terinfeksi HIV Indonesia
Kemenkes	Kementerian Kesehatan
KPAD	Komisi Penanggulangan AIDS Daerah
KPAN	Komisi Penanggulangan AIDS Nasional
Lapas	Lembaga Pemasyarakatan
Low Level Epidemic	Tingkat Epidemi Rendah
LSL	Lelaki yang Suka Seks dengan Lelaki
Multiplier	Faktor Pengali
ODHA	Orang Dengan HIV/AIDS
OPSI	Organisasi Pekerja Seks Indonesia
Penasun	Pengguna Napza Suntik
PKBI	Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia
PKNI	Perkumpulan Korban Napza Indonesia
PODES	Statistik Potensi Desa
Predictor	Faktor Penduga
Rutan	Rumah Tahanan
SSP	Survei Surveilans Perilaku
STBP	Survei Terpadu Biologi dan Perilaku
STHP	Survei Terpadu HIV dan Perilaku
WBP	Warga Binaan Pemasyarakatan
WPS	Wanita Penjaja Seks
Regresi Poisson	Analisis Statistik Regresi dengan Distribusi Poisson
WNA	Warna Negara Asing
Prevalensi	Ukuran Kejadian Penyakit
WHO	World Health Organization
UNAIDS	United Nations for AIDS
Surveilans	Pengamatan Kejadian Penyakit Secara Sistematis dan Berkala
UNODC	United Nations Office on Drugs and Crime

Ringkasan Eksekutif

Sejak estimasi tahun 2006, intensitas dan cakupan wilayah berbagai program pengendalian HIV dan AIDS berkembang dengan pesat. Selain itu juga berbagai survei dan penelitian telah dilakukan oleh banyak pihak sehingga data baru yang dapat digunakan untuk memahami secara lebih baik epidemi HIV dan sebarannya di Indonesia sudah tersedia. Oleh karena itu Kementerian Kesehatan RI kembali melakukan proses penghitungan estimasi populasi rawan terinfeksi HIV dan ODHA tahun 2009 yang bertujuan untuk memperbaharui angka estimasi jumlah populasi rawan terinfeksi HIV dan yang sudah terinfeksi HIV dari hasil estimasi populasi sebelumnya.

Secara umum proses estimasi tahun 2009 meliputi (i) pembentukan Kelompok Kerja, (ii) pemilihan subpopulasi yang akan diestimasi, (iii) pengumpulan dan validasi data dasar, (iv) penghitungan estimasi, (v) konfirmasi dan revisi hasil awal, (vi) kesepakatan hasil tingkat provinsi dan nasional, serta (vii) kajian oleh ahli internasional (*peer review*).

Pemilihan subpopulasi yang diestimasi menggunakan kriteria (i) tingkat prevalensi HIV, (ii) tingkat perilaku berisiko tertular dan menularkan HIV, (iii) kontribusinya terhadap epidemi HIV di Indonesia secara keseluruhan, dan (iv) ketersediaan data dasar dari setiap subpopulasi yang dipilih.

Sumber data utama yang digunakan dalam penghitungan estimasi antara lain pemetaan sebaran populasi oleh berbagai instansi terkait, surveilanssentinel HIV, Survei Potensi Desa (PODES) 2008, Survei Terpadu HIV dan Perilaku (STHP) pada populasi umum di Tanah Papua 2006, Survei Terpadu Biologi dan Perilaku STBP 2007 dan 2009 pada kelompok berisiko tinggi. Sedangkan cara penghitungan estimasi menggunakan dua jenis metode faktor pengali (*multiplier*), yaitu (i) model regresi berganda (menggunakan lebih dari satu penduga/*predictor*) untuk subpopulasi WPS, Waria, LSL dan Penasun, dan (ii) faktor pengali sederhana dengan satu faktor penduga untuk subpopulasi lainnya.

Hasil penghitungan estimasi tahun 2009 memperkirakan antara 5,1– 8,1 juta orang dengan nilai tengah 6,3 juta orang paling berisiko tertular HIV di Indonesia diluar populasi umum Tanah Papua. Sebagian besar (lebih dari 80%) adalah Pelanggan Penjaja Seks dan Pasangan Seks Tetapnya (istri/pacar), diikuti populasi Lelaki Suka Seks dengan Lelaki (11%), Penjaja seks (3.3%), Warga Binaan Pemasyarakatan (2.2%) dan yang terkecil adalah populasi Pengguna Napza Suntik dan Pasangannya (2.1%).

Hasil penghitungan estimasi tahun 2009 menghasilkan estimasi jumlah ODHA usia 15 – 49 tahun berkisar antara 132 – 287 ribu orang dengan nilai tengah 186 ribu. Estimasi tersebut belum mencakup estimasi jumlah ODHA yang berusia di bawah 15 tahun dan 50 tahun keatas. Selain itu juga proses estimasi tahun 2009 tidak memperhitungkan estimasi jumlah ODHA yang tertular melalui darah donor dan paparan cairan tubuh yang mengandung HIV, seperti petugas medis yang tertusuk jarum yang mengandung cairan tubuh dengan HIV.

Meskipun estimasi jumlah Penasun dan pasangannya adalah yang terkecil, tetapi estimasi jumlah ODHA populasi tersebut merupakan yang terbesar (37.6%) dari total estimasi populasi rawan terinfeksi HIV diluar populasi umum Tanah Papua, diikuti oleh Pelanggan Penjaja Seks dan Pasangan Seks Tetapnya (31.9%), Lelaki Seks dengan Lelaki

(15.2%), Penjaja Seks (12.1%), dan Warga Binaan Pemasyarakatan (3.2%). Hal ini disebabkan karena besarnya perbedaan prevalensi HIV pada masing-masing populasi rawan tertular HIV diluar populasi umum Tanah Papua. Prevalensi HIV tertinggi ada pada Pemasun yang berkisar antara 31.4 – 67.9 persen, Sedangkan yang terendah ada di populasi Pasangan Pelanggan WPS dengan kisaran prevalensi HIV antara 0.52 – 0.66 persen.

Hal yang paling mengemuka dari estimasi populasi rawan tertular HIV dan ODHA tahun 2009 adalah hasil estimasi jumlah sebagian subpopulasi rawan dan ODHA yang lebih rendah dari hasil estimasi tahun 2006. Hal ini tidak serta merta menggambarkan bahwa jalannya epidemi HIV di Indonesia sudah dapat dikendalikan. Estimasi jumlah beberapa populasi berisiko dan ODHA yang lebih rendah pada proses estimasi tahun 2009, lebih disebabkan karena adanya peningkatan jumlah sumber data pemetaan populasi rawan terinfeksi HIV dan perbaikan cara penghitungan beberapa subpopulasi. Walaupun demikian, kabupaten/kota yang tidak memiliki data pemetaan populasi rawan masih cukup banyak. Oleh karena itu pemanfaatan hasil estimasi populasi rawan tahun 2009 untuk menentukan target-target program pengendalian HIV dan AIDS harus dilakukan secara hati-hati khususnya pada kabupaten/kota yang tidak memiliki data pemetaan populasi rawan terinfeksi HIV.

Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi dan penjelasan yang terbuka bahwa hasil estimasi populasi rawan terinfeksi HIV di Indonesia tahun 2009 merupakan koreksi dari hasil kegiatan estimasi sebelumnya. Perbedaan hasil estimasi merupakan kombinasi dari ketersediaan data yang jauh lebih banyak dibandingkan pada periode-periode sebelumnya dan juga penggunaan metode estimasi pemodelan regresi yang menekan pengaruh subjektifitas pelaku estimasi dalam melakukan penghitungan estimasi. Disamping itu, kegiatan estimasi populasi rawan perlu dilakukan setiap 2-3 tahun dengan menggunakan metode yang memanfaatkan berbagai sumber data yang ada dan menekan unsur subjektifitas dalam proses perhitungan jumlah populasi rawan. Hasil penghitungan estimasi jumlah populasi rawan terinfeksi HIV tahun 2009 diharapkan dapat digunakan sebagai perbaikan pemodelan epidemi HIV dan kebutuhan sumber daya sebelumnya.

1

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Di hampir seluruh wilayah Indonesia, sebagaimana halnya di negara-negara di luar Afrika, infeksi HIV masih terkonsentrasi di antara orang-orang yang terkait dengan kegiatan berisiko tinggi tertular dan menularkan HIV termasuk pasangan seks tetapnya. Pengguna Napza suntik (Penasun), Waria, Penjaja Seks serta Pelanggan mereka, dan Lelaki yang suka berhubungan seks dengan Lelaki lain (LSL) adalah populasi yang diketahui secara umum memiliki risiko tinggi terinfeksi HIV.

Sistem surveilans sentinel HIV dapat memberikan informasi tentang proporsi yang sudah terinfeksi HIV dari sebagian besar subpopulasi tersebut. Namun demikian, untuk mengetahui berapa banyak orang yang termasuk dalam subpopulasi tersebut secara tepat hampir tidak mungkin dilakukan karena sifat populasi tersebut yang tersembunyi dan terstigma serta wilayah Indonesia yang sangat luas.

Data yang akurat dan terkini mengenai estimasi populasi rawan terinfeksi HIV dan estimasi Orang Dengan HIV dan AIDS (ODHA) merupakan kebutuhan yang sangat penting. Kebutuhan akan data tersebut dipicu karena adanya keinginan untuk mengetahui seberapa besar masalah epidemi HIV di Indonesia dan sebarannya sampai dengan tingkat kabupaten/kota. Dengan mengetahui besar masalah HIV dan AIDS tersebut maka pemerintah disemua tingkat dapat secara proporsional mengalokasikan program dan dana untuk pengendaliannya.

Pada tahun 2002, Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang membuat estimasi sistematis tentang jumlah orang dewasa rawan terinfeksi HIV menurut subpopulasi perilaku berisiko tinggi. Estimasi dibuat untuk setiap provinsi, tetapi semua proses pelaksanaannya dilakukan di tingkat pusat, berdasarkan data yang tersedia di tingkat pusat. Proses, metode yang dipakai, dan hasil-hasil yang ada telah diuraikan secara terperinci dalam Laporan Estimasi HIV pada Orang Dewasa di Indonesia tahun 2002. Dua tahun kemudian (tahun 2004), estimasi tersebut di perbaharui baik dari sisi asupan data maupun metodologi penghitungan yang sudah mulai menggunakan data dari tingkat kabupaten/kota di 10 provinsi.

Pada akhir tahun 2006 Komisi Penanggulangan AIDS Nasional dan Kementerian Kesehatan kembalimemperbaharui estimasi jumlah orang dewasa usia 15 – 49 tahun yang rawan terinfeksi HIV dan ODHA di Indonesia. Ada beberapa perbedaan yang signifikan pada pelaksanaan estimasi tersebut dan diyakini telah menghasilkan data estimasi yang lebih baik, diantaranya hasil estimasi tersedia untuk 440 kabupaten/kota se Indonesia.

Sejak estimasi tahun 2006, intensitas dan cakupan wilayah berbagai program pengendalian HIV dan AIDS berkembang dengan pesat. Selain itu juga berbagai survei dan

penelitian telah dilakukan oleh banyak pihak sehingga data baru yang dapat digunakan untuk memahami secara lebih baik epidemi HIV dan sebarannya di Indonesia tersedia. Oleh karena itu Kementerian Kesehatan RI bersama dengan pemangku kepentingan dan kebijakan di tingkat nasional kembali melakukan proses penghitungan estimasi populasi rawan terinfeksi HIV dan ODHA tahun 2009.

1.2. Tujuan

Tujuan utama dari serangkaian kegiatan proses estimasi tahun 2009 adalah :

-  Menghitung estimasi jumlah populasi rawan terinfeksi HIV dan yang sudah terinfeksi HIV secara nasional serta distribusinya menurut kabupaten/kota, provinsi dan subpopulasi.
-  Memperbaharui angka estimasi jumlah populasi rawan terinfeksi HIV dan yang sudah terinfeksi HIV dari hasil estimasi populasi sebelumnya.

2 Metodologi

2.1. Umum

Mekanisme penghitungan estimasi jumlah populasi rawan tertular HIV dan jumlah yang sudah terinfeksi HIV atau Orang Dengan HIV dan AIDS (ODHA) tahun 2009 secara umum tidak jauh berbeda dengan tahun 2006, di mana penghitungan estimasi dilakukan pada tingkat kabupaten/kota sedangkan estimasi di 33 provinsi dan nasional merupakan penjumlahan dari hasil estimasi di tingkat kabupaten/kota yang berjumlah 483.

Secara umum proses penghitungan estimasi jumlah populasi rawan tertular HIV dan jumlah ODHA tahun 2009 meliputi,

-  **Pembentukan kelompok kerja estimasi** dilakukan melalui Keputusan Dirjen PP & PL Kementerian Kesehatan RI nomor HK.01.OS/III.2/1247/2010. Kelompok kerja estimasi bertanggung jawab untuk (i) membuat formulir dan petunjuk pengumpulan data dasar serta mengumpulkan, validasi dan kompilasinya, (ii) membuat lembar kerja estimasi dan mengisinya, (iii) menentukan cara penghitungan estimasi dan melakukan penghitungan estimasi, (iv) memfasilitasi berbagai lokakarya untuk mendapatkan kesepakatan dalam proses dan hasil estimasi, dan (v) menuliskan laporan proses dan hasil estimasi jumlah populasi rawan tertular HIV dan jumlah ODHA tahun 2009. Kelompok Kerja Estimasi terdiri dari staf Kementerian Kesehatan dan 3 orang konsultan (2 orang konsultan Kementerian Kesehatan dan seorang konsultan HCPI) yang sudah berpengalaman dalam penghitungan estimasi populasi rawan terinfeksi HIV di Indonesia.
-  **Pemilihan subpopulasi** yang akan diestimasi beserta **cara menghitungnya** dipilih dan disepakati melalui lokakarya yang diadakan pada tanggal 2-3 November 2009 di Jakarta. Lokakarya dihadiri oleh para pemangku kepentingan di tingkat nasional dan lembaga yang memiliki data dasar untuk penghitungan estimasi.
-  **Pengumpulan dan validasi data dasar** yang dikoordinasikan oleh Kelompok Kerja Estimasi dan bersumber dari berbagai lembaga seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Narkotika Nasional (BNN), Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN), Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, *Family Health International* (FHI), Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), Jaringan/Organisasi Populasi Kunci seperti Jaringan Orang Terinfeksi HIV Indonesia (JOTHI), Organisasi Pekerja Seks Indonesia (OPSI), dan Gay Waria LSL Indonesia (GWL-INA), dan Perkumpulan Korban Napza Indonesia (PKNI). Salah satu kegiatan pengumpulan dan validasi data adalah lokakarya yang diadakan pada tanggal 20 Nopember 2009 di Jakarta.

- ⓧ Penghitungan estimasi** jumlah populasi rawan terinfeksi HIV dan ODHA dilakukan oleh Kelompok Kerja Estimasi dengan sumber data dan metode penghitungan yang sudah disepakati. Metode regresi dengan menggunakan data mapping/listing dan data Podes digunakan untuk subpopulasi WPS, waria, LSL, dan penasun. Metode faktor pengali (*multiplier*) dengan menggunakan hasil estimasi dengan metode regresi dan data perilaku untuk subpopulasi pelanggan WPS dan waria, pasangan seks pelanggan WPS, dan pasangan seks penasun.
- ⓧ Konfirmasi dan revisi** hasil penghitungan awal estimasi jumlah populasi rawan terinfeksi HIV dan jumlah yang sudah terinfeksi HIV dilakukan melalui lokakarya di Denpasar Bali pada tanggal 22 – 25 Nopember 2009. Lokakarya tersebut di hadiri oleh pemangku kepentingan tingkat nasional dan perwakilan dari Dinas Kesehatan 33 provinsi. Penghitungan ulang kemudian dilakukan oleh Kelompok Kerja Estimasi dengan memperhitungkan berbagai masukan dalam lokakarya tersebut.
- ⓧ Kesepakatan hasil** ditingkat nasional dilakukan melalui Lokakarya yang diadakan di Jakarta pada tanggal 8 Februari 2010 dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan di tingkat nasional. Sedangkan kesepakatan hasil di tingkat provinsi diberikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi melalui surat elektronik.
- ⓧ Pengkajian** proses, metodologi dan hasil **oleh ahli-ahli internasional (*peer review*)** yang dilakukan melalui lokakarya 2 hari (20 – 21 April 2010) di Jakarta. Beberapa ahli internasional yang didukung oleh WHO dan UNAIDS tersebut serta pemangku kepentingan dan kebijakan melakukan diskusi yang intensif serta memberikan masukan penting untuk meningkatkan kualitas estimasi.
- ⓧ Penulisan laporan proses dan hasil** dilakukan oleh Kelompok Kerja Estimasi dengan mempertimbangkan berbagai masukan dari para ahli, pemangku kepentingan dan kebijakan serta penggunaan data estimasi untuk berbagai keperluan dimasa yang akan datang.

2.2. Pemilihan Subpopulasi

Pemilihan subpopulasi yang akan dicakup dalam proses estimasi jumlah populasi rawan terinfeksi HIV dan ODHA tahun 2009 disepakati dengan menggunakan kriteria (i) tingkat prevalensi HIV, (ii) tingkat perilaku berisiko tertular dan menularkan HIV, (iii) kontribusinya terhadap epidemi HIV di Indonesia secara keseluruhan, dan (iv) ketersediaan data dasar dari setiap subpopulasi yang akan dipilih. Setelah di kaji dengan menggunakan data surveilans perilaku dan HIV, laporan kasus AIDS dan informasi awal lainnya maka disepakati untuk memilih 10 subpopulasi rawan terinfeksi HIV dengan definisi dan hasil tinjauan pustaka sebagai berikut:

- ⓧ Pengguna Napza Suntik (Penasun)** adalah orang dengan adiksi napza yang disuntikan dalam 12 bulan terakhir. Dari hasil Survei Terpadu Biologi dan Perilaku (STBP) tahun 2007 dan 2009 diketahui bahwa rata-rata menyuntik seorang penasun adalah 7.3 kali dalam 1 minggu terakhir, di mana secara umum 32 persen mengaku masih menggunakan alat dan jarum suntik bersama, serta antara 52 – 87 persen pernah

berbagi napza yang sudah dilarutkan dalam air di dalam satu alat suntik (berbagi basah) yang sangat berisiko tertular dan menularkan HIV. Tiga puluh persen penasun juga mengaku pernah melakukan seks komersial dan hanya sepertiganya yang selalu menggunakan kondom. Prevalensi HIV pada penasun dari hasil STBP 2007 dan 2009 di 9 kota berkisar antara 32 persen (Kalimantan Barat) – 56 persen (Surabaya). Selain itu hampir 40 persen dari kumulatif kasus AIDS yang dilaporkan berasal dari subpopulasi penasun.

❧ Pasangan seks tetap penasun adalah istri/suami atau pasangan yang tinggal bersama dengan penasun, dan tidak menyuntikan napza pada diri mereka sendiri. Dari hasil STBP diketahui antara 22 – 35 persen penasun memiliki istri/suami atau pasangan seks tetap di mana sebagian besar dari pasangan tersebut (lebih dari 85 persen) adalah bukan penasun. Rata-rata frekuensi hubungan seks penasun dalam 1 bulan terakhir berkisar antara 3.6 – 8.4 kali. Sedangkan rata-rata tingkat konsistensi pemakaian kondom dengan pasangan seks tetap hanya berkisar antara 4 – 17 persen saja. Walaupun demikian belum pernah ada survei/penelitian tentang prevalensi HIV pada subpopulasi ini, tetapi dengan melihat data di atas maka kemungkinan pasangan seks penasun terpapar HIV cukup besar.

❧ Wanita Penjaja Seks (WPS) Langsung adalah wanita yang menjajakan seks sebagai pekerjaan atau sumber penghasilan utama mereka. Mereka biasanya berbasis di rumah bordil/lokalisasi, atau bekerja di jalanan. Seks komersial tanpa kondom merupakan salah satu faktor risiko penting dalam penularan HIV. Industri seks komersial di Indonesia sangat besar di mana lebih dari 1,500 kepala desa/lurah di seluruh provinsi melaporkan adanya tempat transaksi seks di desa/kelurahannya (Podes 2008). Hasil STBP secara umum menunjukkan rata-rata jumlah pelanggan yang dilayani secara seksual oleh seorang WPS Langsung dalam 1 minggu terakhir adalah 8.7 orang (antara 3 – 18 orang), dengan rata-rata tingkat konsistensi penggunaan kondom hanya 32 persen (antara 2 – 80 persen). Prevalensi HIV hasil STBP 2007 dan 2009 pada WPS Langsung di 18 kabupaten/kota sekitar 10.4 persen (antara 2.8 – 20.8 persen).

❧ WPS Tak Langsung adalah adalah wanita yang bekerja di bisnis hiburan, seperti bar, karaoke, salon, atau panti pijat, yang juga melayani seks untuk menambah penghasilan. Tidak semua wanita yang bekerja di tempat-tempat ini menjual seks, dan estimasi mencerminkan hanya populasi yang hanya menjual seks. Hasil STBP maupun survei-survei lainnya menunjukkan bahwa perilaku berisiko tertular dan menularkan HIV pada WPS Tak Langsung tidak sama dengan WPS Langsung. Secara umum rata-rata jumlah pelanggan WPS Tak Langsung dalam 1 minggu terakhir hanya 3.9 orang (antara 1.2 – 6.8 orang), dengan rata-rata tingkat konsistensi penggunaan kondom sekitar 34 persen (antara 11 – 53 persen). Sedangkan prevalensi HIV adalah sekitar 4.6 persen (antara 0.5 – 8.8 persen).

❧ Waria adalah orang yang secara biologis laki-laki tetapi peran gender, berperasaan, dan penampilannya perempuan. Sebagian besar (sekitar 87 persen) waria yang menjadi responden STBP 2007 dan 2009 di 9 kota mengaku pernah menjual seks kepada pelanggan laki-laki dalam 1 tahun terakhir. Sebagian besar pelanggan dilayani seks anal dengan rata-rata jumlah pelanggan dalam 1 minggu terakhir adalah 3.2 orang (antara 2.1 – 4.5 orang) dan tingkat konsistensi pemakaian kondom hanya 38 persen saja (antara 12 – 61 persen). Dengan tingkat perilaku yang lebih berisiko dibanding penjaja seks lainnya, maka cukup wajar bila rata-rata prevalensi HIV pada waria lebih tinggi dari penjaja seks lainnya yaitu 24.4 persen.

- Ⓜ Pelanggan penjaja seks** adalah adalah pria yang berhubungan seks setidaknya-tidaknya satu kali dalam tahun terakhir dengan penjaja seks baik WPS maupun waria dengan memberikan bayaran baik berupa uang dan atau barang. Hasil STBP di 14 kabupaten/kota menunjukkan rata-rata pelanggan membeli seks dalam 1 bulan terakhir adalah 2 kali (antara 1.4 – 2.5 kali), dengan rata-rata tingkat konsistensi penggunaan kondom hanya 15 persen (antara 4 – 41 persen). Sedangkan rata-rata prevalensi HIV nya berkisar antara 0 – 4.4 persen (nilai tengah 0.8 persen).
- Ⓜ Pasangan seks pelanggan penjaja seks** adalah wanita yang menikah atau tinggal bersama dengan pelanggan penjaja seks. Sebagian besar (68 persen) pelanggan penjaja seks yang menjadi responden STBP telah menikah dengan rata-rata jumlah hubungan seks dalam 3 bulan terakhir 13 kali. Sedangkan tingkat konsistensi penggunaan kondomnya sangat rendah yaitu sekitar 1.4 persen (antara 0 – 3.5 persen). Sama seperti pasangan penasun, belum pernah ada survei/penelitian tentang prevalensi HIV pada subpopulasi ini.
- Ⓜ Lelaki yang suka Seks dengan Lelaki (LSL)** adalah laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki lain dan berkumpul di tempat-tempat tertentu untuk mendapatkan pasangan baru. Tempat-tempat ini termasuk bar, diskotek, taman kota, mal, klub senam/olahraga dan tempat lainnya. Sebagian besar (71 persen) LSL yang menjadi responden STBP 2007 di 6 kota mengaku pernah melakukan seks anal dalam 1 bulan terakhir dengan rata-rata jumlah pasangan berkisar antara 1.9 – 4.6 orang. Sedangkan tingkat konsistensi penggunaan kondomnya hanya 39 persen. Prevalensi HIV pada LSL sekitar 5.21 persen (antara 2 – 8.1 persen).
- Ⓜ Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)** adalah pria dan wanita yang ditahan dalam satu tahun terakhir. Ini termasuk para tahanan di rutan (rumah tahanan negara bagi para tahanan yang sedang menunggu keputusan hukum) dan lapas (lembaga pemasyarakatan/penjara), tetapi tidak termasuk yang berada dalam tahanan polisi. Perilaku berisiko tertular dan menularkan HIV pada WBP masih belum tergambarkan dengan baik tetapi prevalensi HIV di beberapa Lapas/Rutan dari hasil surveilans HIV sudah cukup tinggi yaitu berkisar antara 0.27 – 19.50 persen (nilai tengah 2.43 persen).
- Ⓜ Populasi Umum Tanah Papua** adalah adalah laki-laki dan perempuan berusia 15 – 49 tahun, tinggal dan terdaftar sebagai penduduk Papua serta bukan termasuk dalam salah satu populasi risiko tinggi di atas. Dari hasil STHP 2006 dan Survei Demografi Kesehatan Indonesia tahun 2008 diketahui bahwa risiko tertular dan menularkan HIV pada populasi umum di Tanah Papua jauh lebih tinggi dari wilayah Indonesia lainnya. Secara umum, 21 persen populasi umum laki-laki dan 7.9 persen perempuan memiliki pasangan seks lebih dari 1 orang dalam 1 tahun terakhir. Tingkat penggunaan kondom pada hubungan seks terakhir rata-rata hanya 2.8 persen jauh lebih rendah dari populasi yang secara umum dikenal berperilaku risiko tinggi. Prevalensi HIV dari hasil STHP 2006 pada populasi umum di Tanah Papua berkisar antara 0.7 – 5 persen tergantung dari jenis kelamin dan topografi (pesisir mudah, pesisir sulit dan pegunungan). Selain itu jumlah kumulatif kasus AIDS per 100.000 penduduk yang dilaporkan hingga akhir 2009 di Papua 15.36 kali lebih tinggi dari angka nasional (8.66 kasus/100.000 penduduk).

2.3. Sumber Data

Dalam penghitungan estimasi jumlah populasi rawan tertular HIV dan ODHA tahun 2009, digunakan beberapa sumber data utama, yaitu pemetaan sebaran populasi, surveilans HIV, Survei Potensi Desa (PODES) 2008, Survei Terpadu HIV dan Perilaku (STHP) pada populasi umum di Tanah Papua 2006, STBP 2007 dan 2009 pada kelompok berisiko tinggi.

Data pemetaan sebaran populasi yang akan diestimasi bersumber dari beberapa lembaga yang melakukan pemetaan untuk berbagai keperluan seperti penetapan target dan perencanaan program. Di tingkat provinsi, pemetaan dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi dengan menggunakan definisi populasi, formulir, dan petunjuk pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI. Pemetaan tersebut memberikan data yang diperlukan dalam proses penghitungan estimasi menurut kabupaten/kota dan sumbernya seperti jumlah penduduk usia 15-49 tahun menurut jenis kelamin, jumlah WPS langsung dan tak langsung, jumlah penasun, jumlah kasus penyalahgunaan napza dalam setahun terakhir, jumlah waria, jumlah LSL, dan informasi tentang prevalensi HIV dari masing-masing subpopulasi tersebut serta prevalensi HIV pada darah donor terbaru.

Selain data hasil pemetaan di tingkat provinsi, Kelompok Kerja Estimasi juga mengumpulkan hasil pemetaan yang dilakukan oleh beberapa lembaga di tingkat nasional seperti KPAN, PKBI, dan beberapa organisasi populasi kunci, seperti JOTHI, GWL-INA, OPSI, serta cakupan program penjangkauan berbagai lembaga yang bekerja di bawah koordinasi FHI dan *Principle Recieipient the Global Fund* Kementerian Kesehatan. Proses validasi dilakukan oleh Kelompok Kerja Estimasi pada hasil pemetaan yang memiliki perbedaan lebih dari 1.5 kali sumber data lainnya di dalam kabupaten/kota yang memiliki lebih dari satu sumber data pemetaan.

Kelompok Kerja Estimasi juga bekerja sama dengan BPS untuk mengestimasi jumlah penduduk umur 15 – 49 tahun menurut jenis kelamin per kabupaten/kota dan beberapa variabel yang akan digunakan sebagai faktor penduga dari hasil Survei Podes 2008 serta melakukan analisis hasil STBP pada populasi berisiko tinggi dan STHP pada populasi umum Tanah Papua untuk mendapatkan faktor pengali estimasi subpopulasi yang tidak ada data pemetaannya seperti pasangan seks penasun, pelanggan penaja seks dan pasangannya.

2.4. Metode Penghitungan

Secara umum, penghitungan estimasi populasi kelompok rawan tertular HIV dan ODHA di Indonesia tahun 2009 dibedakan menjadi empat, yaitu penghitungan estimasi jumlah populasi untuk (i) WPS, waria, LSL, dan penasun, (ii) pelanggan penaja seks, pasangan seks pelanggan, dan pasangan seks penasun, (iii) warga binaan pemsayarakatan, dan (iv) populasi umum Tanah Papua.

Penghitungan estimasi subpopulasi WPS, waria, LSL, dan penasun berdasarkan data hasil pemetaan dan listing di setiap kabupaten/kota yang ada datanya. Data ini selanjutnya digunakan untuk mengestimasi subpopulasi tersebut di kabupaten/kota yang tidak mempunyai data pemetaan dengan menggunakan model regresi poisson, salah satu bentuk analisis regresi untuk memodelkan data hitung atau data cacah (*count data*). Peubah

penduga yang digunakan sebagian besar berasal dari data Podes 2008 dan ranking kabupaten/kota berdasarkan perkiraan jumlah subpopulasi tersebut menurut staf Dinas Kesehatan Provinsi.

Pada kelompok pelanggan penaja seks, pasangan seks pelanggan, dan pasangan seks penasun, penghitungan estimasi subpopulasi dilakukan dengan menggunakan data hasil STBP 2009 dan estimasi subpopulasi pada kelompok WPS, waria, dan penasun.

Estimasi untuk kelompok warga binaan pemasyarakatan menggunakan data yang dikumpulkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM, sedangkan estimasi ODHA pada populasi umum hanya menggunakan estimasi ODHA hasil STHP 2006 di Tanah Papua.

2.4.1. Penghitungan Estimasi WPS, Waria, LSL, dan Penasun

Pada subpopulasi yang lebih tersembunyi seperti WPS tak langsung, LSL, dan penasun, hasil pemetaan diperkirakan lebih rendah dari jumlah yang sebenarnya, untuk itu dilakukan koreksi terhadap hasil pemetaan tersebut berdasarkan angka cakupan program hasil STBP 2009. Angka cakupan program hasil STBP 2009 pada masing-masing kelompok tersebut adalah sekitar 66 persen (WPS tak langsung), 67 persen (penasun), dan 17 persen (LSL), sehingga faktor koreksi untuk setiap subpopulasi adalah 1.5 (WPS tak langsung dan penasun) dan 6 (LSL).

Selanjutnya data pemetaan yang terkoreksi ini dan data Podes digabung pada tingkat kabupaten/kota. Data pemetaan dan listing tidak tersedia untuk seluruh kabupaten/kota sedangkan data Podes tersedia untuk seluruh kabupaten/kota. Data dari kabupaten/kota yang mempunyai data pemetaan dan listing inilah yang selanjutnya digunakan sebagai data dasar untuk melakukan modeling dan memprediksi untuk kabupaten/kota yang tidak mempunyai data pemetaan dan listing.

Tabel 1. Struktur Data Hasil Penggabungan Hasil Pemetaan Subpopulasi dan Data Podes

Kabupaten/kota (<i>i</i>)	Data pemetaan/listing			Data Podes		
	$Y_{i,1}$...	$Y_{i,s}$	$X_{i,1}$...	$X_{i,p}$
1	$Y_{1,1}$...	$Y_{1,s}$	$X_{1,1}$...	$X_{1,p}$
2	$Y_{2,1}$...	$Y_{2,s}$	$X_{2,1}$...	$X_{2,p}$
3	$Y_{3,1}$...	$Y_{3,s}$	$X_{3,1}$...	$X_{3,p}$
4	$Y_{4,1}$		$Y_{4,s}$	$X_{4,1}$		$X_{4,p}$
⋮	⋮	...	⋮	⋮	...	⋮
483	$Y_{483,1}$...	$Y_{483,s}$	$X_{483,1}$...	$X_{483,p}$

di mana,

$Y_{i,s}$ = perkiraan jumlah subpopulasi berdasarkan data pemetaan/listing dari sumber data s di kabupaten/kota i ,

$X_{i,p}$ = data Podes variabel p yang digunakan sebagai penduga dalam model regresi di kabupaten/kota i .

Dalam pemodelan regresi, karena variabel respon yang digunakan adalah jumlah orang atau data hitung maka model regresi yang digunakan adalah model regresi poisson. Dalam model regresi poisson, variabel respon Y diasumsikan berdistribusi poisson dan \ln dari nilai harapan variabel respon dapat dimodelkan secara linier, sehingga seringkali disebut model log-linier. Secara umum, model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\hat{Y} = \exp\left\{b_0 + \sum_{k=1}^P b_k x_k\right\}$$

atau

$$\ln\{\hat{Y}\} = b_0 + \sum_{k=1}^P b_k x_k$$

Model ini diimplementasikan untuk data nasional per kabupaten/kota dan distratifikasi menurut provinsi.

Sumber data untuk setiap subpopulasi berbeda menurut ketersediaan data pemetaan atau listing pada subpopulasi tersebut. Jenis sumber data menurut subpopulasi adalah seperti dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. Sumber data pemetaan atau listing menurut subpopulasi

Subpopulasi	Dinkes	Dinsos	Dispar	LSM	KPAN	Lainnya
WPS Langsung	✓	✓		✓	✓	✓
WPS Tak Langsung	✓		✓	✓	✓	✓
Waria	✓			✓	✓	✓
LSL	✓			✓	✓	✓
Penasun	✓				✓	✓

Penduga untuk setiap subpopulasi juga berbeda menurut ketersediaan data Podes dan data tersebut relevan untuk membuat model spesifik bagi subpopulasi tertentu. Selain data Podes, data jumlah penduduk umur 15-49 tahun per kabupaten/kota dan ranking kabupaten/kota menurut tingkat keramaian subpopulasi yang diestimasi, kecuali penasun, yang disusun oleh staf Dinas Kesehatan Provinsi juga digunakan sebagai variabel penduga dalam model.

Variabel-variabel yang digunakan sebagai penduga pada model regresi poisson untuk setiap subpopulasi yang diestimasi adalah seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 3. Variabel data Podes yang digunakan sebagai penduga dalam model regresi

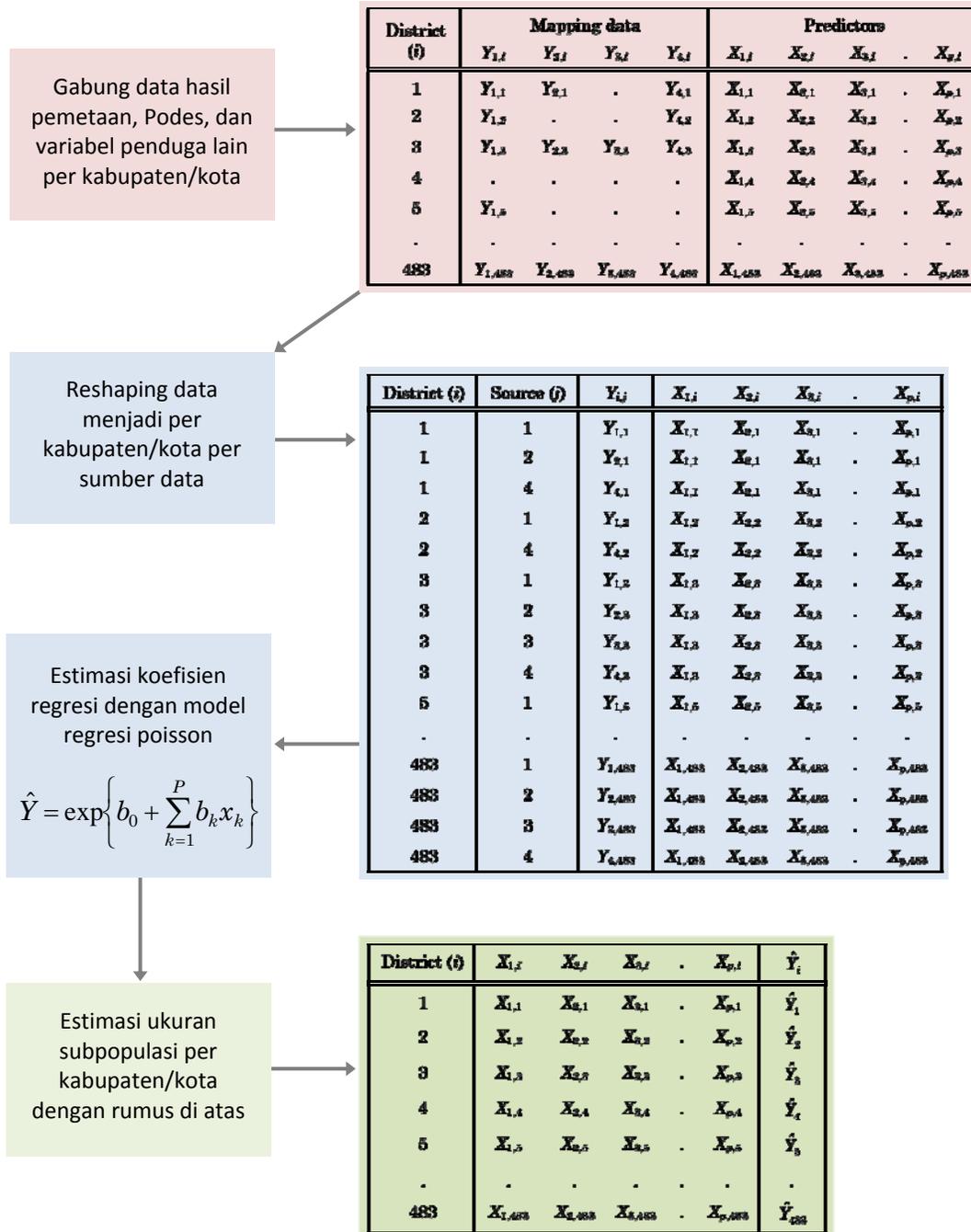
Deskripsi	WPS-L	WPS-TL	Waria	LSL	Penasun
Persentase desa kelurahan	✓	✓	✓	✓	✓
Persentase laki-laki yang tinggal di desa perkotaan				✓	✓
Persentase perempuan yang tinggal di desa perkotaan	✓				
Persentase desa yang ada tempat transaksi seks	✓	✓			
Persentase desa yang ada pub/diskotik/karaoke		✓	✓	✓	
Persentase desa yang ada bioskop				✓	
Persentase desa yang ada kejahatan penyalahgunaan narkoba					✓
Persentase desa yang ada kejahatan peredaran gelap narkoba					✓
Jumlah penduduk berumur 15-49 tahun	✓	✓	✓	✓	✓
Ranking kabupaten/kota (<i>dummy</i>)	✓	✓	✓	✓	
Province (<i>dummy</i>)	✓	✓	✓	✓	✓

Sebelum melakukan pemodelan, Kelompok Kerja Estimasi menyusun ulang data berdasarkan ketersediaan data pemetaan. Tidak semua kabupaten/kota mempunyai data pemetaan dari setiap sumber data yang ada. Dengan kata lain, beberapa kabupaten/kota hanya mempunyai data pemetaan atau listing hanya dari beberapa sumber atau bahkan tidak mempunyai data pemetaan sama sekali.

Model dibangun berdasarkan kabupaten/kota yang mempunyai data hasil pemetaan atau listing. Model yang didapat tersebut selanjutnya digunakan untuk mengestimasi subpopulasi pada kabupaten/kota yang tidak mempunyai data pemetaan atau listing.

Diagram alir estimasi dengan model regresi poisson dapat dilihat pada diagram berikut ini.

Gambar 1. Diagram alir estimasi dengan model regresi poisson



Estimasi ODHA untuk setiap subpopulasi dan kabupaten/kota dihitung dengan menggunakan rumus

$$\hat{Y}_{ODHA\ i,j} = \hat{Y}_{i,j} \times \hat{P}_{HIV\ i,j}$$

di mana,

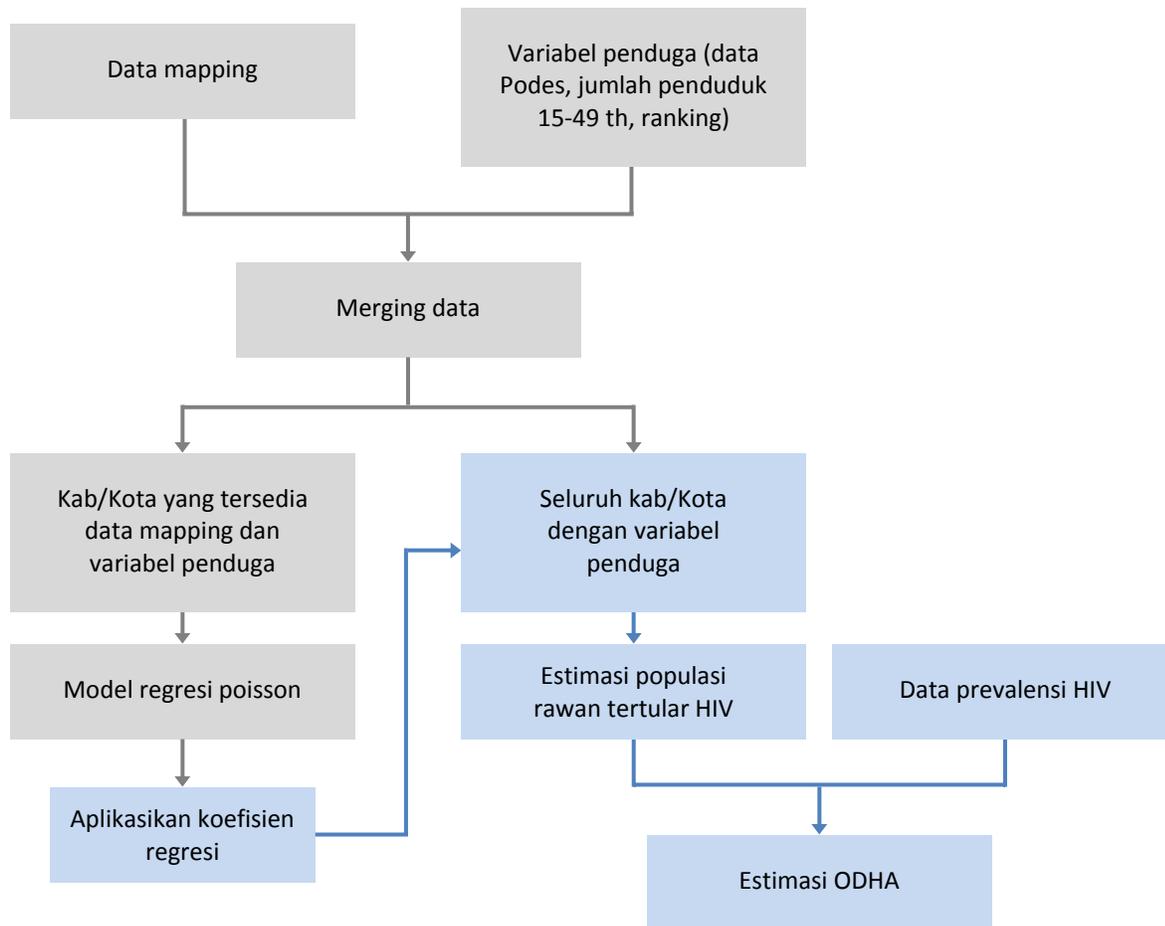
$\hat{Y}_{ODHA\ i,j}$ = estimasi ODHA pada subpopulasi i di kabupaten/kota j ,

$\hat{Y}_{i,j}$ = estimasi jumlah subpopulasi i di kabupaten/kota j , dan

$\hat{P}_{HIV\ i,j}$ = estimasi prevalens HIV pada subpopulasi i di kabupaten/kota j .

Secara umum, proses penghitungan estimasi populasi rawan tertular HIV dan ODHA untuk WPS, waria, LSL, dan penasun adalah seperti pada gambar diagram alir berikut ini.

Gambar 2. Proses Estimasi WPS, Waria, LSL, Penasun, dan ODHA



2.4.2. Penghitungan Estimasi Pelanggan WPS dan pasangannya

Untuk mengestimasi jumlah Pelanggan WPS dalam setahun, dibutuhkan beberapa data yaitu

- 🚫 Jumlah estimasi WPS langsung dan tidak langsung (\hat{Y}_{WPS}),
- 🚫 Rerata transaksi seks komersial per WPS per minggu ($t_{\text{per WPS}}$),
- 🚫 Rerata jumlah minggu tidak menjual seks dalam setahun ($m_{\text{per tahun}}$),
- 🚫 Rerata kunjungan pelanggan WPS ke WPS per tahun ($k_{\text{per pelanggan WPS}}$), dan
- 🚫 Proporsi pelanggan WPS yang Warna Negara Asing (WNA) (p_{WNA}).

Data (2)-(3) didapat dari hasil SSP pada kelompok WPS dan data (4)-(5) didapat dari SSP pada kelompok pria berisiko.

Namun karena data frekuensi membeli seks pelanggan WPS tak langsung tidak tersedia maka disepakati untuk menggunakan frekuensi membeli seks pelanggan WPS langsung yang dikali 1,5. Estimasi jumlah pelanggan WPS dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$\hat{Y}_{\text{Pelanggan WPS}} = \frac{\hat{Y}_{WPS} \times t_{\text{per WPS}} \times (52 - m_{\text{per tahun}})}{k_{\text{per pelanggan WPS}}} \times (1 - p_{WNA})$$

Selanjutnya dilakukan perhitungan estimasi jumlah pasangan seks tetap para pelanggan di atas. Data yang dibutuhkan untuk menghitung estimasi jumlah pasangan seks tetap dari pelanggan WPS adalah

- 🚫 Jumlah estimasi pelanggan WPS ($\hat{Y}_{\text{Pelanggan WPS}}$),
- 🚫 Estimasi proporsi pelanggan WPS yang mengaku menikah atau memiliki pasangan seks tetap ($p_{\text{Menikah | Pelanggan WPS}}$).

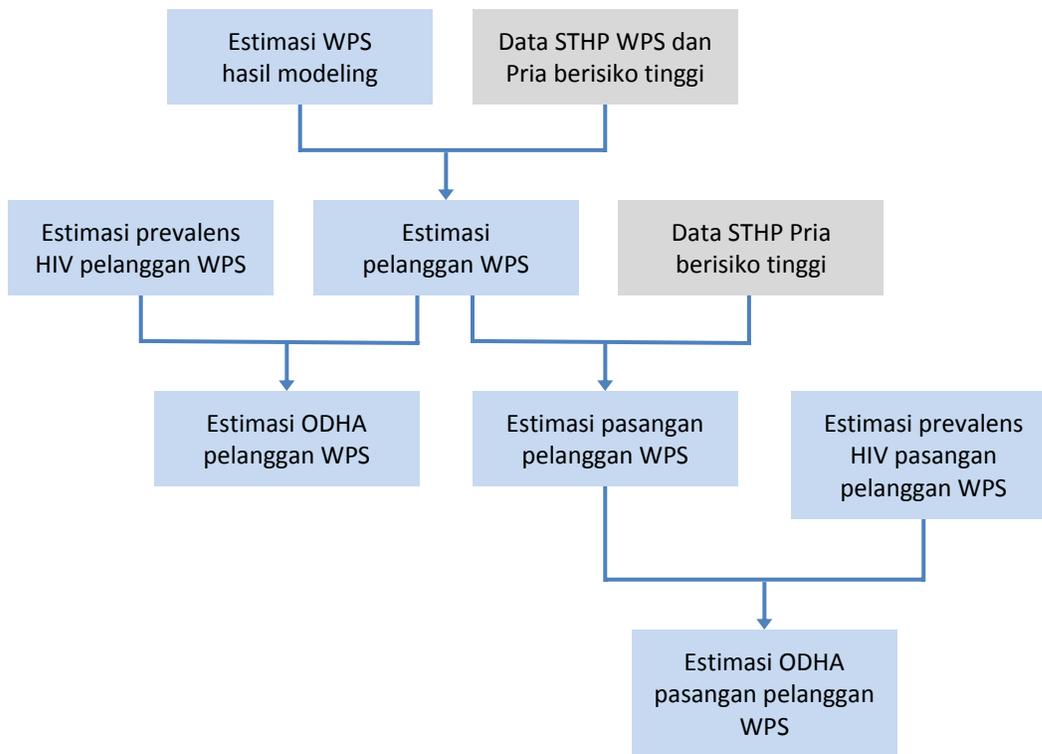
Hasil SSP di 20 kabupaten/kota menunjukkan bahwa sebesar 38 – 77 persen pelanggan WPS mengaku mempunyai istri atau pasangan seks tetap. Bagi kabupaten/kota yang tidak memiliki data surveilans perilaku digunakan rerata persentase pelanggan WPS yang menikah atau mempunyai pasangan seks tetap dari 20 kabupaten/kota. Estimasi jumlah pasangan pelanggan WPS dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$\hat{Y}_{\text{Pasangan Pelanggan WPS}} = \hat{Y}_{\text{Pelanggan WPS}} \times p_{\text{Menikah | Pelanggan WPS}}$$

Setelah estimasi pelanggan dan pasangan pelanggan WPS untuk setiap kabupaten/kota didapat, maka dilakukan estimasi jumlah populasi tersebut yang sudah

terinfeksi HIV dengan cara mengalikan jumlah estimasi populasi dan prevalensi HIV untuk masing-masing populasi di setiap kabupaten/kota. Estimasi prevalensi HIV subpopulasi pelanggan untuk hampir semua kabupaten/kota disepakati menggunakan 1/5 prevalensi HIV pada subpopulasi WPS, sedangkan estimasi prevalensi HIV pada pasangan pelanggan WPS ditetapkan sebesar 1/3 dari prevalensi pelanggan WPS. Kedua asumsi tersebut menggambarkan risiko penularan HIV melalui hubungan seks pada kedua populasi tersebut.

Gambar 3. Proses Estimasi untuk Pelanggan WPS dan Pasangannya



2.4.3. Penghitungan Estimasi Pelanggan Waria

Untuk mengestimasi jumlah pelanggan waria penjaja seks dalam setahun, dibutuhkan beberapa data, yaitu

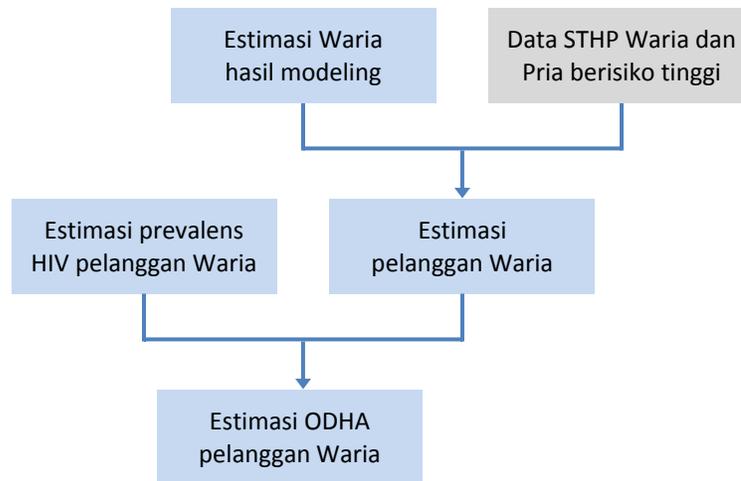
- 🚫 Jumlah estimasi waria (\hat{Y}_{Waria}),
- 🚫 Rerata transaksi seks komersial per waria per tahun ($t_{\text{per Waria}}$),
- 🚫 Rerata kunjungan pelanggan waria ke waria per tahun ($k_{\text{per pelanggan Waria}}$), dan
- 🚫 Proporsi pelanggan waria yang Warna Negara Asing (WNA) (p_{WNA}).

Data (2) didapat dari hasil SSP pada kelompok waria. Karena tidak tersedianya data perilaku pada kelompok pelanggan waria, maka data (3)-(4) diestimasi dengan menggunakan data perilaku pada kelompok pelanggan WPS langsung. Estimasi jumlah pelanggan waria dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$\hat{Y}_{\text{Pelanggan Waria}} = \frac{\hat{Y}_{\text{Waria}} \times t_{\text{per Waria}}}{k_{\text{per pelanggan Waria}}} \times (1 - p_{\text{WNA}})$$

Estimasi prevalensi HIV pada pelanggan waria disepakati 1/5 dari prevalensi HIV pada waria. Asumsi ini untuk menggambarkan risiko penularan HIV dari pelanggan waria yang sebagian besar melakukan insertif dalam hubungan seks anal dan tingkat penggunaan kondom serta pelicin berbahan dasar air pada hubungan seks anal tersebut.

Gambar 4. Proses Estimasi untuk Pelanggan Waria Penjaja Seks



2.4.4. Penghitungan Estimasi Pasangan Tetap Penasun

Dengan diperolehnya estimasi jumlah Penasun di setiap kabupaten/kota maka dapat pula dihitung jumlah pasangan penasun tersebut. Berdasarkan hasil STBP pada penasun tahun 2007 di 6 kota, diperkirakan sebesar 27 persen dari mereka menikah atau mempunyai pasangan seks tetap. Namun demikian perlu diingat bahwa 80 persen penasun wanita mempunyai pasangan yang juga penasun. Dari hasil STBP pada penasun tersebut juga diketahui sekitar 11 persen penasun laki-laki mengaku mempunyai istri atau pasangan seks tetap yang juga pengguna napza suntik. Hal ini diperhitungkan dalam estimasi jumlah pasangan penasun untuk menghindari perhitungan dua kali.

Untuk mengestimasi jumlah pasangan penasun yang bukan penasun, dibutuhkan beberapa data, yaitu

 Jumlah estimasi penasun (\hat{Y}_{Penasun}),

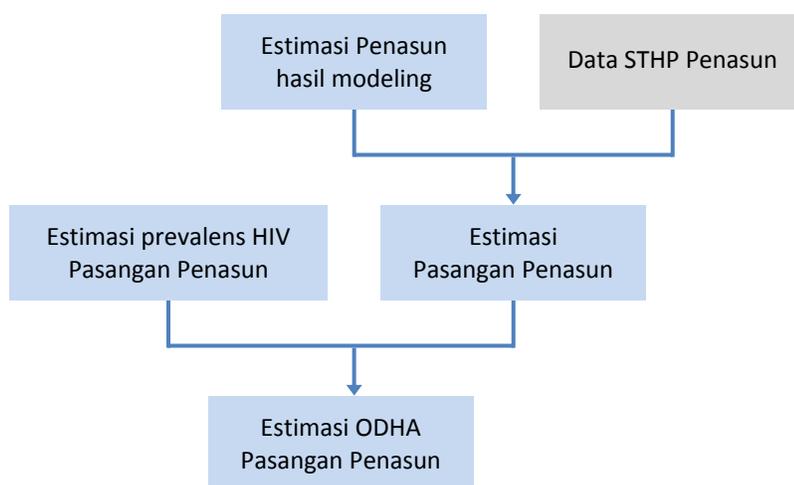
- Proporsi penasun yang menikah atau punya pasangan tetap ($p_{\text{Menikah} | \text{Penasun}}$),
- Proporsi penasun yang menikah dengan atau mempunyai pasangan seks tetap yang juga merupakan Penasun ($p_{\text{Menikah dg Penasun} | \text{Penasun}}$),

Data (2)-(3) didapat dari hasil SSP pada kelompok penasun. Estimasi jumlah pasangan seks tetap penasun yang bukan merupakan penasun dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$\hat{Y}_{\text{Pasangan Penasun}} = \hat{Y}_{\text{Penasun}} \times (p_{\text{Menikah} | \text{Penasun}} - p_{\text{Menikah dg Penasun} | \text{Penasun}})$$

Karena tidak adanya data prevalensi HIV pada pasangan penasun, prevalensi HIV pada pasangan penasun diasumsikan 1/3 dari prevalensi pada penasun. Hal ini didasarkan atas estimasi kasar pada frekuensi berhubungan seks dan kemungkinan penularan HIV dari pria ke wanita.

Gambar 5. Proses Estimasi untuk Pasangan Tetap Penasun



2.4.5. Penghitungan Estimasi Warga Binaan Pemasyarakatan

Proses estimasi jumlah populasi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) relatif lebih mudah dari estimasi jumlah populasi risiko tinggi lainnya mengingat sumber datanya cukup lengkap. Estimasi jumlah warga binaan didapat dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM. Data prevalensi HIV didapat dari hasil surveilans HIV di beberapa lapas/rutan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan.

Banyak lapas/rutan yang menjadi tempat sentinel surveilans HIV sehingga data prevalensi yang tersedia juga cukup banyak. Tercatat 56 kabupaten/kota memiliki data prevalensi HIV pada populasi WBP dengan prevalensi terendah 0 persen sedangkan tertinggi 19.5 persen. Validasi dan verifikasi data prevalensi HIV yang dilaporkan dilakukan oleh Kelompok Kerja Estimasi untuk menjamin bahwa spesimen diambil secara acak dan

mewakili WBP secara keseluruhan di lapas/rutan tersebut bukan hanya WBP dengan kasus penyalahgunaan narkotika saja.

Bagi beberapa kabupaten/kota yang melaporkan data prevalensi HIV dari WBP dengan penyalahgunaan narkotika saja maka dilakukan penyesuaian menggunakan rasio prevalensi HIV pada WBP dengan kasus penyalahgunaan narkotika dan prevalensi HIV pada WBP secara umum pada kabupaten/kota yang memiliki kedua data tersebut. Estimasi WBP yang sudah terinfeksi HIV pada kabupaten/kota yang tidak mempunyai data prevalensi HIV dilakukan dengan mengkalikan estimasi jumlah WBP dengan rerata prevalensi HIV dari wilayah yang memiliki data.

Tidak semua kabupaten/kota memiliki lapas/rutan sehingga yang ada dalam lapas/rutan mungkin berasal dari daerah lain. Kendati demikian, dalam kasus ini mereka tidak dibagi rata lintas daerah karena pemerintah daerah di mana lapas/rutan berada juga bertanggungjawab untuk memberikan pelayanan pencegahan dan perawatan kepada setiap WBP di wilayah tersebut. Di samping itu belum ada data yang dapat digunakan sebagai indeks risiko untuk menghitung estimasi prevalensi HIV pada wilayah yang tidak memiliki datanya sehingga asumsi prevalensi yang dipakai hanya menggunakan rerata dari prevalensi yang ada.

2.4.6. Penghitungan Estimasi Populasi Umum Tanah Papua

Estimasi ODHA pada populasi umum di Tanah Papua didasarkan hasil STHP pada populasi umum di Tanah Papua tahun 2006. Survei ini dilaksanakan di 10 kabupaten/kota yang distratifikasi menurut topografi wilayah yaitu pegunungan (3 kabupaten), pesisir mudah (4 kabupaten/kota), dan pesisir sulit (3 kabupaten). Jumlah sampel pada survei ini dirancang untuk estimasi prevalensi HIV menurut jenis kelamin, kelompok umur dan strata (topografi wilayah).

Tabel 4. Banyaknya Sampel Blok Sensus dan Responden STHP 2006 Tanah Papua menurut Kabupaten/Kota Terpilih

Topografi Wilayah	Kabupaten/Kota	Jumlah Sampel	
		Blok Sensus	Responden
Pegunungan	Kab. Jayawijaya	36	900
	Kab. Paniai	15	375
	Kab. Pegunungan Bintang	19	475
Pesisir Sulit	Kab. Teluk Bintuni	14	350
	Kab. Sorong Selatan	22	550
	Kab. Mappi	17	425
Pesisir Mudah	Kab. Jayapura	25	625
	Kab. Yapen	21	525
	Kota Sorong	42	1,050
	Kota Jayapura	49	1,225
Jumlah		260	6,500

Dalam penghitungan estimasi ODHA di Tanah Papua, dilakukan dengan mengalikan prevalensi HIV dan jumlah penduduk usia 15-49 tahun menurut topografi wilayah dan jenis kelamin. Estimasi ODHA pada setiap topografi wilayah dan jenis kelamin adalah

$$\hat{Y}_{\text{ODHA } h,i} = \hat{N}_{h,i} \times \hat{P}_{\text{HIV } h,i}$$

di mana,

$\hat{Y}_{\text{ODHA } h,i}$ = estimasi ODHA di topografi wilayah h dan jenis kelamin i ,

$\hat{N}_{h,i}$ = adalah estimasi jumlah penduduk usia 15-49 tahun di Tanah Papua di topografi wilayah h dan jenis kelamin i , dan

$\hat{P}_{\text{HIV } h,i}$ = adalah estimasi prevalens HIV di topografi wilayah h dan jenis kelamin i hasil STHP 2006.

Estimasi jumlah ODHA menurut jenis kelamin dapat dihitung dengan rumus

$$\hat{Y}_{\text{ODHA } i} = \sum_{h=1}^3 \hat{Y}_{\text{ODHA } h,i} = \sum_{h=1}^3 \hat{N}_{h,i} \times \hat{P}_{\text{HIV } h,i}$$

Sedangkan estimasi total jumlah ODHA di Tanah Papua adalah

$$\hat{Y}_{\text{ODHA}} = \sum_{i=1}^2 \hat{Y}_{\text{ODHA } i}$$

3 Data dan Parameter

Bab ini menyajikan data dan parameter yang digunakan untuk menghitung estimasi jumlah populasi rawan tertular dan menularkan HIV dan ODHA. Proses pengumpulan data dasar dan data serta parameter hasil berbagai kegiatan yaitu pemetaan, Podes, STBP/STHP, dan surveilans HIV juga disajikan di bab ini.

1.

Pengumpulan data dasar dilakukan sejak bulan September 2009 hingga Februari 2010, di mana tidak semua data survei dan pemetaan yang sudah terkumpul digunakan dalam penghitungan estimasi. Kelompok Kerja Estimasi hanya menggunakan data survei dan pemetaan dari berbagai sumber yang bisa divalidasi dan memiliki sensitifitas tinggi dalam membantu penghitungan estimasi.

Secara umum, beberapa data yang sudah terkumpul dan tidak digunakan dalam penghitungan estimasi kali ini adalah

-  Laporan jumlah tahanan kasus penyalahgunaan narkoba di Kepolisian, Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan serta data jumlah yang dikumpulkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi. Data tersebut tidak digunakan lagi karena terbatasnya data penelitian yang bisa digunakan untuk membedakan jumlah tahanan kasus narkoba dengan jumlah tahanan kasus narkoba yang pernah menggunakan napza suntik setahun terakhir untuk menghitung estimasi jumlah penasun.
-  Laporan hasil surveilans HIV pada darah donor dan subpopulasi yang tidak termasuk dalam populasi yang diestimasi seperti ABK, ibu hamil, remaja dan pasien TB.
-  Laporan hasil surveilans HIV sebelum tahun 2008 untuk subpopulasi yang akan diestimasi. Data tersebut tidak digunakan karena tidak lagi menggambarkan situasi epidemi terkini khususnya pada subpopulasi yang memiliki mobilitas tinggi.

3.1. Data Pemetaan

Data pemetaan sebaran populasi berisiko berasal dari beberapa instansi terkait yaitu Dinas Kesehatan, KPA, LSM, Dinas Sosial, Dinas Pariwisata dan sumber lainnya seperti hasil pemetaan/listing SSP/STBP dan survei lainnya. Jumlah sumber data dalam setiap kabupaten/kota sangat tergantung pada subpopulasi yang akan diestimasi. Data

pemetaan jumlah WPS mempunyai sumber data yang paling banyak, yaitu 5 sumber data. Namun demikian, tidak semua kabupaten mempunyai data pemetaan WPS meski dari satu sumber sekalipun. Sedangkan jumlah sumber data pemetaan jumlah penasun adalah yang paling sedikit yaitu 3 sumber data tetapi jumlah kabupaten/kota yang memiliki data pemetaan penasun sedikit lebih banyak di banding LSL.

Sebagian besar kabupaten/kota yang memiliki sumber data adalah kabupaten/kota yang selama ini menjadi prioritas wilayah kerja berbagai program pengendalian HIV dan AIDS seperti Kabupaten/kota di Jawa-Bali, Sumatera Utara, Kep. Riau, Kalimantan Barat dan Timur, Sulawesi Utara dan Selatan dan Tanah Papua. Beberapa Kabupaten/kota bahkan memiliki 3 atau lebih sumber data pemetaan jumlah subpopulasi yang akan diestimasi.

Daftar provinsi yang memiliki data pemetaan di beberapa kabupaten/kota adalah

-  WPS dan Waria: semua provinsi kecuali Sumatera Barat;
-  LSL (15 provinsi): Kalimantan Barat, Jawa Timur, Bali, NTB, Lampung, Maluku, DKI Jakarta, Riau, Jawa Barat, Sumatera Utara, Kep. Riau, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan;
-  Penasun (17 provinsi): Kalimantan Barat, Bali, Banten, NTB, Jambi, Lampung, NAD, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Riau, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kep. Riau, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Utara.

Jumlah kabupaten/kota yang memiliki data pemetaan untuk setiap subpopulasi dan jenis sumber data pemetaan dapat dilihat seperti tabel berikut ini.

Tabel 5. Jumlah Kabupaten/Kota menurut Sumber Data Pemetaan dan Subpopulasi

Sumber data Pemetaan	Jumlah Kabupaten/Kota				
	WPS-L	WPS-TL	Waria	LSL	Penasun
Dinas Kesehatan	250	241	266	158	166
Dinas Sosial	127				
Dinas Pariwisata		34			
LSM	114	100	92	86	81
KPAN	49	58	79	79	32
Lainnya	46		84	98	

Walaupun demikian, dari laporan yang diterima, ternyata masih banyak kabupaten/kota yang tidak mempunyai atau melaporkan data pemetaan jumlah subpopulasi yang akan diestimasi. Sebanyak 305 dari 483 kabupaten/kota tidak mempunyai data pemetaan jumlah LSL dan 286 kabupaten/kota tidak mempunyai data pemetaan jumlah penasun. Sedangkan data pemetaan jumlah WPS langsung dan tak langsung serta waria sudah dilaporkan oleh sebagian besar kabupaten/kota. Jumlah sumber data menurut kabupaten/kota dan subpopulasi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6. Jumlah Kabupaten/Kota dengan Banyaknya Sumber Data Pemetaan menurut Subpopulasi

Jumlah sumber data	Jumlah Kabupaten/Kota				
	WPS-L	WPS-TL	Waria	LSL	Penasun
0	151	169	177	305	286
1	159	225	185	67	127
2	110	63	54	28	30
3	51	22	40	34	40
> 3	12	4	27	49	0

Rerata jumlah WPS langsung hasil pemetaan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, LSM, KPA dan sumber lainnya pada daerah yang memiliki lebih dari satu sumber data cenderung sama. Sedangkan rerata pemetaan jumlah WPS langsung yang dilakukan oleh Dinas Sosial cenderung lebih rendah dari lembaga lainnya. Hal ini juga terjadi pada WPS tak langsung di mana hasil pemetaan Dinas Sosial lebih rendah.

Rerata hasil pemetaan jumlah penasun yang dilakukan LSM cenderung lebih rendah dari hasil pemetaan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan maupun hasil pemetaan KPA. Sedangkan perbedaan rerata hasil pemetaan Dinas Kesehatan dan KPA pada kabupaten/kota yang sama lebih rendah. Rerata hasil pemetaan jumlah LSL yang dilakukan KPA pada daerah yang memiliki lebih dari satu sumber data cenderung lebih rendah dari hasil pemetaan LSM dan Dinas Kesehatan. Sedangkan hasil pemetaan jumlah Waria yang dilakukan Dinas Kesehatan dan LSM cenderung sama.

Jumlah kabupaten/kota yang memiliki data pemetaan pada estimasi tahun 2009 ini jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan estimasi tahun 2006. Peningkatan tertinggi jumlah kabupaten/kota yang memiliki data pemetaan terjadi untuk subpopulasi LSL (5.4 kali), diikuti oleh penasun (3.7 kali), WPS tak langsung (3.5 kali), waria (1.9 kali) dan yang terendah adalah subpopulasi WPS langsung (1.4 kali). Walaupun demikian, jumlah kabupaten/kota yang memiliki hasil pemetaan subpopulasi WPS langsung adalah yang terbanyak dibanding subpopulasi lainnya.

Tabel 7. Perbandingan Jumlah Kabupaten/Kota yang Memiliki Sumber Data Pemetaan Populasi Rawan Terinfeksi HIV Tahun 2006 dan 2009

Jumlah Sumber Data	Penasun		WPS L		WPS TL		Waria		LSL	
	2006	2009	2006	2009	2006	2009	2006	2009	2006	2009
1	39	113	102	159	71	225	64	185	25	67
2	6	43	55	110	5	63	45	54	5	28
3	0	26	52	51	5	22	33	40		34
> 3				12		4	4	27		49
Total	45	182	209	332	81	314	146	306	30	178

Persen	10%	38%	48%	69%	18%	65%	33%	63%	7%	37%
--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----

Rerata hasil pemetaan jumlah populasi rawan terinfeksi HIV pada kabupaten/kota yang memiliki data hasil pemetaan tahun 2006 dan 2009 menunjukkan hasil pemetaan tahun 2009 yang cenderung lebih tinggi pada semua subpopulasi dari hasil pemetaan tahun 2006.

Tabel 8. Rerata Jumlah Populasi Rawan Terinfeksi HIV Hasil Pemetaan Tahun 2006 dan 2009

Populasi	Tahun	Jml kab/kota	Rerata	Beda
WPS L	2006	230	249	72
	2009	230	321	
WPS TL	2006	117	315	51
	2009	117	366	
Penasun	2006	28	425	603
	2009	28	1,028	
Waria	2006	130	84	32
	2009	130	116	
LSL	2006	33	359	703
	2009	33	1,062	

3.2. Data Survei Potensi Desa

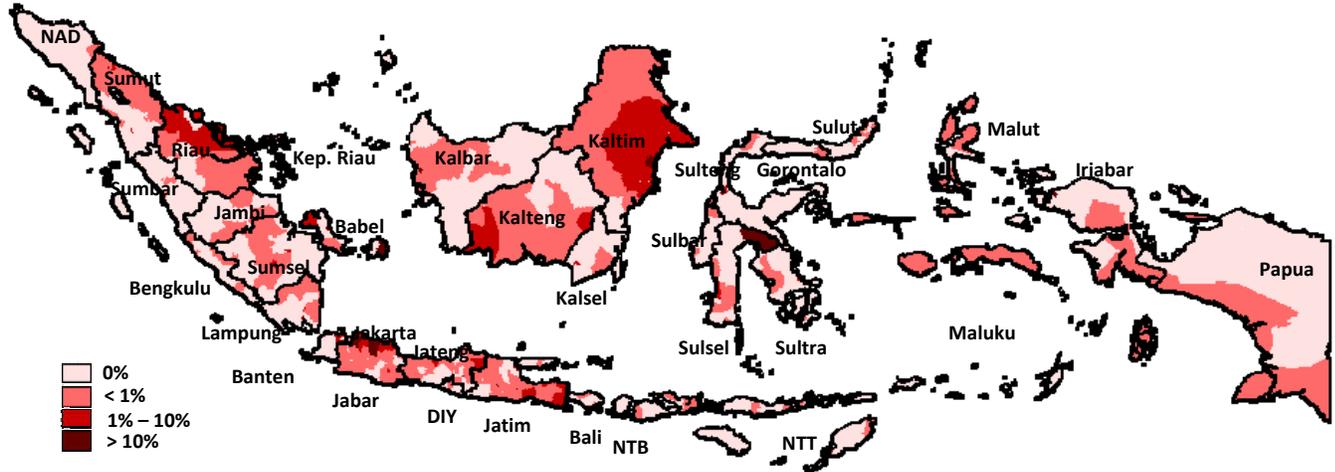
Secara umum, berdasarkan Podes tahun 2008 ada 1,258 (1.7%) dari 75,410 desa di Indonesia yang memiliki lokalisasi atau tempat mangkal penjaja seks. Sedangkan persentase desa yang memiliki lokalisasi atau tempat mangkal penjaja seks di setiap kabupaten/kota berkisar antara 0 – 35 persen, di mana ada 160 (34%) kabupaten/kota tidak ada satupun desanya memiliki lokalisasi, 84 (18%) kabupaten/kota memiliki kurang dari 1 persen desa dengan lokalisasi, 202 (43%) antara 1 – 10 persen dan 19 (4%) kabupaten/kota yang memiliki lebih dari 10 persen desa dengan lokalisasi/tempat mangkal penjaja seks.

Lima provinsi dengan persentase desa yang memiliki tempat mangkal penjaja seks tertinggi adalah DKI Jakarta (7%), Kalimantan Timur (5%), Kepulauan Riau (4%), Bangka Belitung (4%) dan Jawa Barat (4%). Sedangkan 5 provinsi terendah adalah Nanggroe Aceh Darussalam (0.1%), Kalimantan Selatan (0.3%), Sumatera Barat (0.4%), Papua (0.5%) dan Sulawesi Tengah (0.5%).

Persentase desa yang memiliki lokalisasi atau tempat mangkal penjaja seks hasil Podes 2008 (1.7%) lebih rendah jika dibandingkan dengan hasil Podes tahun 2005 (2.2%). Walaupun demikian, ada 240 kabupaten/kota mengalami peningkatan persentase desa yang

memiliki lokalisasi atau tempat mangkal penjaja seks, jauh lebih banyak dibanding kabupaten/kota yang mengalami penurunan (113 kabupaten/kota).

Gambar 6. Distribusi Persentase Desa yang Memiliki Lokalisasi/Tempat Mangkal Penjaja Seks menurut Kabupaten/Kota, Podes 2008



Jumlah desa dengan kasus penyalahgunaan narkoba dalam setahun terakhir jauh lebih tinggi dari jumlah desa yang memiliki lokalisasi yaitu 4,546 (6%). Sedangkan persentase desa yang memiliki kasus penyalahgunaan narkoba dalam setahun terakhir di setiap kabupaten/kota berkisar antara 0 – 76 persen, di mana ada 107 (23%) kabupaten/kota yang tidak ada satupun desanya memiliki kasus penyalahgunaan narkoba, 49 (11%) kabupaten/kota memiliki kurang dari 1 persen, 119 (43%) kabupaten/kota antara 1 – 10 persen dan 126 (27%) kabupaten/kota yang memiliki lebih dari 10 persen desa dengan kasus penyalahgunaan narkoba dalam setahun terakhir.

Lima provinsi dengan persentase desa yang memiliki kasus penyalahgunaan narkoba dalam setahun terakhir tertinggi adalah DKI Jakarta (34%), Sumatera Barat (16%), Banten (14%), Riau (13%) dan Jawa Barat (11%). Sedangkan 5 provinsi terendah adalah Papua Barat (0.2%), Nusa Tenggara Timur (0.3%), Sulawesi Utara (0.3%), Sulawesi Barat (0.4%) dan Sulawesi Tenggara (0.4%).

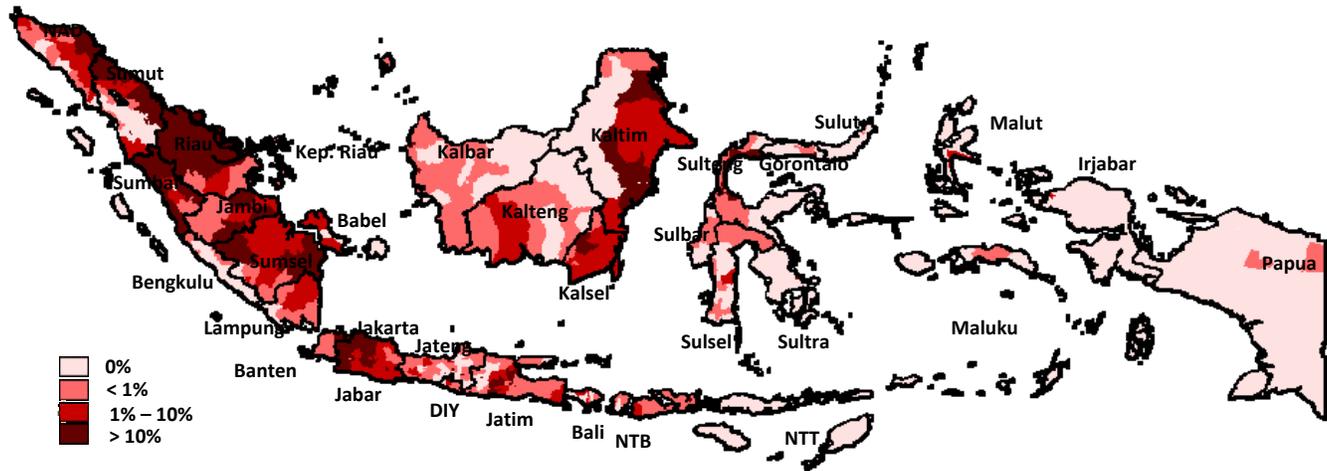
Sebagian besar desa (55%) menyatakan bahwa kasus penyalahgunaan narkoba di desanya menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya dan hanya 825 (18%) desa yang menyatakan meningkat.

Beberapa variabel lainnya dari hasil Podes 2008 yang digunakan sebagai faktor penduga untuk mengestimasi jumlah populasi rawan di kabupaten/kota yang tidak mempunyai data pemetaan adalah

- ⚠ Kasus peredaran gelap narkoba dalam setahun terakhir; secara umum persentase desa yang memiliki kasus tersebut menurut kabupaten/kota berkisar antara 0 – 52 persen

dengan rerata 2.8 persen. Provinsi dengan persentase desa yang memiliki kasus peredaran gelap narkoba dalam setahun terakhir tertinggi adalah DKI Jakarta (17.2%) sedangkan yang terendah adalah Papua Barat (0.1%).

Gambar 7. Distribusi Persentase Desa yang Memiliki Kasus Penyalahgunaan Narkoba dalam Setahun Terakhir menurut Kabupaten/Kota, Podes 2008



- ⓧ** Status pemerintahan; di mana desa dikategorikan sebagai daerah pedesaan sedangkan kelurahan mencerminkan daerah perkotaan. Persentase kelurahan menurut kabupaten/kota berkisar antara 0 – 100% dengan rerata 10.5 persen. Provinsi dengan status kelurahan tertinggi adalah DKI Jakarta (100%) sedangkan yang terendah adalah Nanggroe Aceh Darussalam (1.7%).
- ⓧ** Keberadaan bioskop; secara umum persentase desa yang memiliki bioskop menurut kabupaten/kota berkisar antara 0 – 22.6 persen dengan rerata 0.2 persen (174 dari 75,410 desa). Provinsi dengan persentase desa yang memiliki bioskop tertinggi adalah DKI Jakarta (13.1%) dan ada 12 provinsi (Nanggroe Aceh Darussalam, Bengkulu, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua Barat, Papua) yang tidak ada satupun desanya memiliki bioskop.
- ⓧ** Keberadaan pub/karaoke/diskotik; secara umum persentase desa yang memiliki pub/karaoke/diskotik menurut kabupaten/kota berkisar antara 0 – 58 persen dengan rerata 2 persen. Provinsi dengan persentase desa yang memiliki pub/karaoke/diskotik tertinggi adalah DKI Jakarta (31%) sedangkan yang terendah adalah Nanggroe Aceh Darussalam (0.02%).
- ⓧ** Proporsi penduduk laki-laki dan perempuan usia 15-49 tahun yang tinggal di perkotaan; secara umum berkisar antara 0 – 100 persen dengan rerata 27 persen. Provinsi dengan proporsi penduduk usia 15-49 tahun yang tinggal di perkotaan tertinggi adalah DKI Jakarta (100%) sedangkan yang terendah adalah Nanggroe Aceh Darussalam (6.8%).

3.3. Data Surveilans Perilaku

Beberapa variabel dari hasil surveilans perilaku (STBP 2007 dan 2009) pada populasi berisiko tinggi digunakan sebagai faktor pengali dalam penghitungan estimasi jumlah pelanggan WPS langsung dan tak langsung, pelanggan waria, pasangan seks tetap/istri pelanggan penaja seks dan pasangan seks penasun. Penggunaan data perilaku dilakukan karena tidak adanya data pemetaan pada subpopulasi tersebut.

Seperti sudah dijelaskan dalam Bab Metodologi, hasil surveilans perilaku pada subpopulasi WPS, waria, dan pelanggan WPS digunakan untuk menghitung estimasi jumlah pelanggan penaja seks dan pasangan seks tetapnya di kabupaten/kota di mana surveilans tersebut dilakukan. Sedangkan untuk kabupaten/kota yang tidak mempunyai data surveilans perilaku maka digunakan rerata dari angka yang ada. Begitu juga dengan hasil surveilans perilaku pada penasun yang digunakan sebagai faktor pengali penghitungan estimasi pasangan penasun.

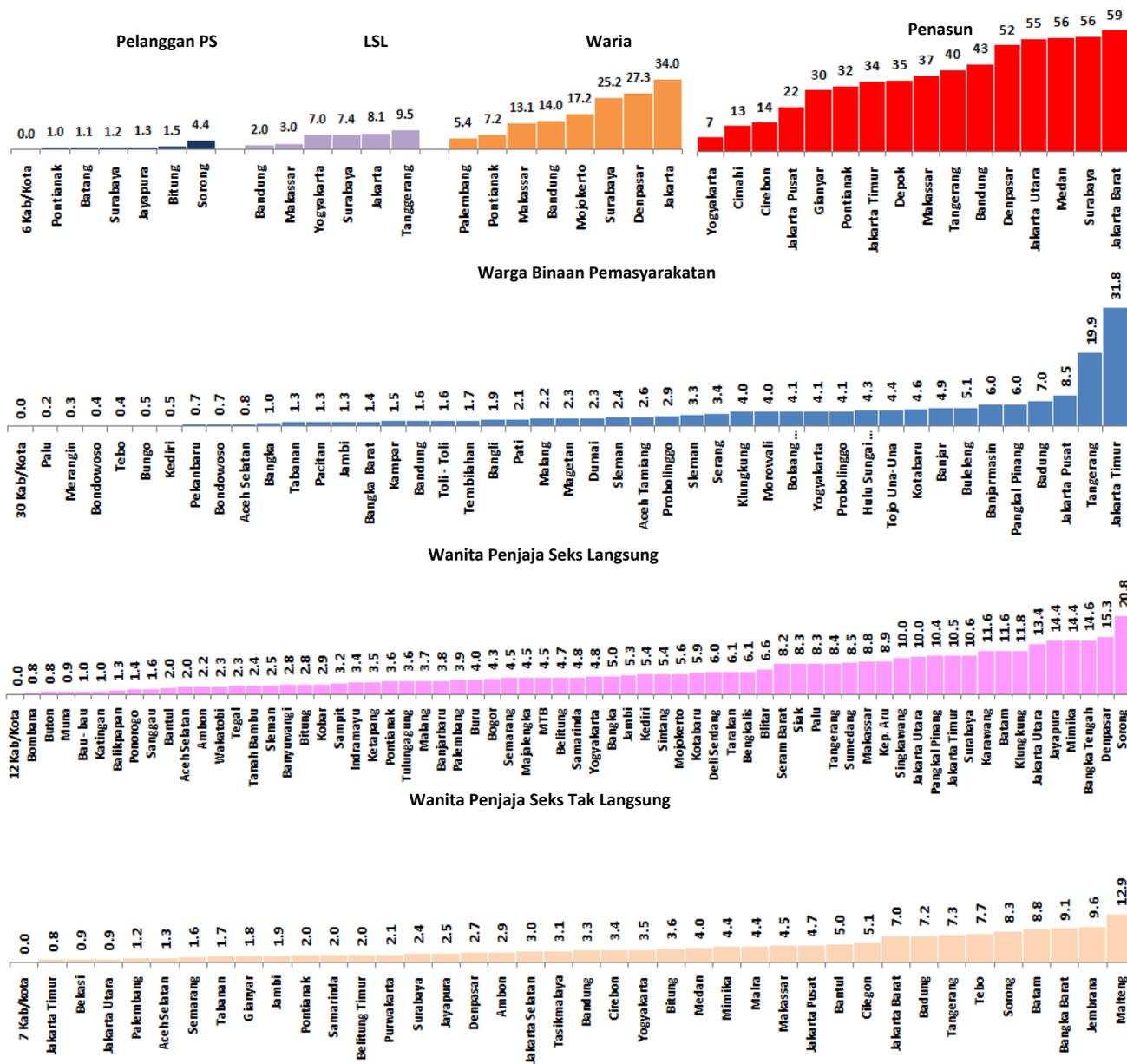
Tabel 9. Hasil Surveilans Perilaku 2007 dan 2009 yang Digunakan untuk Penghitungan Estimasi

Kabupaten/ Kota	WPS Langsung				WPS Tak Langsung				Pelanggan WPS		Penasun	Waria	
	Rerata hari libur/bln	Rerata bulan kerja/thn	Rerata pelanggan /mg	Rerata pelanggan/ thn	Rerata hari libur/bln	Rerata bulan kerja/thn	Rerata pelanggan/ mg	Rerata pelanggan/ thn	% Menikah	Rerata WPS/thn	% Menikah	Rerata pelanggan/ mg	Rerata pelanggan/ thn
Deli Serdang	5.16	8.20	7.80	227					73	4.77			
Medan					5.38	9.00	4.63	147	33	2.73	27		
Palembang	5.02	8.05	8.34	240	3.90	9.19	7.43	255	64	4.95		4.63	121
Batam	6.57	7.89	5.79	153	5.65	7.30	4.62	117	54	3.57			
Jakarta Utara	4.59	8.37	10.25	312	4.79	8.96	5.97	193	65	2.53	24	2.91	76
Jakarta Barat					7.22	8.64	6.82	192					
Bandung	6.73	9.07	18.93	571	6.44	8.90	4.36	131			22	2.17	57
Bekasi	5.17	8.85	3.50	110	3.35	7.85	1.55	46					
Karawang	3.30	6.65	3.04	77									
Batang	8.55	7.61	5.74	134					80	8.10			
Semarang	7.86	8.18	8.35	216	5.76	8.21	6.69	190	57	3.90	29	3.55	93
Yogyakarta	6.86	8.27	8.87	242	5.13	8.18	5.60	163	84	5.74	25		
Malang	7.35	8.51	7.54	208	6.11	9.57	2.76	90			35	2.98	78
Surabaya	6.73	9.07	11.88	358	5.03	9.24	4.47	147	35	3.52	29	4.58	120
Banyuwangi	8.61	7.60	6.29	146					86	2.50			
Tangerang	7.15	6.62	4.52	98	5.42	7.11	2.94	73			19		
Denpasar	6.07	7.32	16.90	423					86	14.36			
Kupang									44	4.56			
Pontianak	5.97	9.91	14.19	483	4.41	9.75	4.47	159	56	5.06	20	4.77	125
Samarinda	6.72	7.86	6.81	178	5.16	6.90	3.46	85					
Bitung	7.18	9.08	1.66	49	6.00	8.76	1.62	49	48	5.64			
Makassar	5.82	8.46	12.22	357	3.91	9.62	3.53	126	56	3.37	27	3.19	83
Merauke	5.94	8.33	5.27	151	6.05	6.76	1.28	30	65	2.13			
Jayapura	6.41	8.29	5.15	144	4.95	8.02	1.37	39	58	2.58			
Mimika	7.72	8.25	3.12	82	4.57	5.16	1.38	26	49	3.44			
Sorong	5.44	8.74	9.31	286	5.77	6.03	1.78	37	47	4.39			

3.4. Data Surveilans HIV

Hasil surveilans HIV yang dikumpulkan dari STBP dan laporan Dinas Kesehatan Provinsi menunjukkan prevalensi HIV yang beragam antara kabupaten/kota maupun subpopulasi sebagaimana ditunjukkan gambar dibawah ini.

Gambar 8. Prevalensi HIV Hasil Surveilans 2007 – 2009 menurut Subpopulasi dan Lokasi



Jumlah kabupaten/kota yang memiliki data prevalensi HIV pada populasi paling berisiko tertular dan menularkan dalam dua tahun terakhir masih sangat terbatas. Secara berurutan jumlah kabupaten/kota dan kisaran prevalensi HIV untuk WPS langsung, WBP, WPS tak langsung, penasun, pelanggan penjaja seks, waria, dan LSL adalah 77 kabupaten/kota (0 – 20.8%); 74 (0 – 31.8%); 46 (0 – 12.9%); 16 (7 – 59.3%); 12 (0 – 4.4%); 8 (5.4 – 34%) dan 6 (2 – 9.5%). Sedangkan bagi kabupaten/kota yang tidak memiliki data prevalensi HIV pada sebagian atau semua subpopulasi tersebut akan menggunakan angka dari kabupaten/kota dalam provinsi yang sama jika ada atau rerata dari semua data prevalensi HIV yang tersedia untuk masing-masing subpopulasi.

4 Hasil

Bab ini menyajikan hasil estimasi dengan modelan regresi poisson untuk mengestimasi jumlah populasi WPS, waria, penasun, dan LSL; hasil estimasi jumlah populasi pelanggan penjaja seks dan pasangannya, pasangan seks penasun dengan metode multiplier; dan hasil estimasi ODHA untuk semua subpopulasi yang diestimasi. Hasil estimasi ini telah dikaji bersama oleh tim dari WHO, UNAIDS dan pemangku kepentingan di tingkat nasional.

4.1. Estimasi Populasi Rawan Tertular HIV dan ODHA

Hasil proses penghitungan estimasi jumlah populasi rawan tertular HIV dan jumlah populasi rawan yang terinfeksi HIV tahun 2009 dapat dilihat pada Tabel 10. Diperkirakan antara 5,1– 8,1 juta orang dengan nilai tengah 6,3 juta orang paling berisiko tertular HIV di Indonesia diluar populasi umum Tanah Papua. Sebagian besar (lebih dari 80%) adalah pelanggan penjaja seks dan pasangan seks tetapnya (istri/pacar), diikuti populasi LSL (11%), penjaja seks (3.3%), WBP (2.2%), dan yang terkecil adalah populasi penasun dan pasangannya (2.1%).

Meskipun estimasi jumlah penasun dan pasangannya adalah yang terkecil di antara populasi rawan tersebut di atas, tetapi estimasi jumlah ODHA populasi tersebut merupakan yang terbesar (37.6%) dari total estimasi populasi rawan terinfeksi HIV di luar populasi umum Tanah Papua, diikuti oleh pelanggan penjaja seks dan pasangan seks tetapnya (31.9%), LSL (15.2%), penjaja seks (12.1%), dan WBP (3.2%). Hal ini disebabkan karena besarnya perbedaan prevalensi HIV pada masing-masing populasi rawan tertular HIV di luar populasi umum Tanah Papua. Prevalensi HIV tertinggi ada pada penasun yang berkisar antara 31.4 – 67.9 persen, sedangkan yang terendah adalah prevalensi HIV pada populasi pasangan pelanggan WPS yaitu sekitar 0.52 – 0.66 persen.

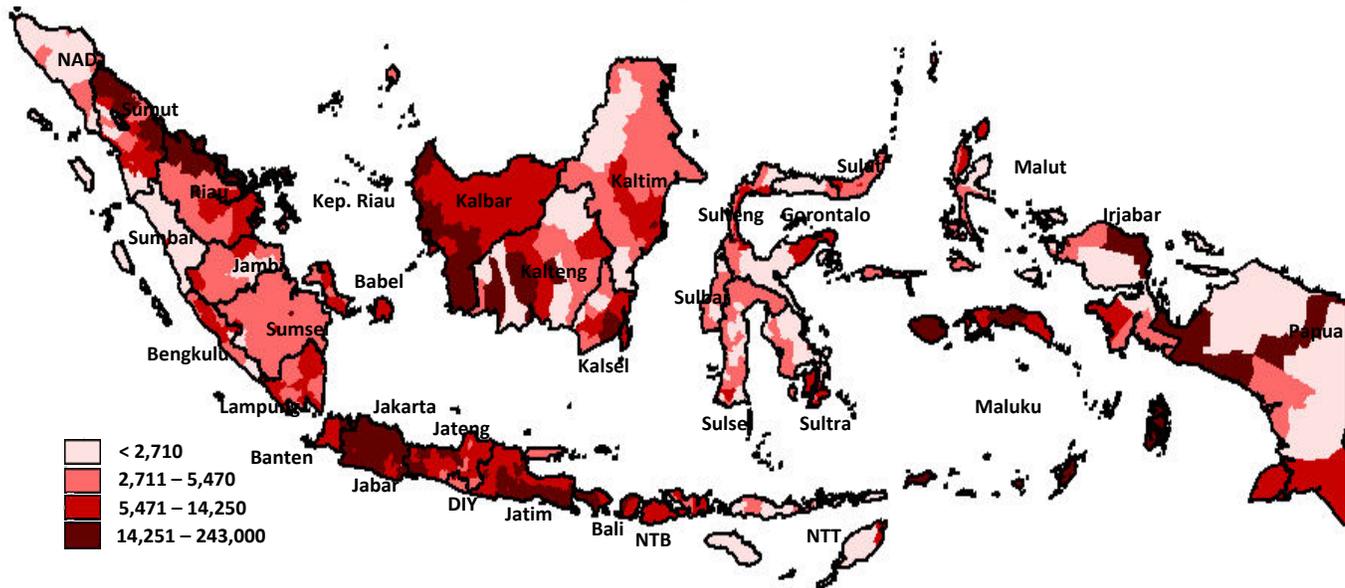
Secara umum, proses estimasi jumlah populasi rawan terinfeksi HIV dan ODHA tahun 2009 menghasilkan estimasi jumlah ODHA usia 15 – 49 tahun berkisar antara 132 – 287 ribu orang dengan nilai tengah 186 ribu. Estimasi tersebut belum mencakup estimasi jumlah ODHA yang berusia di bawah 15 tahun dan 50 tahun ke atas. Selain itu juga proses estimasi tahun 2009 tidak memperhitungkan estimasi jumlah ODHA yang tertular melalui darah donor dan paparan cairan tubuh yang mengandung HIV, seperti petugas medis yang tertusuk jarum yang mengandung cairan tubuh dengan HIV. Hal ini disebabkan karena subpopulasi yang mungkin tertular melalui kedua cara tersebut tidak memenuhi kriteria dalam metodologi penghitungan estimasi tahun 2009.

Tabel 10. Estimasi Jumlah Populasi Rawan Terinfeksi HIV dan Jumlah ODHA di Indonesia Tahun 2009

Populasi Risiko Tinggi	Estimasi Jumlah Populasi			Estimasi Prevalensi HIV (%)			Estimasi ODHA		
	Md	Rendah	Tinggi	Md	Rendah	Tinggi	Md	Rendah	Tinggi
Pengguna Napza Suntik (Penasun)	105,784	73,663	201,131	49.69	31.42	67.96	52,565	37,225	96,453
Pasangan Penasun	28,085	19,428	54,166	25.16	11.58	38.74	7,066	4,611	14,421
Wanita Penjaja Seks	214,054	177,962	258,007	6.12	5.25	6.99	13,106	11,151	15,411
Wanita Penjaja Seks - Langsung	106,011	90,245	124,296	8.33	7.29	9.37	8,836	7,634	10,231
Wanita Penjaja Seks - Tidak Langsung	108,043	87,718	133,711	3.95	3.29	4.61	4,270	3,517	5,180
Waria	32,065	21,589	51,235	18.96	11.69	26.23	6,078	4,212	9,562
Laki-laki Suka Seks Laki-laki (LSL)	695,026	423,729	1,358,527	3.47	1.59	5.35	24,138	15,530	44,142
Pelanggan Penjaja Seks	3,241,244	2,661,161	3,820,589	1.21	1.03	1.39	39,207	31,519	46,186
Pelanggan WPS Langsung	2,285,996	1,923,217	2,648,521	1.32	1.16	1.48	30,287	26,199	34,146
Pelanggan WPS Tidak Langsung	883,932	695,804	1,071,832	0.66	0.56	0.76	5,843	4,797	6,643
Pelanggan Waria	71,316	42,140	100,236	4.31	1.69	6.93	3,077	523	5,397
Pasangan Pelanggan WPS	1,938,650	1,616,541	2,260,292	0.59	0.52	0.66	11,442	9,744	12,718
Pasangan Pelanggan WPS Langsung	1,420,240	1,205,344	1,634,910	0.68	0.60	0.76	9,625	8,296	10,730
Pasangan Pelanggan WPS Tidak Langsung	518,410	411,197	625,382	0.35	0.30	0.40	1,817	1,448	1,988
Warga Binaan Pemasyarakatan	140,559	140,559	140,559	3.63	2.88	4.38	5,106	3,233	6,978
Populasi Risiko Tinggi (15-49 Thn)	6,395,466	5,134,632	8,144,505				158,708	117,225	245,871
Laki-laki	4,211,570	3,318,532	5,566,161				125,274	90,414	200,040
Perempuan	2,183,896	1,816,101	2,578,343				33,434	26,811	45,831
Populasi Umum Tanah Papua (15-49 Thn)	1,354,979	1,261,212	1,422,783	2.03	1.46	2.60	27,550	14,864	41,486
Laki-laki	661,806	592,941	705,707				16,518	9,185	24,332
Perempuan	693,173	668,271	717,076				11,032	5,678	17,154
Total Populasi (15-49 Thn)	122,959,811	121,210,772	124,220,645	0.15	0.11	0.19	186,257	132,089	287,357
Laki-laki	60,041,042	58,686,451	60,934,080	0.24	0.18	0.30	141,791	99,600	224,372
Perempuan	62,918,769	62,524,322	63,286,564	0.07	0.06	0.08	44,466	32,489	62,985

Sebaran geografi populasi rawan di luar populasi umum Tanah Papua tidak merata di semua kabupaten/kota di Indonesia. Secara umum 4 provinsi (Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Tengah) memiliki estimasi jumlah populasi rawan tertular HIV lebih dari 500 ribu orang, 8 provinsi (Sumatera Utara, Bali, Kalimantan Barat, Riau, Maluku, Kepulauan Riau, Papua, Banten) antara 100 – 500 ribu orang, dan 21 provinsi lainnya memiliki jumlah estimasi populasi rawan tertular HIV kurang dari 100 ribu orang.

Gambar 9. Distribusi Estimasi Jumlah Populasi Rawan Tertular HIV menurut Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2009



4.1.1. Penasun dan Pasangan Seks Tetap Penasun

Dibandingkan dengan hasil estimasi sebelumnya, maka nilai tengah hasil estimasi Penasun tahun 2009 (105,784) lebih rendah 52 persen dari rerata estimasi tahun 2006 (219,130). Hasil yang lebih rendah tersebut terjadi di semua provinsi kecuali NTB dan Sulawesi Utara. Tiga belas provinsi dengan perbedaan hasil estimasi jumlah penasun tahun 2006 dan 2009 sangat signifikan (90% atau lebih) adalah Kalimantan Timur, Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, Papua, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, Lampung, Kalimantan Tengah, Nanggroe Aceh Darussalam, Bengkulu dan Maluku Utara.

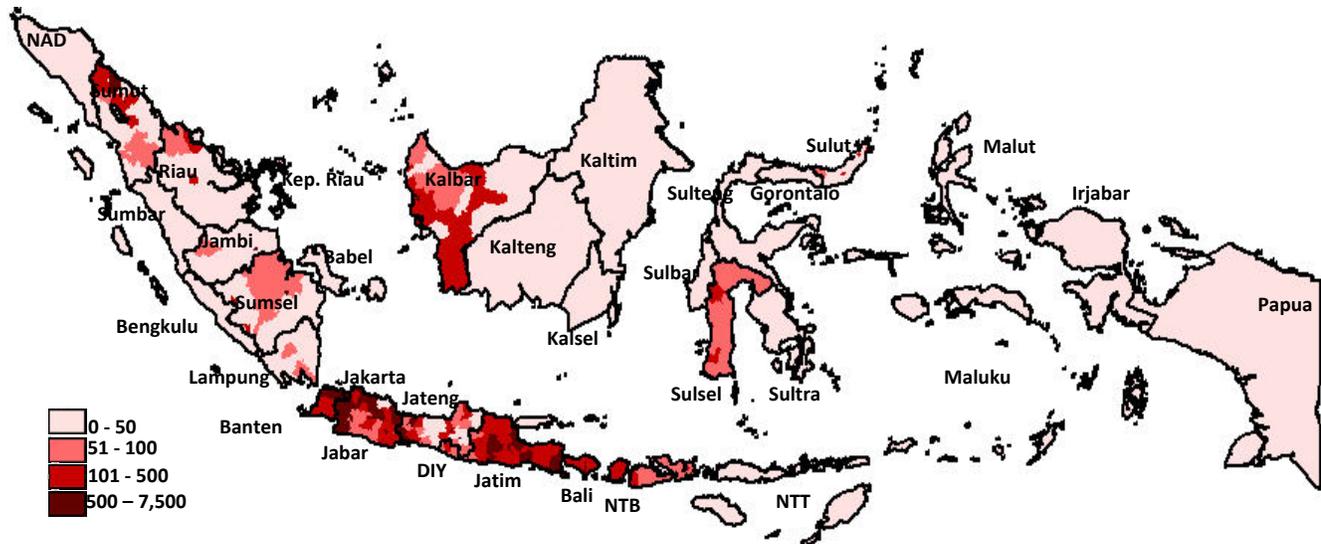
Tabel 11. Estimasi Jumlah Populasi dan ODHA Penasun Serta Pasangan Seks Tetap Penasun menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2009

Provinsi	Pengguna Napza Suntik (Penasun)						Pasangan Seks Tetap Penasun					
	Estimasi Jumlah			Estimasi ODHA			Estimasi Jumlah			Estimasi ODHA		
	Md	Rendah	Tinggi	Md	Rendah	Tinggi	Md	Rendah	Tinggi	Md	Rendah	Tinggi
DKI Jakarta	27,852	24,733	31,374	15,324	13,609	17,261	6,715	5,964	7,565	1,581	1,277	1,944
Jawa Timur	22,308	16,362	26,978	12,492	9,160	15,109	7,075	5,186	8,556	1,970	1,392	2,493
Jawa Barat	17,551	11,793	20,398	7,512	5,046	8,732	3,790	2,546	4,407	926	572	1,158
Jawa Tengah	8,241	3,882	10,820	3,751	1,766	4,920	2,391	1,125	3,138	561	242	809
Sumatera Utara	5,705	4,265	7,339	3,176	2,371	4,080	1,552	1,160	1,998	445	324	601
Banten	3,334	2,201	5,075	1,333	881	2,030	912	603	1,388	266	168	421
Bali	3,012	2,099	4,352	1,371	954	1,980	824	574	1,190	224	148	340
Sumatera Selatan	2,853	1,632	12,218	1,298	742	5,558	779	446	3,342	183	95	856
Sulawesi Selatan	2,758	1,739	4,374	1,020	643	1,618	756	475	1,199	175	105	307
Kalimantan Barat	2,032	1,398	2,960	650	446	946	555	383	811	130	81	210
Sulawesi Utara	1,928	214	4,740	876	97	2,154	525	59	1,296	126	13	335
Nusa Tenggara Barat	1,873	1,145	3,059	852	521	1,392	511	312	838	120	65	216
Kepulauan Riau	1,226	625	1,906	556	285	867	335	171	522	78	38	133
Riau	840	349	1,451	383	159	660	232	95	396	56	20	102
DI Yogyakarta	805	575	1,123	367	262	511	220	158	307	50	35	79
Jambi	803	431	2,235	367	195	1,015	221	117	610	52	23	155
Lampung	493	191	1,266	224	85	575	135	51	347	33	13	92
Sumatera Barat	290	5	8,299	132	0	3,773	74	0	2,269	25	0	584
Nanggroe Aceh Darussalam	238	1	6,515	113	0	2,963	63	0	1,782	9	0	456
Kalimantan Timur	229	0	6,454	105	0	2,935	61	0	1,765	10	0	452
Nusa Tenggara Timur	196	1	5,550	90	0	2,525	47	0	1,517	3	0	389
Bengkulu	177	7	3,020	82	2	1,374	47	2	826	9	0	219
Kalimantan Selatan	173	3	4,898	79	1	2,227	43	1	1,339	6	0	343
Sulawesi Tenggara	144	2	4,116	67	0	1,871	37	0	1,125	6	0	288
Kalimantan Tengah	139	1	3,947	67	0	1,795	35	0	1,078	3	0	275
Sulawesi Tengah	118	1	3,371	55	0	1,533	29	0	921	2	0	235
Maluku	98	1	2,740	47	0	1,246	25	0	749	2	0	191
Maluku Utara	93	2	2,608	45	0	1,186	24	0	713	3	0	183
Bangka Belitung	83	1	2,342	39	0	1,067	21	0	639	3	0	163
Gorontalo	71	1	1,998	34	0	910	18	0	547	2	0	139
Papua Barat	58	2	1,737	27	0	790	16	0	475	4	0	122
Sulawesi Barat	46	0	1,319	22	0	600	12	0	361	2	0	92
Papua	19	1	550	9	0	250	5	0	150	1	0	39
TOTAL	105,784	73,663	201,131	52,565	37,225	96,453	28,085	19,428	54,166	7,066	4,611	14,421

Sebaran estimasi jumlah Penasun pada kabupaten/kota didalam satu provinsi juga tidak merata, di mana sebagian besar terkonsentrasi hanya di sebagian wilayah Sumatera Utara, Jawa, Bali, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan saja seperti tergambar pada Gambar 10.

Delapan puluh persen estimasi jumlah populasi penasun dan pasangan seks tetapnya di Indonesia tersebar hanya di kota-kota besar di 6 provinsi saja yaitu DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Banten.

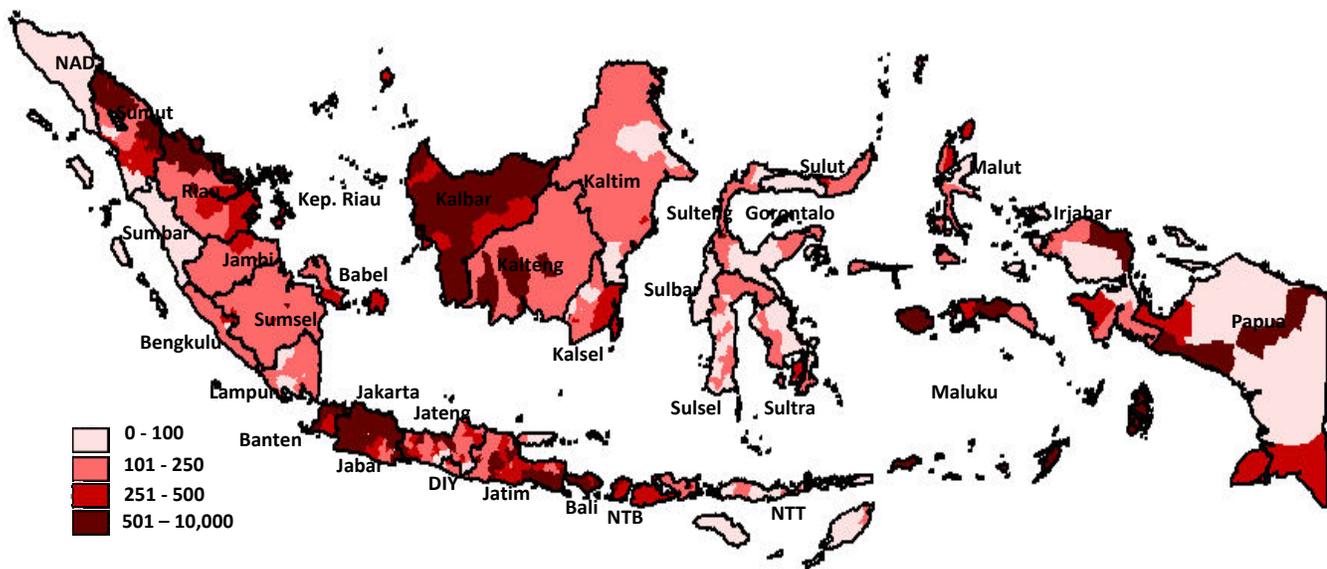
Gambar 10. Distribusi Estimasi Jumlah Penasun Menurut Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2009



4.1.2. Wanita Penaja Seks

Sebaran hasil estimasi jumlah WPS (langsung dan tak langsung) lebih merata dibandingkan dengan penasun. Delapan puluh persen WPS tersebar di 12 provinsi yaitu DKI Jakarta (17%), Jawa Barat (12%), Jawa Timur (9%), Jawa Tengah (8%), Sumatera Utara (6%), Kalimantan Barat (5%), Kepulauan Riau (5%), Bali (5%), Maluku (4%), Papua (3%), Riau (3%), dan Banten (2%).

Gambar 11. Distribusi Estimasi Jumlah WPS Menurut Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2009



Komposisi WPS langsung dan tidak langsung di setiap provinsi tidak selalu sama, di mana sebagian besar provinsi (21 dari 33 provinsi) memiliki estimasi jumlah WPS tak langsung lebih besar dari WPS langsung. Sehingga secara nasional jumlah estimasi WPS tak langsung (108,043) sedikit lebih tinggi dari WPS langsung (106,011). Walaupun demikian, jumlah estimasi ODHA WPS langsung (8,836) dua kali lebih banyak ODHA WPS tak langsung (4,270), karena prevalensi HIV pada WPS langsung lebih tinggi di semua wilayah yang memiliki data prevalensi kedua subpopulasi tersebut.

Tabel 12. Estimasi Jumlah Populasi dan ODHA WPS Langsung dan Tak Langsung Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2009

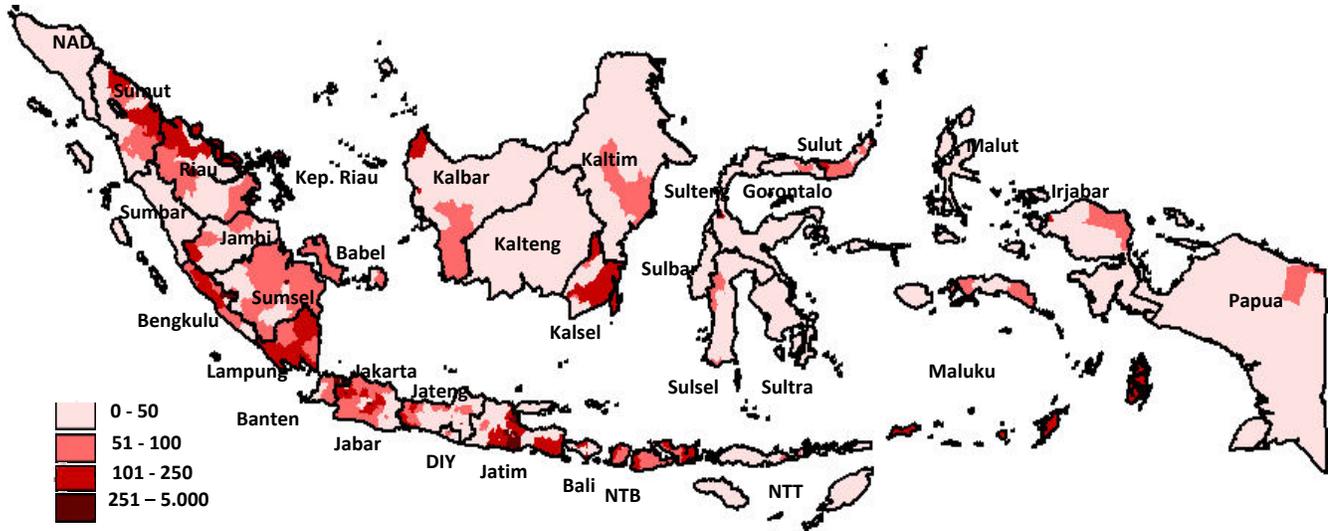
Provinsi	Wanita Penjaja Seks Langsung						Wanita Penjaja Seks Tak Langsung					
	Estimasi Jumlah			Estimasi ODHA			Estimasi Jumlah			Estimasi ODHA		
	Md	Rendah	Tinggi	Md	Rendah	Tinggi	Md	Rendah	Tinggi	Md	Rendah	Tinggi
DKI Jakarta	13,627	12,590	14,748	1,368	1,264	1,481	22,384	20,826	24,065	1,278	1,189	1,375
Jawa Barat	16,445	14,800	18,278	1,908	1,716	2,121	9,244	8,083	10,510	306	268	346
Jawa Timur	14,363	13,203	15,628	925	847	1,006	4,727	4,091	5,470	113	97	132
Jawa Tengah	10,548	9,612	11,582	695	633	763	6,997	5,719	8,330	112	90	135
Sumatera Utara	5,590	4,986	6,272	341	299	380	6,942	4,265	9,958	281	171	394
Kalimantan Barat	3,488	3,087	3,941	125	111	142	7,846	7,185	8,569	156	145	171
Kepulauan Riau	4,547	3,742	5,402	527	435	627	6,526	5,208	7,635	574	459	673
Bali	3,945	3,533	4,406	554	495	617	6,738	6,065	7,484	169	150	188
Maluku	4,107	3,467	4,866	265	224	314	3,519	2,945	4,204	145	122	175
Papua	3,038	2,404	3,778	437	345	542	3,219	2,687	3,858	109	91	131
Riau	4,776	4,264	5,353	308	274	346	1,406	908	1,856	55	35	73
Banten	1,741	1,329	2,280	150	116	197	2,509	2,029	3,105	211	171	260
Nusa Tenggara Barat	1,297	1,024	1,643	83	67	105	2,412	2,082	2,795	93	82	109
Kalimantan Tengah	1,659	1,333	2,063	44	34	54	1,914	1,112	2,692	29	16	42
Sumatera Selatan	919	683	1,210	37	29	47	2,625	2,200	3,130	19	18	19
Sulawesi Utara	1,493	454	2,204	45	13	65	1,979	823	2,759	69	30	100
Papua Barat	1,713	1,283	2,281	356	266	475	1,686	1,356	2,096	42	34	53
Sulawesi Selatan	1,560	1,208	1,909	135	108	168	1,692	1,237	2,244	73	58	101
Kalimantan Selatan	1,536	1,089	2,017	39	29	50	1,246	930	1,671	19	17	23
Kalimantan Timur	1,739	1,197	2,364	85	57	115	1,033	392	2,333	22	6	50
Jambi	746	565	963	39	29	51	2,001	1,609	2,484	46	37	61
Bengkulu	741	539	1,016	48	35	65	1,386	1,122	1,714	55	44	67
Bangka Belitung	761	519	1,118	54	36	78	1,286	958	1,727	74	55	99
Maluku Utara	320	80	738	22	5	47	1,639	1,259	2,133	64	49	83
Nusa Tenggara Timur	1,109	818	1,460	73	52	92	819	340	1,299	28	14	51
Sulawesi Tenggara	827	440	1,481	8	5	15	953	588	1,350	4	2	7
Sulawesi Tengah	1,089	841	1,414	71	51	88	682	483	959	25	19	37
Lampung	660	480	908	42	32	57	1,092	865	1,373	42	34	54
DI Yogyakarta	560	309	1,017	27	16	49	562	275	1,144	23	11	45
Nanggroe Aceh Darussalam	637	204	1,101	5	1	12	170	5	2,225	0	0	28
Sumatera Barat	177	47	300	5	3	27	479	26	958	21	0	36
Gorontalo	65	10	262	3	0	16	290	45	1,042	12	3	41
Sulawesi Barat	188	105	293	12	7	19	40	0	539	1	0	21
TOTAL	106,011	90,245	124,296	8,836	7,634	10,231	108,043	87,718	133,711	4,270	3,517	5,180

Dibandingkan hasil estimasi tahun 2006 (221,120), maka estimasi jumlah WPS tahun 2009 (214,054) secara umum 3 persen lebih rendah sebagai akibat dari lebih rendahnya estimasi jumlah WPS di 17 provinsi dengan 5 provinsi yang memiliki perbedaan terbesar adalah Kalimantan Timur dari 13,720 tahun 2006 menjadi 2,772 di tahun 2009, diikuti oleh Riau (15,580 menjadi 6,182), Kalimantan Tengah (8,050 menjadi 3,573), Jawa Barat (29,590 menjadi 25,689) dan Jawa Timur dari 22,510 menjadi 19,090. Walaupun demikian, estimasi jumlah WPS yang sudah terinfeksi HIV tahun 2009 (13,106) jauh lebih tinggi dibanding tahun 2006 (8,840).

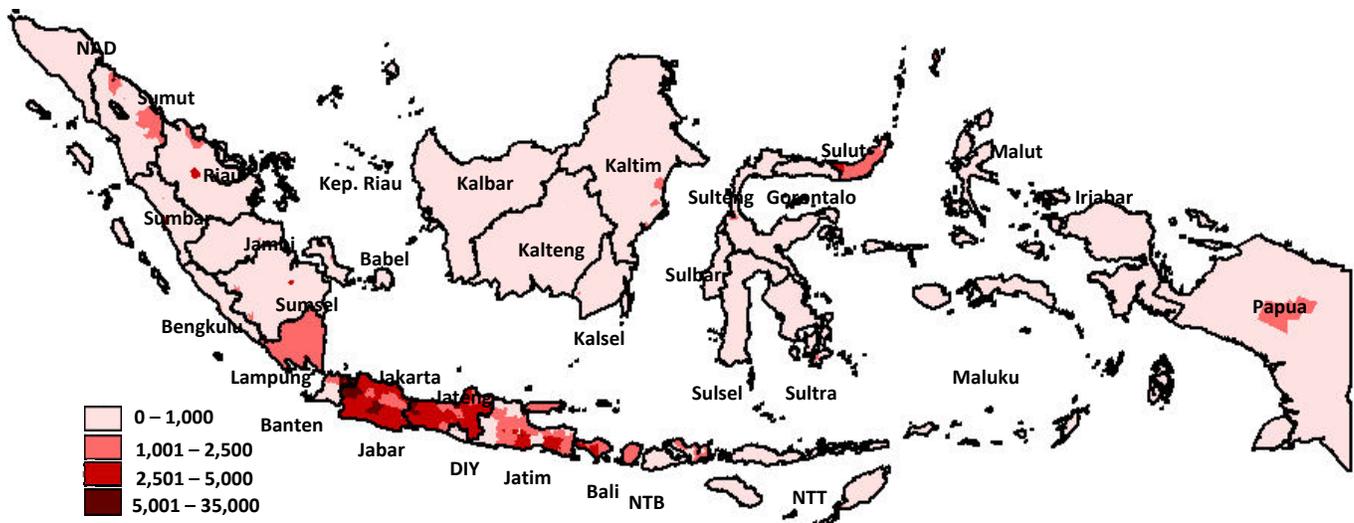
4.1.3. Waria dan LSL

Sebaran LSL hampir sama dengan penasun yang hanya terkonsentrasi di kota-kota besar di beberapa provinsi saja. Sekitar 70 persen LSL berada di 6 provinsi (Jawa Barat (21%), Jawa Tengah (17%), DKI Jakarta (14%), Jawa Timur (11%), Bali (4%) dan Sumatera Utara (3%)). Sedangkan sebaran hasil estimasi waria lebih merata dari LSL di mana 70 persen waria tersebar di 13 provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat, Bengkulu, Riau dan Kepulauan Riau.

Gambar 12. Distribusi Estimasi Jumlah Waria Menurut Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2009



Gambar 13. Distribusi Estimasi Jumlah LSL Menurut Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2009



Tabel 13. Estimasi Jumlah Populasi dan ODHA Waria dan LSL menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2009

Provinsi	Waria						Lelaki yang Suka Seks dengan Lelaki (LSL)					
	Estimasi Jumlah			Estimasi ODHA			Estimasi Jumlah			Estimasi ODHA		
	Md	Rendah	Tinggi	Md	Rendah	Tinggi	Md	Rendah	Tinggi	Md	Rendah	Tinggi
Jawa Timur	4,170	3,533	4,910	1,045	890	1,238	79,533	56,762	111,860	4,455	3,178	6,266
Jawa Barat	2,871	2,182	3,525	403	309	493	145,575	107,736	197,199	2,912	2,155	3,945
Jawa Tengah	2,107	1,650	2,603	379	298	469	115,968	79,992	168,339	2,319	1,602	3,368
DKI Jakarta	2,008	1,687	2,391	682	574	812	99,146	75,612	130,087	7,992	6,095	10,485
Sumatera Utara	1,622	1,253	2,048	292	226	371	20,156	10,501	38,775	404	212	773
Sumatera Selatan	1,540	952	1,983	82	50	106	11,700	3,875	35,363	233	79	708
Lampung	1,481	758	2,320	268	138	420	18,222	10,609	31,316	366	211	627
Kalimantan Selatan	1,440	1,087	1,912	261	197	345	6,550	2,173	19,753	133	45	394
Sulawesi Utara	1,395	1,007	1,779	251	179	324	18,252	9,104	36,656	364	181	732
Nusa Tenggara Barat	1,148	838	1,573	207	151	283	10,631	5,301	21,339	213	107	428
Bengkulu	1,130	585	1,709	205	105	308	4,780	1,550	14,732	96	34	294
Riau	1,085	876	1,343	195	157	243	7,714	3,657	16,327	155	72	328
Kepulauan Riau	990	683	1,314	178	123	238	10,261	4,936	21,526	206	99	431
Sulawesi Selatan	964	419	1,370	126	54	178	9,530	823	110,319	285	30	3,309
Bali	923	730	1,168	253	199	321	25,800	15,945	41,852	515	319	837
Maluku	904	637	1,282	162	114	231	2,083	229	18,960	42	2	380
Jambi	739	542	1,010	134	97	182	6,316	2,089	19,105	126	43	384
Banten	629	401	957	113	72	172	14,942	4,731	47,263	1,353	428	4,277
Nanggroe Aceh Darussalam	611	0	3,809	110	0	688	8,220	2,673	25,267	165	55	506
Bangka Belitung	584	234	1,011	106	41	183	3,641	1,189	11,182	74	26	223
Kalimantan Timur	521	227	807	95	40	145	9,668	3,157	29,837	194	63	597
Nusa Tenggara Timur	471	66	827	82	12	151	9,517	3,070	29,577	190	63	591
Kalimantan Barat	436	320	591	31	24	42	1,247	240	6,494	22	1	129
Sulawesi Tengah	294	165	526	55	31	95	5,226	1,730	15,799	105	35	317
Kalimantan Tengah	284	109	568	52	19	103	5,606	1,723	18,307	111	33	365
Papua	262	164	419	47	28	76	9,837	2,978	33,016	198	59	659
DI Yogyakarta	261	74	511	47	13	93	4,222	1,424	12,524	295	101	876
Sulawesi Tenggara	249	109	570	46	19	102	6,195	2,018	19,046	124	41	382
Maluku Utara	224	114	439	41	20	77	3,800	1,252	11,561	76	25	231
Papua Barat	210	120	366	39	21	65	3,351	974	12,133	67	19	242
Gorontalo	185	64	427	34	11	77	2,732	897	8,330	55	20	166
Sumatera Barat	180	3	4,253	30	0	766	12,746	4,175	38,951	256	84	777
Sulawesi Barat	147	0	914	27	0	165	1,859	604	5,732	37	13	115
TOTAL	32,065	21,589	51,235	6,078	4,212	9,562	695,026	423,729	1,358,527	24,138	15,530	44,142

Secara umum, estimasi jumlah waria tahun 2009 (32,065) lebih tinggi 15 persen dibanding hasil estimasi tahun 2006 (28,130), walaupun ada 14 provinsi dengan hasil estimasi jumlah waria tahun 2009 lebih rendah. Tercatat tiga provinsi memiliki perbedaan rerata estimasi jumlah waria tahun 2006 dan nilai tengah tahun 2009 lebih dari 1,000 yaitu Kalimantan Timur (-1,649), Riau (-1,465) dan Kalimantan Selatan (+1,200). Sedangkan estimasi jumlah ODHA waria secara nasional tahun 2009 (6,078) 61 persen lebih tinggi dari tahun 2006 (3,790).

Estimasi jumlah LSL tahun 2009 (695,026) lebih rendah 9 persen dibanding hasil estimasi tahun 2006 (766,450) walaupun ada 14 provinsi dengan hasil estimasi jumlah LSL tahun 2009 lebih tinggi. Lima provinsi dengan perbedaan angka hasil estimasi 2006 dan

2009 lebih dari 20,000 adalah DKI Jakarta (+53,516), Jawa Timur (-52,477), Jawa Barat (-24,635), Banten (-22,988) dan Sumatera Utara (-21,434). Sedangkan estimasi jumlah LSL yang sudah terinfeksi HIV tahun 2009 (44,142) hampir 5 kali lebih tinggi dari hasil tahun 2006 (9,160).

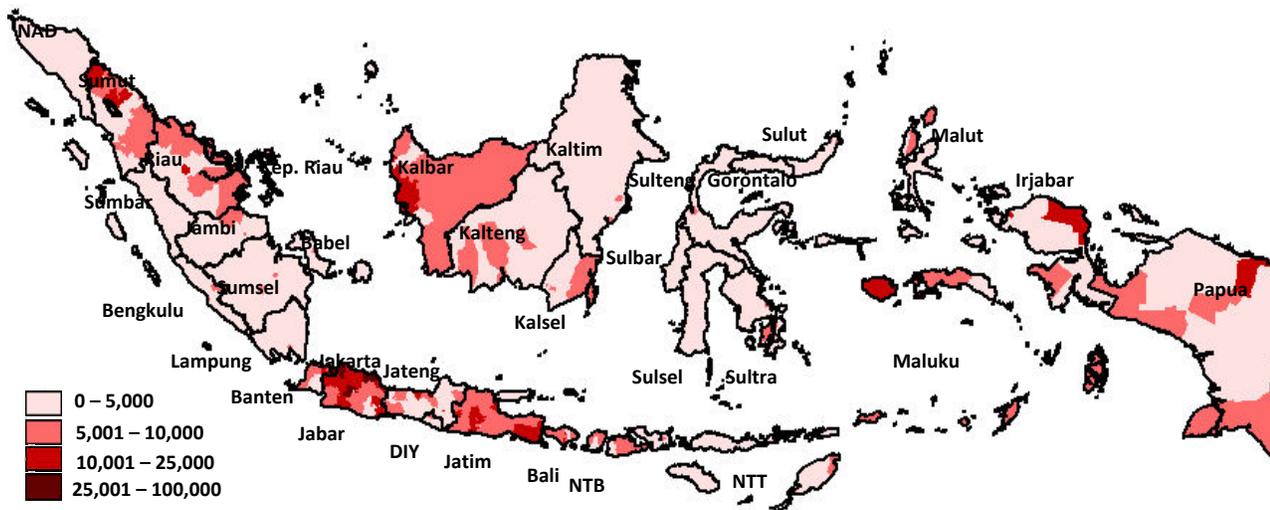
4.1.4. Pelanggan WPS dan Pasangan Seks Tetap Pelanggan

Sebaran hasil estimasi jumlah pelanggan penjaja seks dan pasangannya mengikuti sebaran estimasi jumlah WPS dan waria karena dasar penghitungannya menggunakan hasil estimasi subpopulasi penjaja seks tersebut dan tidak didasari sama sekali dengan hasil pemetaan.

Secara umum estimasi jumlah pelanggan tahun 2009 (3,241,244) sedikit lebih rendah dibanding hasil estimasi tahun 2006 (3,245,050). Lima provinsi dengan perbedaan angka hasil estimasi 2006 dan 2009 terbesar adalah Kalimantan Barat (+103,582), Riau (103,312), Kalimantan Timur (97,591), Maluku (+85,848), dan Sulawesi Selatan (85,080). Sedangkan estimasi pelanggan penjaja seks yang sudah terinfeksi HIV tahun 2009 berkisar antara 31,5 – 46,1 ribu dengan nilai tengah 39,207 atau hampir 30 persen lebih tinggi dari estimasi tahun 2006 (30,550).

Estimasi jumlah pasangan pelanggan penjaja seks tahun 2009 (1,938,650) lebih tinggi 7 persen dari tahun 2006 (1,833,660). Sedangkan estimasi jumlah ODHA dari subpopulasi ini di tahun 2009 (11,442) jauh lebih tinggi dari hasil estimasi tahun 2006 (5,200).

Gambar 14. Distribusi Estimasi Jumlah Pelanggan Penjaja Seks menurut Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2009



Tabel 14. Estimasi Jumlah Populasi dan ODHA Pelanggan Penjaja Seks dan Pasangannya menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2009

Provinsi	Pelanggan Penjaja Seks						Pasangan Seks Tetap Pelanggan PS					
	Estimasi Jumlah			Estimasi ODHA			Estimasi Jumlah			Estimasi ODHA		
	Md	Rendah	Tinggi	Md	Rendah	Tinggi	Md	Rendah	Tinggi	Md	Rendah	Tinggi
DKI Jakarta	460,310	424,683	495,934	9,910	9,040	10,774	295,259	272,653	317,862	3,141	2,897	3,380
Jawa Barat	439,504	390,562	488,406	6,330	5,582	7,042	310,375	276,308	344,412	2,197	1,951	2,416
Jawa Timur	360,087	326,742	393,378	4,010	3,540	4,429	303,382	275,797	330,922	1,578	1,420	1,696
Jawa Tengah	291,898	258,689	325,046	2,268	1,871	2,604	130,281	115,667	144,863	491	421	523
Sumatera Utara	184,960	146,023	223,846	1,299	952	1,607	105,205	83,110	127,265	355	275	398
Kalimantan Barat	143,222	127,879	158,547	545	446	625	77,312	69,120	85,489	144	117	153
Bali	139,505	124,244	154,753	3,425	3,024	3,812	60,827	54,266	67,381	745	658	821
Maluku	122,198	101,110	143,269	563	403	708	65,351	54,240	76,449	135	108	153
Riau	117,978	101,729	134,210	1,506	1,289	1,707	62,897	54,320	71,464	410	349	459
Kepulauan Riau	106,763	86,931	126,579	1,300	1,015	1,574	57,219	46,693	67,742	340	274	400
Papua	95,867	75,671	116,053	1,739	1,342	2,125	58,198	46,015	70,371	527	409	635
Banten	62,007	46,633	77,374	289	174	394	32,955	24,901	41,002	65	46	79
Papua Barat	53,774	39,567	67,969	1,185	848	1,515	37,305	27,532	47,073	411	299	518
Kalimantan Tengah	53,446	38,438	68,429	593	414	749	28,668	20,760	36,562	156	112	187
Nusa Tenggara Barat	51,767	41,332	62,184	275	144	394	26,826	21,550	32,091	54	37	59
Kalimantan Timur	51,049	29,671	72,405	256	125	367	27,175	15,872	38,466	60	31	74
Sulawesi Selatan	50,180	37,394	62,916	288	157	385	26,895	20,314	33,451	58	33	62
Kalimantan Selatan	47,543	33,553	61,514	302	129	449	24,216	17,060	31,362	51	31	61
Sulawesi Utara	46,605	18,741	74,445	275	62	469	23,823	9,098	38,532	61	17	81
Sumatera Selatan	45,807	35,166	56,430	333	162	477	23,312	18,082	28,524	63	48	69
Jambi	35,290	26,832	43,731	339	202	454	18,341	13,993	22,674	79	53	91
Nusa Tenggara Timur	32,460	20,708	44,175	193	87	263	17,152	11,178	23,111	36	22	42
Sulawesi Tengah	31,179	22,606	39,731	165	96	220	16,943	12,379	21,496	36	27	41
Bengkulu	31,031	22,260	39,789	226	88	346	15,627	11,464	19,781	39	25	43
Bangka Belitung	30,249	19,758	40,729	167	68	258	15,763	10,480	21,039	33	19	40
Sulawesi Tenggara	29,625	14,685	44,546	158	57	240	15,731	7,862	23,587	32	12	43
Lampung	27,485	19,165	35,791	204	51	343	13,279	9,598	16,950	18	9	19
Nanggroe Aceh Darussalam	27,293	4,459	50,075	301	14	538	12,778	2,421	23,112	21	5	23
Maluku Utara	23,665	12,540	34,775	102	32	163	12,558	6,687	18,420	24	11	33
DI Yogyakarta	20,908	9,151	32,655	223	86	350	11,043	4,890	17,190	54	23	80
Sumatera Barat	12,109	1,243	22,949	279	3	516	4,297	672	7,904	3	1	4
Gorontalo	8,000	721	15,273	81	6	147	4,084	323	7,838	16	0	26
Sulawesi Barat	7,480	2,275	12,683	78	10	142	3,573	1,236	5,907	9	4	9
TOTAL	3,241,244	2,661,161	3,820,589	39,207	31,519	46,186	1,938,650	1,616,541	2,260,292	11,442	9,744	12,718

4.1.5. Warga Binaan Pemasyarakatan

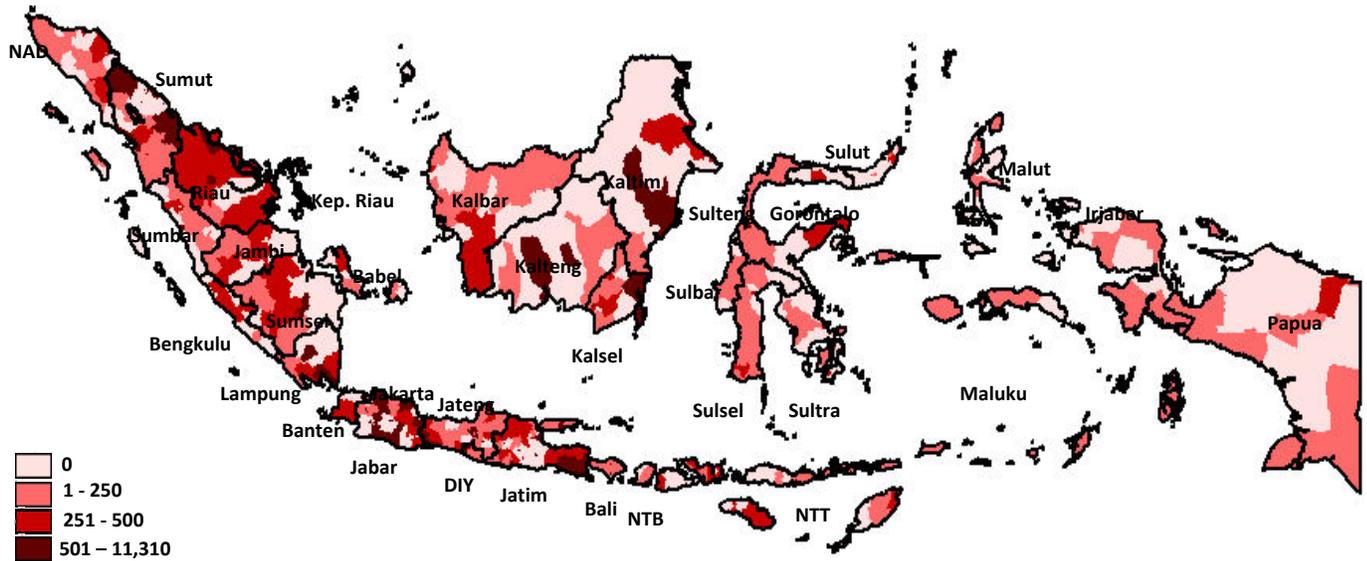
Estimasi jumlah WBP didasar laporan jumlah WBP di setiap Lapas dan Rutan pada waktu data estimasi dikumpulkan dan distribusi hasilnya tergambar pada tabel dan gambar berikut ini.

Secara umum estimasi jumlah WBP tahun 2009 (140,559) jauh lebih tinggi dari hasil estimasi tahun 2006 (96,310). Walaupun demikian estimasi jumlah WBP yang terinfeksi HIV tahun 2009 (5,106) sedikit lebih rendah dari tahun 2006 (5,230).

Tabel 15. Estimasi Jumlah Populasi dan ODHA Warga Binaan Pemasyarakatan Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2009

Provinsi	Warga Binaan Pemasyarakatan					
	Estimasi Jumlah			Estimasi ODHA		
	Md	Rendah	Tinggi	Md	Rendah	Tinggi
Jawa Timur	17,625	17,625	17,625	474	314	634
Jawa Barat	16,751	16,751	16,751	919	613	1,224
Sumatera Utara	15,414	15,414	15,414	466	249	682
DKI Jakarta	12,007	12,007	12,007	1,604	1,069	2,138
Jawa Tengah	9,819	9,819	9,819	239	158	320
Banten	8,660	8,660	8,660	508	339	676
Sumatera Selatan	6,311	6,311	6,311	98	53	142
Riau	5,147	5,147	5,147	130	70	189
Lampung	4,803	4,803	4,803	69	37	101
Kalimantan Timur	4,402	4,402	4,402	93	49	136
Sulawesi Selatan	4,295	4,295	4,295	42	23	60
Kalimantan Selatan	3,201	3,201	3,201	56	30	82
Nusa Tenggara Timur	3,130	3,130	3,130	0	0	0
Nanggroe Aceh Darussalam	2,537	2,537	2,537	76	40	112
Kalimantan Barat	2,536	2,536	2,536	40	21	59
Kepulauan Riau	2,446	2,446	2,446	56	29	82
Sumatera Barat	2,421	2,421	2,421	45	24	65
Jambi	2,312	2,312	2,312	18	9	26
Kalimantan Tengah	1,890	1,890	1,890	19	10	28
Sulawesi Tengah	1,759	1,759	1,759	5	2	8
Bali	1,618	1,618	1,618	39	27	51
Nusa Tenggara Barat	1,582	1,582	1,582	12	6	18
Sulawesi Utara	1,534	1,534	1,534	2	1	2
DI Yogyakarta	1,451	1,451	1,451	54	35	72
Bengkulu	1,340	1,340	1,340	10	5	15
Sulawesi Tenggara	1,332	1,332	1,332	3	2	3
Bangka Belitung	984	984	984	21	11	31
Papua	936	936	936	4	2	5
Maluku	661	661	661	6	3	8
Maluku Utara	441	441	441	3	1	4
Sulawesi Barat	437	437	437	1	0	2
Gorontalo	427	427	427	2	1	3
Papua Barat	350	350	350	0	0	0
TOTAL	140,559	140,559	140,559	5,106	3,233	6,978

Gambar 15. Distribusi Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan menurut Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2009



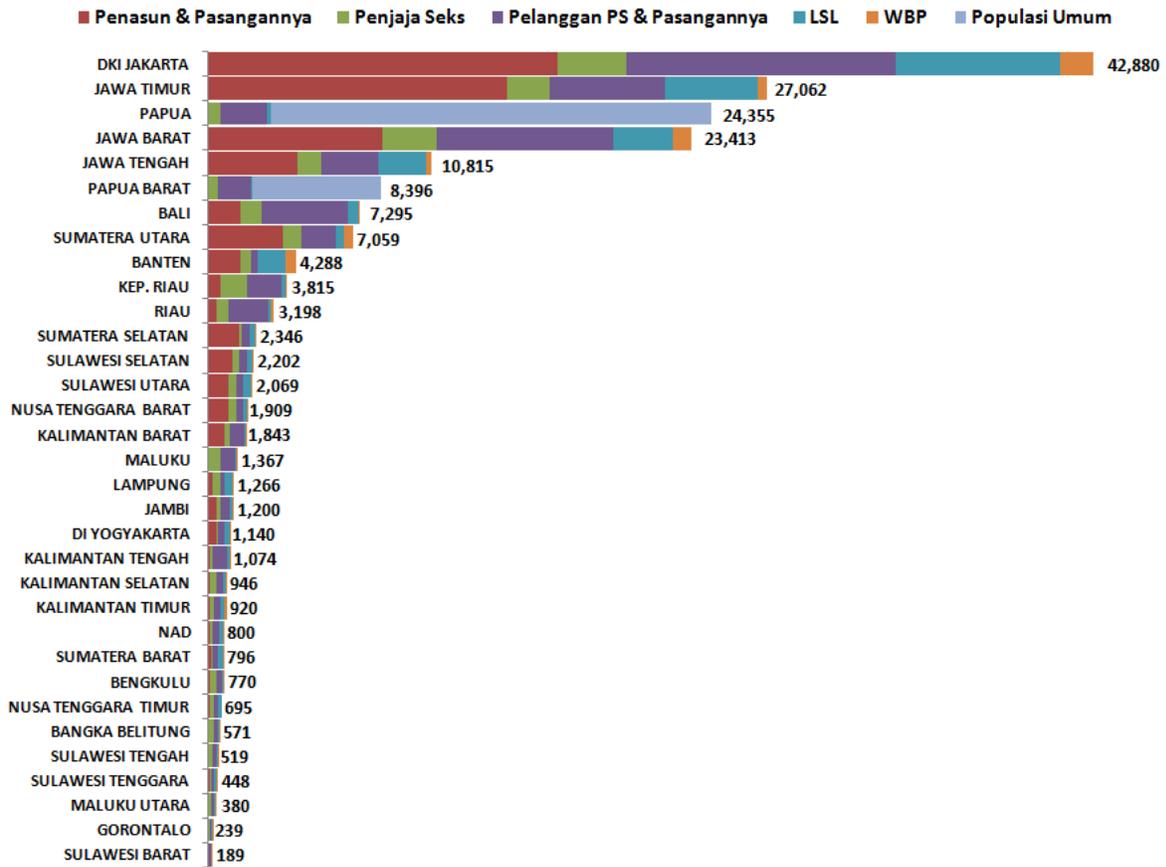
4.2. Distribusi ODHA menurut Provinsi dan Subpopulasi

Penghitungan estimasi jumlah ODHA dari populasi yang diestimasi secara umum dilakukan dengan mengalikan hasil estimasi jumlah populasi dengan estimasi prevalensi HIV pada populasi tersebut disetiap kabupaten/kota. Penghitungan estimasi ODHA di Tanah Papua (provinsi Papua dan Papua Barat) sedikit berbeda dengan provinsi lainnya mengingat epidemi HIV di Tanah Papua yang juga berbeda dan adanya hasil STBP pada populasi umum. Khusus untuk Tanah Papua Kelompok Kerja Estimasi juga menghitung ODHA dari populasi umum yang secara umum bukan termasuk dalam populasi paling berisiko tertular dan menularkan HIV.

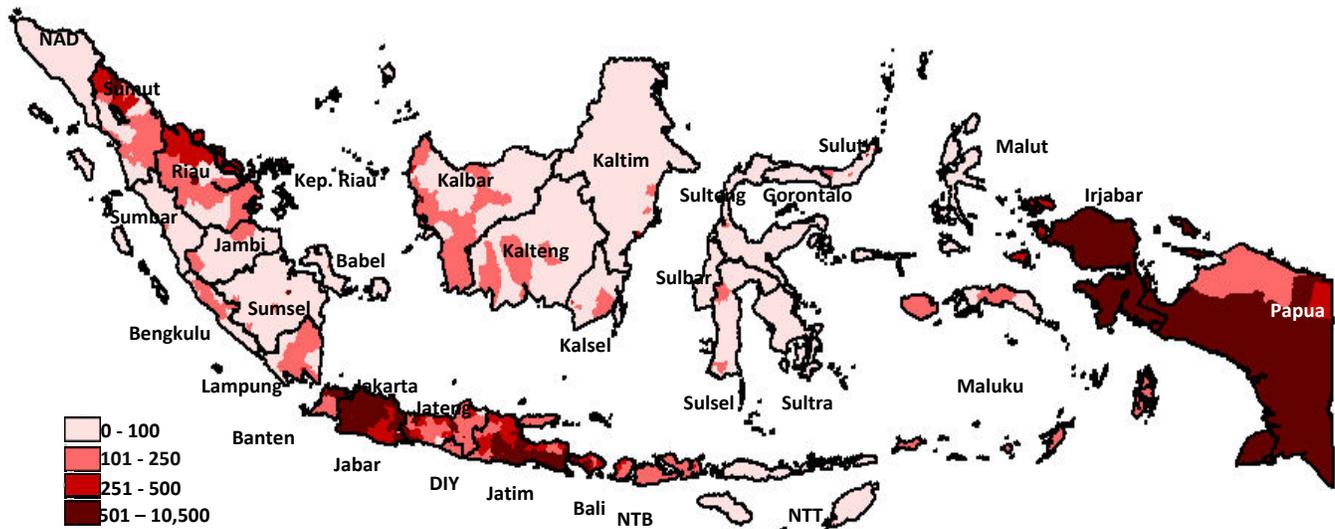
Provinsi dengan estimasi jumlah ODHA usia 15-49 tahun dari populasi rawan tertular HIV tertinggi adalah DKI Jakarta dengan kisaran antara 37 – 49 ribu orang dan nilai tengah 42 ribu, sedangkan provinsi dengan estimasi terendah adalah Sulawesi Barat (34 – 1,165 orang). Sebaran hasil estimasi jumlah ODHA juga terlihat sangat tidak merata, dimana lebih dari 80% terkonsentrasi hanya di 8 provinsi saja yaitu DKI Jakarta (23%), Jawa Timur (15%), Papua (13%), Jawa Barat (13%), Jawa Tengah (6%), Papua Barat (5%), Bali (4%) dan Sumatera Utara (4%).

Secara umum nilai tengah estimasi ODHA usia 15-49 tahun di tahun 2009 (186,257) 4 persen lebih rendah dari rerata hasil estimasi ODHA tahun 2006 (193,070). Ada 24 provinsi dengan hasil estimasi ODHA tahun 2009 lebih rendah dari tahun 2006.

Gambar 16. Distribusi Estimasi Jumlah ODHA Menurut Subpopulasi dan Provinsi di Indonesia Tahun 2009



Gambar 17. Distribusi Estimasi Jumlah ODHA 15-49 Tahun dari Populasi yang di Estimasi Menurut Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2009



4.3. Hasil Estimasi Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota

Provinsi dan Kabupaten/Kota	Penasun	Pasangan Penasun	WPS L	WPS TL	Waria	LSL	Pelanggan WPS	Pelanggan Waria	Pasangan Pelanggan	WBP	ODHA
NANGGROE ACEH DARUSSALAM	238	63	637	170	611	8,220	23,523	3,770	12,778	2,537	800
Kab. Simeulue	8	2	11	5	21	353	484	133	263	41	27
Kab. Aceh Singkil	8	2	12	6	24	254	569	149	309	0	24
Kab. Aceh Selatan	8	2	50	5	19	435	1,500	115	815	116	35
Kab. Aceh Tenggara	8	2	50	14	32	478	2,008	201	1,091	256	42
Kab. Aceh Timur	10	3	5	7	29	303	460	180	250	401	41
Kab. Aceh Tengah	8	2	13	6	26	268	588	160	320	172	28
Kab. Aceh Barat	8	2	32	14	33	452	1,575	202	856	88	40
Kab. Aceh Besar	9	2	28	7	30	277	918	183	498	221	39
Kab. Pidie	9	2	29	7	31	288	926	190	502	171	37
Kab. Bireuen	9	2	29	7	31	285	922	189	500	103	39
Kab. Aceh Utara	10	3	13	6	29	473	546	182	297	0	33
Kab. Aceh Barat Daya	8	2	11	5	22	367	484	137	263	0	25
Kab. Gayo Lues	8	2	12	6	24	248	569	146	309	98	28
Kab. Aceh Tamiang	10	3	50	14	35	506	2,025	214	1,100	0	44
Kab. Nagan Raya	8	2	5	5	17	400	344	107	187	0	23
Kab. Aceh Jaya	8	2	4	5	17	389	344	104	187	14	24
Kab. Bener Meriah	8	2	11	5	22	362	484	136	263	0	25
Kab. Pidie Jaya	9	2	11	5	22	377	488	139	265	0	26
Kota Banda Aceh	24	7	104	7	30	311	2,972	184	1,615	310	48
Kota Sabang	25	7	39	7	32	398	1,113	195	604	40	45
Kota Langsa	13	4	41	7	27	261	1,324	166	719	201	42
Kota Lhokseumawe	13	4	51	14	33	503	2,041	207	1,109	305	62
Kota Subulussalam	9	2	26	6	25	232	839	151	456	0	27
SUMATERA UTARA	5,705	1,552	5,590	6,942	1,622	20,156	181,716	3,244	105,205	15,414	7,059
Kab. Nias	14	4	25	75	12	484	1,183	16	684	193	37
Kab. Mandailing Natal	24	7	30	68	25	309	1,241	50	719	233	51
Kab. Tapanuli Selatan	42	11	50	150	25	277	2,389	50	1,383	20	67
Kab. Tapanuli Tengah	48	13	95	188	50	426	3,690	100	2,137	566	111
Kab. Tapanuli Utara	30	8	60	128	40	278	2,406	81	1,394	305	75
Kab. Toba Samosir	156	42	116	116	124	372	3,518	250	2,037	207	183

Provinsi dan Kabupaten/Kota	Penasun	Pasangan Penasun	WPS L	WPS TL	Waria	LSL	Pelanggan WPS	Pelanggan Waria	Pasangan Pelanggan	WBP	ODHA
Kab. Labuhan Batu	16	4	158	168	78	338	4,867	157	2,818	760	111
Kab. Asahan	30	8	75	128	45	420	2,729	91	1,581	0	71
Kab. Simalungun	180	49	998	513	64	394	26,018	130	15,063	0	451
Kab. Dairi	20	5	25	90	15	276	1,319	31	764	162	41
Kab. Karo	70	19	150	375	35	291	6,506	71	3,767	218	142
Kab. Deli Serdang	1,136	309	361	225	203	1,488	9,749	409	5,644	1,854	989
Kab. Langkat	264	72	836	315	49	529	20,748	98	12,011	759	449
Kab. Nias Selatan	12	3	15	75	8	390	978	16	566	0	30
Kab. Humbang Hasundutan	24	7	35	75	35	355	1,408	71	815	0	48
Kab. Pakpak Bharat	10	3	25	45	12	370	922	25	534	0	29
Kab. Samosir	48	13	55	143	25	263	2,432	51	1,408	78	73
Kab. Serdang Bedagai	44	12	397	281	158	363	11,019	318	6,379	0	205
Kab. Batu Bara	30	8	50	150	35	321	2,388	71	1,382	555	73
Kab. Padang Lawas Utara	10	3	25	75	10	364	1,182	21	684	127	31
Kab. Padang Lawas	46	13	36	140	29	356	2,028	37	1,175	36	68
Kab. Labuhan Batu Selatan	0	0	75	53	12	436	2,080	24	1,205	0	38
Kab. Labuhan Batu Utara	0	0	24	53	16	457	984	32	570	0	24
Kota Sibolga	30	8	100	150	25	646	3,474	51	2,011	0	80
Kota Tanjung Balai	30	8	586	486	158	675	16,899	319	9,783	711	279
Kota Pematang Siantar	561	153	160	116	99	1,188	4,474	199	2,590	531	479
Kota Tebing Tinggi	30	8	80	150	25	666	3,044	51	1,762	654	97
Kota Medan	2,730	743	823	2,042	150	6,348	36,061	302	20,876	5,916	2,535
Kota Binjai	50	14	75	300	30	724	4,239	61	2,455	1,188	142
Kota Padangsidempuan	20	5	50	75	30	352	1,741	61	1,008	341	55
SUMATERA BARAT	290	74	177	479	180	12,746	7,903	4,206	4,297	2,421	796
Kab. Kepulauan Mentawai	8	2	4	17	6	384	230	140	125	0	24
Kab. Pesisir Selatan	9	2	5	20	8	487	266	188	145	0	30
Kab. Solok	9	2	5	20	7	459	272	168	148	121	30
Kab. Sawahlunto/Sijunjung	9	2	5	23	7	420	335	153	182	221	29
Kab. Tanah Datar	9	2	5	18	7	450	239	164	130	63	28
Kab. Padang Pariaman	9	2	5	22	8	693	272	190	148	0	34
Kab. Agam	9	2	5	19	8	472	258	177	140	297	36
Kab. Lima Puluh Kota	9	2	5	18	10	294	239	237	130	110	30

Provinsi dan Kabupaten/Kota	Penasun	Pasangan Penasun	WPS L	WPS TL	Waria	LSL	Pelanggan WPS	Pelanggan Waria	Pasangan Pelanggan	WBP	ODHA
Kab. Pasaman	9	2	5	18	7	431	239	157	130	194	28
Kab. Solok Selatan	8	2	5	17	6	400	234	145	127	20	24
Kab. Dharmas Raya	9	2	5	25	10	381	293	233	159	0	31
Kab. Pasaman Barat	9	2	5	18	7	455	239	166	130	0	27
Kota Padang	42	11	80	82	31	2,548	2,682	725	1,458	694	155
Kota Solok	28	8	7	35	12	827	424	288	231	177	56
Kota Sawah Lunto	13	4	5	25	6	506	308	148	167	38	31
Kota Padang Panjang	30	8	7	26	10	700	349	231	190	65	50
Kota Bukittinggi	31	8	7	37	10	1,471	441	241	240	0	64
Kota Payakumbuh	28	8	7	20	13	789	298	299	163	177	56
Kota Pariaman	12	3	5	19	7	579	285	156	154	244	37
RIAU	840	232	4,776	1,406	1,085	7,714	115,785	2,193	62,897	5,147	3,198
Kab. Kuantan Singingi	35	10	90	68	45	431	2,365	91	1,285	101	87
Kab. Indragiri Hulu	39	11	89	69	47	450	2,337	96	1,269	262	94
Kab. Indragiri Hilir	44	12	186	79	63	537	4,751	127	2,580	383	146
Kab. Pelalawan	39	11	231	72	30	386	5,679	60	3,085	0	147
Kab. Siak	39	11	85	77	30	438	2,546	61	1,384	393	95
Kab. Kampar	43	12	90	74	86	349	2,373	174	1,289	447	105
Kab. Rokan Hulu	39	11	91	77	86	467	2,680	175	1,457	327	108
Kab. Bengkalis	50	14	670	89	142	367	15,390	287	8,360	483	375
Kab. Rokan Hilir	82	22	718	103	122	319	16,566	247	8,999	456	396
Kota Pekanbaru	300	82	1,862	564	400	2,928	45,450	806	24,689	1,715	1,235
Kota Dumai	130	36	664	134	34	1,042	15,648	69	8,500	580	412
JAMBI	803	221	746	2,001	739	6,316	33,754	1,536	18,341	2,312	1,200
Kab. Kerinci	4	1	19	92	80	266	1,072	166	582	0	37
Kab. Merangin	32	9	19	129	46	409	1,543	96	839	257	55
Kab. Sarolangun	36	10	26	120	37	436	1,619	77	880	0	56
Kab. Batang Hari	46	13	12	99	28	459	1,109	58	604	268	52
Kab. Muaro Jambi	38	10	10	124	15	468	1,291	32	702	0	44
Kab. Tanjung Jabung Timur	10	3	16	122	15	491	1,404	32	762	0	35
Kab. Tanjung Jabung Barat	10	3	157	131	70	288	4,647	146	2,525	265	116
Kab. Tebo	42	11	28	94	31	441	1,440	65	783	188	58
Kab. Bungo	54	15	31	95	64	300	1,518	133	825	246	76

Provinsi dan Kabupaten/Kota	Penasun	Pasangan Penasun	WPS L	WPS TL	Waria	LSL	Pelanggan WPS	Pelanggan Waria	Pasangan Pelanggan	WBP	ODHA
Kota Jambi	525	144	400	900	268	2,109	16,667	553	9,054	972	614
Kota Sungai Penuh	6	2	28	95	85	649	1,444	178	785	116	58
SUMATERA SELATAN	2,853	779	919	2,625	1,540	11,700	42,904	2,903	23,312	6,311	2,346
Kab. Ogan Komering Ulu	42	11	45	122	49	444	2,046	64	1,111	250	59
Kab. Ogan Komering Ilir	20	5	33	157	76	396	2,084	156	1,132	0	43
Kab. Muara Enim	99	27	20	125	62	578	1,511	80	822	371	84
Kab. Lahat	45	12	17	120	81	295	1,275	166	693	348	53
Kab. Musi Rawas	35	9	11	148	10	534	1,514	21	823	104	48
Kab. Musi Banyuasin	68	18	18	152	56	519	1,699	116	924	397	70
Kab. Banyu Asin	65	18	2	128	88	574	1,130	180	614	0	62
Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	24	7	18	106	48	460	1,305	62	709	142	41
Kab. Ogan Komering Ulu Timur	26	7	19	124	58	551	1,496	119	814	223	45
Kab. Ogan Ilir	18	5	18	117	41	501	1,397	84	759	800	45
Kab. Empat Lawang	15	4	17	103	44	421	1,272	58	691	0	31
Kota Palembang	2,100	574	362	722	706	3,769	14,271	1,433	7,752	2,542	1,423
Kota Prabumulih	84	23	182	175	100	409	5,575	204	3,029	362	116
Kota Pagar Alam	110	30	25	137	60	1,100	1,743	79	947	101	101
Kota Lubuklinggau	105	29	132	189	61	1,149	4,586	81	2,492	671	128
BENGKULU	177	47	741	1,386	1,130	4,780	28,765	2,266	15,627	1,340	770
Kab. Bengkulu Selatan	24	7	58	120	98	416	2,352	149	1,278	179	71
Kab. Rejang Lebong	41	11	150	250	412	590	5,559	885	3,020	391	198
Kab. Bengkulu Utara	33	9	50	100	104	430	1,989	226	1,080	277	75
Kab. Kaur	8	2	35	70	75	262	1,392	161	757	0	44
Kab. Seluma	8	2	30	73	10	379	1,314	22	714	0	28
Kab. Mukomuko	8	2	45	80	94	408	1,718	144	934	0	54
Kab. Lebong	8	2	33	80	100	247	1,437	215	781	0	49
Kab. Kepahiang	8	2	80	180	23	409	3,366	22	1,828	0	49
Kab. Bengkulu Tengah	8	2	10	71	23	386	842	24	457	0	27
Kota Bengkulu	31	8	250	362	192	1,253	8,796	418	4,778	493	177
LAMPUNG	493	135	660	1,092	1,481	18,222	24,440	3,045	13,279	4,803	1,266
Kab. Lampung Barat	25	7	85	66	137	1,230	2,491	279	1,354	136	90

Provinsi dan Kabupaten/Kota	Penasun	Pasangan Penasun	WPS L	WPS TL	Waria	LSL	Pelanggan WPS	Pelanggan Waria	Pasangan Pelanggan	WBP	ODHA
Kab. Tanggamus	29	8	26	73	231	1,489	1,222	468	665	402	115
Kab. Lampung Selatan	30	8	47	75	123	1,131	1,716	249	932	518	86
Kab. Lampung Timur	31	8	34	92	64	1,069	1,563	130	850	299	67
Kab. Lampung Tengah	36	10	77	158	210	1,288	3,116	458	1,692	0	131
Kab. Lampung Utara	66	18	31	76	93	1,242	1,371	184	745	859	106
Kab. Way Kanan	24	7	36	60	57	1,194	1,336	113	726	0	62
Kab. Tulangbawang	30	8	73	88	155	1,052	2,418	334	1,314	0	102
Kab. Pesawaran	24	7	14	61	35	1,228	850	66	462	0	53
Kota Bandar Lampung	117	32	225	283	321	5,919	7,554	649	4,103	2,003	360
Kota Metro	81	22	12	60	56	1,380	803	115	436	586	95
BANGKA BELITUNG	83	21	761	1,286	584	3,641	29,016	1,233	15,763	984	571
Kab. Bangka	10	3	100	98	100	277	3,190	228	1,733	359	76
Kab. Belitung	8	2	33	300	50	381	3,395	114	1,845	131	60
Kab. Bangka Barat	9	2	100	159	53	425	3,724	121	2,023	70	64
Kab. Bangka Tengah	9	2	50	87	55	444	1,931	95	1,049	0	48
Kab. Bangka Selatan	8	2	50	108	55	406	2,116	96	1,150	0	49
Kab. Belitung Timur	8	2	28	361	71	395	3,829	124	2,080	0	68
Kota Pangkal Pinang	31	8	400	173	200	1,313	10,831	455	5,883	424	207
KEPULAUAN RIAU	1,226	335	4,547	6,526	990	10,261	105,343	1,420	57,219	2,446	3,815
Kab. Karimun	29	8	706	611	162	703	14,411	240	7,828	501	429
Kab. Bintan	23	6	970	525	156	815	18,111	231	9,838	34	509
Kab. Natuna	18	5	78	173	30	691	1,747	30	948	0	81
Kab. Lingga	18	5	78	173	28	687	1,747	28	948	0	81
Kab. Kepulauan Anambas	18	5	78	173	30	507	1,747	29	948	0	77
Kota Batam	908	248	2,418	2,623	215	5,528	52,052	316	28,274	1,159	1,977
Kota Tanjung Pinang	212	58	219	2,248	369	1,330	15,528	546	8,435	752	662
DKI JAKARTA	27,852	6,715	13,627	22,384	2,008	99,146	456,280	4,030	295,259	12,007	42,880
Kab. Kepulauan Seribu	20	5	16	0	0	100	336	0	217	0	33
Kota Jakarta Selatan	4,364	1,052	2,444	4,015	459	16,448	81,872	918	52,980	58	6,956
Kota Jakarta Timur	4,865	1,173	2,982	2,982	519	32,316	86,101	1,043	55,716	11,308	10,327
Kota Jakarta Pusat	7,023	1,693	2,449	2,991	209	15,083	74,652	421	48,308	641	8,220
Kota Jakarta Barat	6,782	1,635	1,884	6,618	452	14,998	88,236	904	57,097	0	8,370

Provinsi dan Kabupaten/Kota	Penasun	Pasangan Penasun	WPS L	WPS TL	Waria	LSL	Pelanggan WPS	Pelanggan Waria	Pasangan Pelanggan	WBP	ODHA
Kota Jakarta Utara	4,798	1,157	3,852	5,778	369	20,201	125,083	744	80,941	0	8,974
JAWA BARAT	17,551	3,790	16,445	9,244	2,871	145,575	433,897	5,607	310,375	16,751	23,413
Kab. Bogor	683	147	635	714	190	10,611	19,802	381	14,165	41	1,018
Kab. Sukabumi	681	147	303	640	76	4,415	11,995	152	8,580	0	661
Kab. Cianjur	95	20	621	327	59	4,278	16,171	118	11,567	795	554
Kab. Bandung	207	45	540	90	225	6,668	12,426	450	8,888	0	611
Kab. Garut	62	13	200	298	75	4,623	6,845	90	4,897	696	290
Kab. Tasikmalaya	303	65	111	65	42	3,164	2,935	85	2,100	0	292
Kab. Ciamis	224	48	970	356	23	2,806	23,980	46	17,154	332	783
Kab. Kuningan	1,043	225	527	105	34	2,130	12,277	42	8,782	617	904
Kab. Cirebon	582	126	556	392	30	4,270	15,325	61	10,962	0	738
Kab. Majalengka	408	88	362	168	37	2,346	9,247	45	6,615	332	490
Kab. Sumedang	675	146	291	232	154	1,924	8,250	308	5,902	456	590
Kab. Indramayu	35	7	1,973	290	83	3,980	45,114	167	32,271	525	1,321
Kab. Subang	741	160	510	454	95	2,742	14,863	192	10,631	187	786
Kab. Purwakarta	375	81	1,259	548	113	1,735	31,872	228	22,798	531	1,047
Kab. Karawang	624	135	660	401	70	3,966	17,642	140	12,620	829	855
Kab. Bekasi	231	50	1,725	380	100	3,508	40,491	200	28,963	1,918	1,382
Kab. Bandung Barat	95	20	1,830	301	48	2,733	42,244	58	30,217	0	1,224
Kota Bogor	1,785	386	699	339	300	6,224	18,007	603	12,881	2,185	1,625
Kota Sukabumi	95	20	160	232	73	3,532	5,443	148	3,894	658	273
Kota Bandung	5,318	1,149	564	751	423	29,291	18,551	842	13,270	3,545	3,871
Kota Cirebon	231	50	702	339	199	4,231	18,093	401	12,942	2,651	912
Kota Bekasi	1,274	275	685	537	205	14,142	19,360	410	13,849	0	1,387
Kota Depok	795	172	179	1,134	37	9,679	13,387	74	9,576	0	779
Kota Cimahi	375	81	13	20	110	6,482	438	223	314	0	344
Kota Tasikmalaya	563	122	320	113	60	4,608	7,894	122	5,646	453	588
Kota Banjar	56	12	50	20	10	1,487	1,245	21	891	0	91
JAWA TENGAH	8,241	2,391	10,548	6,997	2,107	115,968	287,704	4,194	130,281	9,819	10,815
Kab. Cilacap	936	271	418	249	209	2,953	11,171	418	5,059	1,611	839
Kab. Banyumas	195	57	348	129	93	4,240	8,622	187	3,904	487	329
Kab. Purbalingga	95	27	108	62	37	2,813	2,852	76	1,291	145	151

Provinsi dan Kabupaten/Kota	Penasun	Pasangan Penasun	WPS L	WPS TL	Waria	LSL	Pelanggan WPS	Pelanggan Waria	Pasangan Pelanggan	WBP	ODHA
Kab. Banjarnegara	44	13	42	96	39	2,871	1,727	79	782	182	109
Kab. Kebumen	57	17	21	83	46	3,370	1,143	94	517	204	121
Kab. Purworejo	35	10	19	50	34	2,475	838	69	381	310	88
Kab. Wonosobo	39	11	89	209	5	2,858	3,692	6	1,672	151	120
Kab. Magelang	342	99	11	86	48	3,451	957	98	434	0	271
Kab. Boyolali	45	13	11	131	41	2,906	1,343	83	609	106	104
Kab. Klaten	57	17	130	84	47	3,392	3,533	95	1,600	222	159
Kab. Sukoharjo	44	13	96	171	42	3,070	3,527	84	1,597	0	135
Kab. Wonogiri	57	17	20	74	42	3,362	1,045	86	474	135	119
Kab. Karanganyar	42	12	64	56	39	2,963	1,866	80	845	0	114
Kab. Sragen	42	12	57	62	39	2,964	1,753	79	793	335	116
Kab. Grobogan	66	19	151	62	55	3,847	3,779	112	1,712	227	172
Kab. Blora	42	12	260	135	40	2,898	6,782	81	3,072	182	172
Kab. Rembang	32	9	78	72	33	2,381	2,294	68	1,039	123	100
Kab. Pati	351	102	134	232	42	2,293	4,884	84	2,212	322	297
Kab. Kudus	66	19	14	144	14	2,828	1,517	29	687	152	109
Kab. Jepara	57	17	78	102	14	3,347	2,554	29	1,157	181	132
Kab. Demak	66	19	48	62	22	2,922	1,559	44	706	140	116
Kab. Semarang	352	102	855	228	46	2,078	20,431	92	9,252	1,434	511
Kab. Temanggung	39	11	24	182	36	2,714	2,070	73	938	138	106
Kab. Kendal	39	11	996	20	100	2,089	21,732	200	9,841	249	366
Kab. Batang	35	10	1,218	453	83	2,253	30,174	167	13,663	0	449
Kab. Pekalongan	41	12	53	89	35	2,788	1,895	71	857	0	106
Kab. Pemalang	203	59	428	101	90	4,114	10,172	181	4,606	149	336
Kab. Tegal	1,130	328	315	180	150	4,932	8,341	301	3,777	210	833
Kab. Brebes	89	26	129	72	62	5,098	3,400	125	1,539	288	207
Kota Magelang	294	85	13	62	30	1,942	793	39	359	448	215
Kota Surakarta	1,728	501	890	1,121	103	4,740	28,799	207	13,040	501	1,356
Kota Salatiga	953	276	600	677	74	2,742	18,753	150	8,492	134	785
Kota Semarang	482	140	2,684	974	202	8,998	66,309	406	30,025	117	1,288
Kota Pekalongan	80	23	26	234	41	3,812	2,576	52	1,166	936	213
Kota Tegal	72	21	120	260	74	3,464	4,821	149	2,183	0	177
DI YOGYAKARTA	805	220	560	562	261	4,222	20,329	579	11,043	1,451	1,140

Provinsi dan Kabupaten/Kota	Penasun	Pasangan Penasun	WPS L	WPS TL	Waria	LSL	Pelanggan WPS	Pelanggan Waria	Pasangan Pelanggan	WBP	ODHA
Kab. Kulon Progo	85	23	21	76	10	423	1,338	20	726	634	114
Kab. Bantul	114	31	69	91	52	420	2,740	101	1,488	199	147
Kab. Gunung Kidul	96	26	23	80	33	512	1,460	64	794	111	114
Kab. Sleman	131	36	162	113	22	562	5,362	43	2,913	354	199
Kota Yogyakarta	379	104	285	202	144	2,305	9,429	351	5,122	153	567
JAWA TIMUR	22,308	7,075	14,363	4,727	4,170	79,533	351,742	8,345	303,382	17,625	27,062
Kab. Pacitan	74	23	125	51	25	559	3,148	50	2,715	130	144
Kab. Ponorogo	289	92	140	55	45	752	3,510	90	3,027	275	306
Kab. Trenggalek	149	47	150	52	25	618	3,698	50	3,189	193	207
Kab. Tulungagung	647	205	700	212	189	1,206	16,974	379	14,640	493	853
Kab. Blitar	345	109	335	82	200	1,277	7,964	399	6,870	0	502
Kab. Kediri	728	231	892	198	210	1,693	21,024	419	18,133	0	1,003
Kab. Malang	336	107	272	194	260	3,181	7,531	513	6,496	0	609
Kab. Lumajang	920	292	450	75	25	823	10,415	49	8,983	394	827
Kab. Jember	153	49	652	117	239	3,528	15,135	477	13,053	874	655
Kab. Banyuwangi	1,049	332	806	207	248	2,145	19,224	495	16,581	950	1,222
Kab. Bondowoso	153	49	154	59	25	1,248	3,860	50	3,330	415	245
Kab. Situbondo	153	49	200	75	35	899	4,981	70	4,297	344	252
Kab. Probolinggo	153	49	264	75	45	1,221	6,353	90	5,479	462	298
Kab. Pasuruan	649	206	210	164	101	1,231	5,926	200	5,111	0	629
Kab. Sidoarjo	2,006	636	478	225	350	1,664	12,271	700	10,584	4,066	1,912
Kab. Mojokerto	153	49	394	177	101	1,198	10,034	203	8,655	0	377
Kab. Jombang	225	71	200	81	45	1,033	5,032	90	4,340	479	318
Kab. Nganjuk	534	169	610	84	45	1,198	13,948	90	12,031	48	685
Kab. Madiun	429	136	150	69	55	649	3,835	111	3,307	0	403
Kab. Magetan	261	83	482	135	45	959	11,596	90	10,002	181	446
Kab. Ngawi	78	25	150	59	35	728	3,748	70	3,232	371	172
Kab. Bojonegoro	138	44	125	66	25	1,010	3,272	50	2,822	368	215
Kab. Tuban	301	95	150	65	25	900	3,805	50	3,282	358	324
Kab. Lamongan	271	86	200	86	25	875	5,062	49	4,367	333	327
Kab. Gresik	315	100	125	81	150	987	3,396	301	2,929	211	376
Kab. Bangkalan	26	8	64	56	25	1,401	1,863	50	1,607	190	139
Kab. Sampang	32	10	35	56	15	1,375	1,236	31	1,066	201	125

Provinsi dan Kabupaten/Kota	Penasun	Pasangan Penasun	WPS L	WPS TL	Waria	LSL	Pelanggan WPS	Pelanggan Waria	Pasangan Pelanggan	WBP	ODHA
Kab. Pamekasan	41	13	35	58	25	1,464	1,257	50	1,084	618	196
Kab. Sumenep	50	16	40	58	15	1,549	1,364	31	1,177	168	150
Kota Kediri	1,326	420	350	187	22	2,845	9,179	44	7,917	607	1,212
Kota Blitar	433	137	75	112	50	1,250	2,573	101	2,219	345	416
Kota Malang	3,249	1,030	394	246	73	5,654	10,603	147	9,146	1,920	2,690
Kota Probolinggo	350	111	35	66	25	3,338	1,308	50	1,129	246	445
Kota Pasuruan	473	150	37	75	148	2,564	1,440	299	1,242	786	535
Kota Mojokerto	384	122	351	102	97	1,649	8,506	196	7,336	433	539
Kota Madiun	564	179	166	289	100	2,350	6,042	203	5,212	1,166	727
Kota Surabaya	4,359	1,382	4,267	528	952	21,814	97,197	1,908	83,832	0	6,140
Kota Batu	514	163	100	150	50	698	3,432	100	2,960	0	449
BANTEN	3,334	912	1,741	2,509	629	14,942	60,664	1,343	32,955	8,660	4,288
Kab. Pandeglang	172	47	38	558	10	728	5,654	22	3,071	415	229
Kab. Lebak	176	48	40	300	100	484	3,482	216	1,892	264	200
Kab. Tangerang	803	220	1,050	572	345	8,239	28,454	740	15,456	0	1,516
Kab. Serang	450	123	42	217	74	776	2,815	159	1,529	0	340
Kota Tangerang	1,056	289	380	438	80	2,560	12,296	174	6,680	6,696	1,344
Kota Cilegon	455	124	121	251	10	1,526	4,894	16	2,659	1,285	458
Kota Serang	222	61	70	173	10	629	3,069	16	1,668	0	202
BALI	3,012	824	3,945	6,738	923	25,800	137,738	1,767	60,827	1,618	7,295
Kab. Jembrana	239	65	440	504	40	3,024	13,268	77	5,859	118	719
Kab. Tabanan	214	59	280	493	40	2,831	9,905	77	4,374	92	530
Kab. Badung	672	184	500	1,750	240	4,918	25,029	457	11,053	902	1,259
Kab. Gianyar	237	65	175	577	50	2,247	8,457	97	3,735	61	431
Kab. Klungkung	209	57	50	465	10	2,248	4,961	20	2,191	45	256
Kab. Bangli	204	56	25	408	15	1,470	3,967	29	1,752	70	214
Kab. Karang Asem	215	59	125	471	10	1,500	6,548	20	2,892	173	327
Kab. Buleleng	272	74	150	637	133	2,462	8,448	255	3,731	157	453
Kota Denpasar	750	205	2,200	1,433	385	5,100	57,155	735	25,240	0	3,108
NUSA TENGGARA BARAT	1,873	511	1,297	2,412	1,148	10,631	49,383	2,384	26,826	1,582	1,909
Kab. Lombok Barat	210	57	210	105	75	1,336	5,562	156	3,021	0	205
Kab. Lombok Tengah	180	49	75	188	80	1,341	3,255	166	1,768	113	169

Provinsi dan Kabupaten/Kota	Penasun	Pasangan Penasun	WPS L	WPS TL	Waria	LSL	Pelanggan WPS	Pelanggan Waria	Pasangan Pelanggan	WBP	ODHA
Kab. Lombok Timur	262	72	110	263	65	1,563	4,654	136	2,528	162	223
Kab. Sumbawa	93	25	98	340	90	600	5,085	187	2,762	0	124
Kab. Dompu	92	25	80	75	78	867	2,401	161	1,304	112	106
Kab. Bima	85	23	115	75	250	1,037	3,180	519	1,728	316	158
Kab. Sumbawa Barat	147	40	80	258	110	478	3,990	228	2,167	362	150
Kab. Lombok Utara	165	45	85	186	50	793	3,484	104	1,893	0	144
Kota Mataram	359	98	324	650	150	1,716	12,756	312	6,929	517	374
Kota Bima	280	77	120	273	200	900	5,016	415	2,726	0	257
NUSA TENGGARA TIMUR	196	47	1,109	819	471	9,517	31,570	890	17,152	3,130	695
Kab. Sumba Barat	9	2	5	31	18	438	282	31	154	377	21
Kab. Sumba Timur	9	2	7	32	19	424	313	34	170	255	20
Kab. Kupang	9	2	20	32	21	496	747	37	406	0	26
Kab. Timor Tengah Selatan	9	2	10	33	21	493	360	38	196	206	24
Kab. Timor Tengah Utara	10	3	15	32	19	473	546	34	296	223	26
Kab. Belu	9	2	200	44	22	319	4,907	51	2,666	279	59
Kab. Alor	9	2	25	43	19	421	963	33	523	132	26
Kab. Lembata	8	2	20	33	18	376	755	32	411	158	23
Kab. Flores Timur	9	2	5	36	5	396	408	9	223	119	17
Kab. Sikka	9	2	100	60	92	273	2,812	211	1,527	166	59
Kab. Ende	9	2	10	35	19	427	541	34	294	170	22
Kab. Ngada	9	2	15	33	18	452	647	32	351	194	24
Kab. Manggarai	9	2	10	36	20	463	549	36	299	0	23
Kab. Rote Ndao	8	2	25	31	18	417	781	31	424	96	25
Kab. Manggarai Barat	8	2	15	35	19	427	664	33	360	0	24
Kab. Sumba Tengah	8	2	26	31	19	428	795	33	432	0	26
Kab. Sumba Barat Daya	8	2	25	30	17	392	755	29	410	0	25
Kab. Nagekeo	9	2	26	31	18	444	791	32	430	0	26
Kab. Manggarai Timur	9	2	27	31	19	460	817	34	444	0	26
Kota Kupang	29	8	523	150	50	1,498	13,137	86	7,136	755	173
KALIMANTAN BARAT	2,032	555	3,488	7,846	436	1,247	142,319	903	77,312	2,536	1,843
Kab. Sambas	55	15	260	507	115	51	9,949	238	5,405	168	107
Kab. Bengkayang	50	14	87	316	2	69	4,579	3	2,488	0	49

Provinsi dan Kabupaten/Kota	Penasun	Pasangan Penasun	WPS L	WPS TL	Waria	LSL	Pelanggan WPS	Pelanggan Waria	Pasangan Pelanggan	WBP	ODHA
Kab. Landak	51	14	108	454	12	68	6,185	25	3,360	0	61
Kab. Pontianak	55	15	311	460	12	68	10,663	25	5,793	162	98
Kab. Sanggau	55	15	201	471	15	73	8,362	31	4,543	221	82
Kab. Ketapang	297	81	305	470	52	52	10,613	108	5,765	258	197
Kab. Sintang	148	40	213	444	20	70	8,391	42	4,558	238	120
Kab. Kapuas Hulu	50	14	120	436	7	64	6,283	14	3,413	65	63
Kab. Sekadau	48	13	197	380	5	68	7,506	11	4,078	0	71
Kab. Melawi	48	13	121	314	2	68	5,305	4	2,882	0	53
Kab. Kayong Utara	47	13	54	308	50	42	3,786	104	2,056	0	51
Kab. Kubu Raya	56	15	221	475	11	77	8,820	23	4,791	0	85
Kota Pontianak	754	206	691	1,904	103	362	31,144	213	16,917	1,027	534
Kota Singkawang	318	87	599	907	30	115	20,733	62	11,263	397	274
KALIMANTAN TENGAH	139	35	1,659	1,914	284	5,606	52,772	674	28,668	1,890	1,074
Kotawaringin Barat	10	3	404	131	16	446	10,126	40	5,501	190	184
Kotawaringin Timur	9	2	337	220	39	520	9,428	97	5,121	526	174
Kab. Kapuas	9	2	65	97	24	306	2,307	60	1,253	120	53
Kab. Barito Selatan	8	2	80	105	28	233	2,703	70	1,468	170	59
Kab. Barito Utara	9	2	137	97	32	461	3,894	79	2,116	197	86
Kab. Sukamara	8	2	59	101	14	374	2,206	28	1,198	0	48
Kab. Lamandau	8	2	19	88	13	366	944	26	513	0	27
Kab. Seruyan	8	2	36	86	13	387	1,315	26	715	0	35
Kab. Katingan	8	2	135	91	14	403	3,532	28	1,919	0	73
Kab. Pulang Pisau	8	2	30	86	13	364	1,174	26	638	0	32
Kab. Gunung Mas	8	2	60	92	15	342	2,151	38	1,169	0	47
Kab. Barito Timur	8	2	57	100	12	342	2,162	30	1,174	0	46
Kab. Murung Raya	8	2	20	88	14	345	1,227	35	666	0	33
Kota Palangka Raya	30	8	220	532	37	717	9,603	91	5,217	687	179
KALIMANTAN SELATAN	173	43	1,536	1,246	1,440	6,550	44,576	2,967	24,216	3,201	946
Kab. Tanah Laut	9	2	80	69	20	443	2,399	42	1,304	193	37
Kab. Kota Baru	9	2	250	85	110	291	6,355	227	3,452	505	87
Kab. Banjar	10	3	100	67	150	332	2,830	307	1,538	485	77
Kab. Barito Kuala	9	2	10	64	20	445	700	42	381	132	24

Provinsi dan Kabupaten/Kota	Penasun	Pasangan Penasun	WPS L	WPS TL	Waria	LSL	Pelanggan WPS	Pelanggan Waria	Pasangan Pelanggan	WBP	ODHA
Kab. Tapin	9	2	50	62	30	366	1,665	62	904	108	31
Kab. Hulu Sungai Selatan	9	2	32	62	50	384	1,001	103	544	125	33
Kab. Hulu Sungai Tengah	9	2	32	63	50	400	1,017	103	552	124	34
Kab. Hulu Sungai Utara	9	2	32	62	100	275	1,017	206	552	299	44
Kab. Tabalong	9	2	100	70	120	277	2,860	246	1,554	156	65
Kab. Tanah Bumbu	8	2	400	100	200	264	9,868	412	5,361	0	128
Kab. Balangan	8	2	50	61	20	388	1,657	42	900	0	30
Kota Banjarmasin	48	13	150	410	470	1,936	6,966	967	3,784	1,074	260
Kota Banjar Baru	27	7	250	71	100	749	6,241	208	3,390	0	98
KALIMANTAN TIMUR	229	61	1,739	1,033	521	9,668	50,024	1,025	27,175	4,402	920
Kab. Pasir	9	2	25	32	19	370	735	30	399	203	25
Kab. Kutai Barat	8	2	60	42	18	375	1,749	29	951	0	30
Kab. Kutai Kartanegara	12	3	165	52	70	377	4,325	152	2,350	931	73
Kab. Kutai Timur	8	2	66	58	26	277	2,166	40	1,176	0	33
Kab. Berau	9	2	53	41	23	352	1,686	36	916	450	36
Kab. Malinau	8	2	67	40	19	249	1,364	29	742	0	25
Kab. Bulungan	9	2	23	33	15	390	842	23	457	0	24
Kab. Nunukan	8	2	61	44	21	235	1,889	33	1,026	0	29
Kab. Penajam Paser Utara	14	4	73	33	16	661	2,036	25	1,106	0	41
Kab. Tana Tidung	8	2	23	32	14	202	654	21	355	0	18
Kota Balikpapan	38	10	600	214	70	2,270	15,981	151	8,682	752	216
Kota Samarinda	35	10	285	153	80	2,151	8,172	173	4,439	1,440	201
Kota Tarakan	35	10	157	155	60	721	5,395	131	2,930	626	94
Kota Bontang	28	8	81	104	70	1,038	3,030	152	1,646	0	77
SULAWESI UTARA	1,928	525	1,493	1,979	1,395	18,252	43,847	2,758	23,823	1,534	2,069
Kab. Bolaang Mongondow	27	7	65	92	60	1,107	1,593	123	866	0	66
Kab. Minahasa	34	9	20	105	80	1,282	1,251	164	680	264	74
Kab. Kepulauan Sangihe	31	8	66	91	30	1,172	1,638	60	890	134	60
Kab. Kepulauan Talaud	27	7	63	95	58	1,016	1,665	74	905	40	63
Kab. Minahasa Selatan	29	8	65	92	50	1,141	1,648	102	895	0	65
Kab. Minahasa Utara	28	8	66	90	50	264	1,581	102	859	0	47
Kab. Bolaang Mongondow Utara	26	7	63	88	60	1,030	1,535	123	834	0	65

Provinsi dan Kabupaten/Kota	Penasun	Pasangan Penasun	WPS L	WPS TL	Waria	LSL	Pelanggan WPS	Pelanggan Waria	Pasangan Pelanggan	WBP	ODHA
Kab. Siau Tagulandang Biaro	27	7	62	88	54	858	1,514	69	823	7	58
Kab. Minahasa Tenggara	27	7	64	88	50	1,063	1,550	102	842	0	62
Kab. Bolaang Mongondow Selatan	26	7	63	87	60	765	1,525	123	829	0	59
Kab. Bolaang Mongondow Timur	26	7	63	87	60	871	1,525	123	829	0	61
Kota Manado	516	141	150	523	400	2,610	8,125	812	4,414	662	481
Kota Bitung	449	123	516	197	233	2,100	13,760	474	7,474	199	431
Kota Tomohon	379	104	89	146	80	1,233	2,720	164	1,478	74	262
Kotamobagu	276	75	78	110	70	1,740	2,217	143	1,205	154	215
SULAWESI TENGAH	118	29	1,089	682	294	5,226	30,492	687	16,943	1,759	519
Kab. Banggai Kepulauan	8	2	27	37	5	407	950	12	527	0	22
Kab. Banggai	9	2	171	57	20	300	4,339	47	2,411	299	55
Kab. Morowali	8	2	28	51	10	388	1,079	24	600	0	24
Kab. Poso	9	2	30	41	15	528	1,049	35	584	175	29
Kab. Donggala	9	2	50	39	25	410	1,461	59	812	160	33
Kab. Toli-Toli	9	2	52	56	28	253	1,662	66	923	188	33
Kab. Buol	8	2	27	38	5	365	948	12	526	125	21
Kab. Parigi Moutong	9	2	149	56	27	293	3,847	63	2,138	195	52
Kab. Tojo Una-Una	8	2	27	38	10	378	954	24	530	0	23
Kab. Sigi	8	2	28	38	13	392	970	30	539	0	24
Kab. Kota Palu	33	9	500	231	136	1,512	13,233	315	7,353	617	205
SULAWESI SELATAN	2,758	756	1,560	1,692	964	9,530	48,402	1,778	26,895	4,295	2,202
Kab. Selayar	55	15	5	53	26	236	571	37	317	51	40
Kab. Bulukumba	69	19	20	68	32	327	1,031	45	573	166	57
Kab. Bantaeng	70	19	23	50	27	309	961	58	534	75	54
Kab. Jeneponto	71	19	50	48	100	217	1,374	210	764	83	73
Kab. Takalar	69	19	26	51	28	326	797	61	443	111	55
Kab. Gowa	81	22	100	74	38	398	2,853	81	1,586	312	104
Kab. Sinjai	61	17	23	47	10	247	722	21	401	58	44
Kab. Maros	105	29	50	48	29	306	1,526	41	848	179	78
Kab. Pangkajene dan Kepulauan	77	21	20	51	31	342	890	44	494	116	58
Kab. Barru	65	18	50	46	26	291	1,505	38	836	110	56

Provinsi dan Kabupaten/Kota	Penasun	Pasangan Penasun	WPS L	WPS TL	Waria	LSL	Pelanggan WPS	Pelanggan Waria	Pasangan Pelanggan	WBP	ODHA
Kab. Bone	69	19	40	70	16	321	1,497	34	831	178	60
Kab. Soppeng	70	19	10	65	28	314	796	41	443	54	53
Kab. Wajo	76	21	20	66	16	313	1,021	34	567	183	58
Kab. Sidenreng Rappang	79	22	50	52	30	334	1,559	44	866	106	67
Kab. Pinrang	82	22	38	50	59	235	1,282	124	713	133	66
Kab. Enrekang	58	16	23	47	26	257	921	37	512	83	47
Kab. Luwu	57	16	10	66	29	269	793	41	440	0	47
Kab. Tana Toraja	68	19	20	54	30	310	905	43	503	105	53
Kab. Luwu Utara	54	15	50	72	30	260	1,731	43	962	155	56
Kab. Luwu Timur	52	14	85	71	28	246	2,503	41	1,391	0	61
Kab. Toraja Utara	68	19	25	53	30	308	1,020	43	567	0	54
Kota Makassar	951	260	738	262	232	1,934	18,577	484	10,321	1,596	715
Kota Pare-Pare	165	45	50	78	45	846	1,801	94	1,001	167	127
Kota Palopo	186	51	34	150	18	584	1,766	39	982	274	121
SULAWESI TENGGARA	144	37	827	953	249	6,195	28,950	675	15,731	1,332	448
Kab. Buton	9	2	125	50	10	434	3,516	27	1,910	0	38
Kab. Muna	9	2	211	82	15	459	6,076	42	3,301	159	56
Kab. Konawe	9	2	10	56	16	471	691	44	376	112	21
Kab. Kolaka	10	3	65	71	30	333	2,277	80	1,237	173	37
Kab. Konawe Selatan	8	2	25	51	10	399	1,097	27	597	0	21
Kab. Bombana	9	2	132	49	14	448	3,811	38	2,071	0	40
Kab. Wakatobi	10	3	87	69	15	470	2,842	42	1,544	0	38
Kab. Kolaka Utara	8	2	9	51	10	376	638	27	347	0	18
Kab. Buton Utara	9	2	9	44	13	398	439	36	238	0	18
Kab. Konawe Utara	8	2	9	44	50	467	449	134	244	0	31
Kota Kendari	29	8	95	269	40	830	4,800	108	2,608	447	71
Kota Bau-Bau	26	7	50	117	26	1,110	2,314	70	1,258	441	59
GORONTALO	71	18	65	290	185	2,732	7,514	486	4,084	427	239
Kab. Boalemo	8	2	6	42	50	243	888	135	483	427	37
Kab. Gorontalo	9	2	6	47	53	567	1,032	143	560	0	43
Kab. Pohuwato	8	2	12	54	15	377	1,454	42	790	0	34
Kab. Bone Bolango	8	2	6	43	20	408	900	46	490	0	29

Provinsi dan Kabupaten/Kota	Penasun	Pasangan Penasun	WPS L	WPS TL	Waria	LSL	Pelanggan WPS	Pelanggan Waria	Pasangan Pelanggan	WBP	ODHA
Kab. Gorontalo Utara	8	2	6	42	19	392	879	44	478	0	28
Kota Gorontalo	30	8	29	62	28	745	2,361	76	1,283	0	68
SULAWESI BARAT	46	12	188	40	147	1,859	6,577	903	3,573	437	189
Kab. Majene	11	3	46	7	28	314	1,479	174	803	70	38
Kab. Polewali Mandar	10	3	43	5	27	481	1,328	167	721	0	42
Kab. Mamasa	8	2	38	6	26	271	1,261	159	685	202	33
Kab. Mamuju	9	2	26	15	38	547	1,276	233	693	165	45
Kab. Mamuju Utara	8	2	35	7	28	246	1,233	170	671	0	32
MALUKU	98	25	4,107	3,519	904	2,083	120,300	1,898	65,351	661	1,367
Kab. Maluku Tenggara Barat	8	2	210	277	169	119	6,984	355	3,795	29	111
Kab. Maluku Tenggara	8	2	458	323	228	232	12,819	479	6,964	0	179
Kab. Maluku Tengah	9	2	540	397	12	233	15,248	25	8,283	141	143
Kab. Buru	8	2	638	257	36	199	16,209	75	8,806	15	159
Kab. Kepulauan Aru	8	2	572	473	104	118	16,624	218	9,030	6	177
Kab. Seram Bagian Barat	8	2	187	32	58	187	4,375	122	2,376	0	61
Kab. Seram Bagian Timur	8	2	218	208	68	180	6,570	143	3,569	12	82
Kab. Buru Selatan	7	2	92	207	14	194	3,802	30	2,066	0	43
Kab. Maluku Barat Daya	8	2	100	75	34	193	2,842	71	1,544	1	41
Kota Ambon	15	4	872	907	121	214	26,889	254	14,606	390	279
Kota Tual	11	3	220	363	60	214	7,938	126	4,312	67	92
MALUKU UTARA	93	24	320	1,639	224	3,800	23,115	550	12,558	441	380
Kab. Halmahera Barat	8	2	27	135	15	357	1,849	37	1,004	0	31
Kab. Halmahera Tengah	8	2	27	126	12	375	1,754	30	953	33	31
Kab. Kepulauan Sula	8	2	95	230	24	242	4,820	59	2,619	97	55
Kab. Halmahera Selatan	8	2	28	181	20	268	2,265	49	1,231	0	33
Kab. Halmahera Utara	8	2	48	149	20	270	2,724	49	1,480	97	37
Kab. Halmahera Timur	8	2	27	42	18	350	1,027	44	558	0	25
Kota Ternate	30	8	41	622	100	1,348	6,642	244	3,608	185	127
Kota Tidore Kepulauan	15	4	27	154	15	590	2,034	38	1,105	29	41
PAPUA BARAT	58	16	1,713	1,686	210	3,351	53,292	482	37,305	350	8,396
Kab. Fakfak	0	0	213	189	14	311	6,395	32	4,477	60	706

Provinsi dan Kabupaten/Kota	Penasun	Pasangan Penasun	WPS L	WPS TL	Waria	LSL	Pelanggan WPS	Pelanggan Waria	Pasangan Pelanggan	WBP	ODHA
Kab. Kaimana	0	0	37	123	21	325	2,062	49	1,444	32	925
Kab. Teluk Wondama	0	0	0	0	0	306	0	0	0	0	968
Kab. Teluk Bintuni	0	0	0	0	11	366	0	25	0	0	688
Kab. Manokwari	30	8	705	405	54	206	19,318	125	13,522	98	1,866
Kab. Sorong Selatan	0	0	0	0	0	384	0	0	0	5	562
Kab. Sorong	0	0	50	136	0	372	2,303	0	1,612	0	522
Kab. Raja Ampat	0	0	0	0	0	377	0	0	0	0	315
Kota Sorong	28	8	708	833	110	704	23,214	251	16,250	155	1,844
PAPUA	19	5	3,038	3,219	262	9,837	95,292	575	58,198	936	24,355
Kab. Merauke	0	0	100	389	0	374	5,648	0	3,450	186	1,532
Kab. Jayawijaya	0	0	550	423	48	252	15,838	106	9,672	80	1,287
Kab. Jayapura	0	0	922	367	66	219	23,403	145	14,292	260	1,020
Kab. Nabire	0	0	311	162	0	382	8,238	0	5,032	86	927
Kab. Yapen Waropen	0	0	27	10	0	333	685	0	418	0	1,115
Kab. Biak Numfor	0	0	10	15	0	334	505	0	309	174	969
Kab. Paniai	0	0	26	0	0	400	593	0	362	0	1,610
Kab. Puncak Jaya	0	0	26	0	0	419	593	0	362	0	1,052
Kab. Mimika	0	0	349	379	30	313	11,020	66	6,730	93	1,525
Kab. Boven Digoel	0	0	0	0	0	376	0	0	0	3	507
Kab. Mappi	0	0	26	0	0	376	572	0	349	0	926
Kab. Asmat	0	0	88	0	0	427	1,920	0	1,173	0	939
Kab. Yahukimo	0	0	0	0	0	409	0	0	0	0	2,153
Kab. Pegunungan Bintang	0	0	41	0	0	398	895	0	547	0	1,328
Kab. Tolikara	0	0	38	0	0	378	841	0	514	0	633
Kab. Sarmi	0	0	0	0	0	340	0	0	0	0	210
Kab. Keerom	0	0	0	0	0	380	0	0	0	0	437
Kab. Waropen	0	0	0	0	0	201	0	0	0	0	208
Kab. Supiori	0	0	0	0	0	147	0	0	0	0	156
Kab. Mamberamo Raya	0	0	0	0	0	306	0	0	0	0	195
Kab. Mamberamo Tengah	0	0	0	0	0	367	0	0	0	0	234
Kab. Yalimo	0	0	0	0	0	283	0	0	0	0	269
Kab. Lanny Jaya	0	0	0	0	0	376	0	0	0	0	847
Kab. Nduga	0	0	0	0	0	368	0	0	0	0	410

Provinsi dan Kabupaten/Kota	Penasun	Pasangan Penasun	WPS L	WPS TL	Waria	LSL	Pelanggan WPS	Pelanggan Waria	Pasangan Pelanggan	WBP	ODHA
Kab. Puncak	0	0	0	0	0	412	0	0	0	0	701
Kab. Dogiyai	0	0	0	0	0	374	0	0	0	0	921
Kota Jayapura	19	5	524	1,474	118	893	24,541	258	14,988	54	2,243
TOTAL	105,784	28,085	106,011	108,043	32,065	695,026	3,169,928	71,316	1,938,650	140,559	186,257

5 Diskusi

Hal yang paling mengemuka dari estimasi populasi rawan tertular HIV dan ODHA tahun 2009 adalah nilai tengah hasil estimasi jumlah sebagian subpopulasi rawan dan ODHA yang lebih rendah dari rerata hasil estimasi tahun 2006. Proses estimasi tahun 2006 yang memberikan hasil estimasi ODHA dewasa dengan kisaran antara 169 – 216 ribu dan rerata 193 ribu orang telah diakui secara luas sebagai proses penghitungan terbaik pada saat itu dengan segala keterbatasan dalam sumber data maupun metodologi. Bahkan hasil estimasi tahun 2006 telah digunakan oleh berbagai pihak dalam penentuan target-target program, penghitungan kebutuhan sumber daya dan pengajuan proposal bantuan dana.

Walaupun demikian, laporan proses estimasi tahun 2006 juga mengungkapkan berbagai keterbatasan diantaranya adalah ketersediaan data dasar untuk melakukan estimasi jumlah populasi rawan tertular HIV maupun estimasi prevalensi HIV untuk mengestimasi jumlah ODHA. Batasan-batasan tersebut menyebabkan keberagaman epidemi HIV di seluruh wilayah Indonesia kurang tergambarkan dengan baik oleh hasil estimasi tahun 2006. Oleh karena itu dalam proses estimasi tahun 2009, berbagai keterbatasan dalam proses estimasi 2006 sedini dan semaksimal mungkin diantisipasi oleh Kelompok Kerja Estimasi 2009. Sehingga pada proses estimasi 2009, dicapai peningkatan jumlah sumber data yang cukup signifikan dibandingkan dengan proses estimasi 2006 sebagaimana tergambar pada Tabel 7.

Peningkatan persentase jumlah kabupaten/kota yang memiliki data pemetaan subpopulasi rawan terinfeksi HIV berkisar antara 20 – 47 persen, dimana persentase tertinggi terjadi pada data subpopulasi WPS tidak langsung, diikuti oleh LSL, waria, penasun, dan WPS langsung. Walaupun demikian, kabupaten/kota yang tidak memiliki data pemetaan populasi rawan masih cukup banyak. Oleh karena itu pemanfaatan hasil estimasi populasi rawan tahun 2009 untuk menentukan target-target program pengendalian HIV dan AIDS harus dilakukan secara hati-hati khususnya pada kabupaten/kota yang tidak memiliki data pemetaan populasi rawan terinfeksi HIV.

Selain dari perbedaan dalam jumlah dan kualitas data dasar, proses penghitungan estimasi tahun 2009 juga mengalami perbaikan-perbaikan untuk meminimalisir unsur subyektifitas dari pelaku estimasi. Perbaikan penghitungan estimasi tahun 2009 dilakukan pada subpopulasi penasun, WPS, waria, dan LSL dengan menggunakan model regresi poisson untuk mengestimasi jumlah populasi rawan di kabupaten/kota yang tidak memiliki data pemetaan. Di mana pada proses estimasi tahun 2006 penghitungan tersebut dilakukan hanya menggunakan satu faktor pengali (indeks risiko dari hasil Survei Podes) saja.

Perbedaan penting lainnya adalah sumber data utama untuk menghitung estimasi jumlah penasun, di mana pada tahun 2006 sebagian besar menggunakan proporsi penasun dari jumlah tahanan kasus Napza Kepolisian atau Lapas/Rutan dari hasil survei BNN tahun 2003 dan BSS 2004 di 5 kota. Sedangkan pada tahun 2009 penghitungan estimasi

jumlah penasun menggunakan data pemetaan dan cakupan dari LSM penjangkau, Dinas Kesehatan, KPAD dan lembaga lainnya. Kelompok Kerja Estimasi berpandangan bahwa penggunaan data dasar dari tahanan telah menafikan perbedaan jenis kejahatan narkoba di setiap kabupaten/kota dan menyebabkan hasil penghitungan estimasi jumlah penasun tahun 2006 di sebagian besar kabupaten/kota cenderung *over estimate*.

Tabel 16. Ringkasan Hasil Estimasi Populasi Rawan dan ODHA Tahun 2006 dan 2009

Populasi	Tahun	Estimasi Jumlah			Estimasi ODHA		
		Rerata/ Nilai Tengah	Rendah	Tinggi	Rerata/ Nilai Tengah	Rendah	Tinggi
Pengguna Napza Suntik (Penasun)	2006	219,130	190,460	247,800	90,030	78,620	101,440
	2009	105,784	73,663	201,131	52,565	37,225	96,453
Pasangan Penasun	2006	93,350	81,100	105,590	12,840	10,860	14,810
	2009	28,085	19,428	54,166	7,066	4,611	14,421
Wanita Penjaja Seks - Langsung	2006	128,220	94,840	161,460	6,570	5,970	7,170
	2009	106,011	90,245	124,296	8,836	7,634	10,231
Wanita Penjaja Seks - Tidak Langsung	2006	92,970	69,240	116,700	2,340	1,930	2,740
	2009	108,043	87,718	133,711	4,270	3,517	5,180
Waria	2006	28,130	20,960	35,300	3,790	2,280	5,300
	2009	32,065	21,589	51,235	6,078	4,212	9,562
Laki-laki Suka Seks Laki-laki (LSL)	2006	766,800	384,320	1,149,270	9,180	8,660	9,700
	2009	695,026	423,729	1,358,527	24,138	15,530	44,142
Pelanggan WPS Langsung	2006	2,479,860	1,835,060	3,124,660	24,810	21,750	27,870
	2009	2,285,996	1,923,217	2,648,521	30,287	26,199	34,146
Pelanggan WPS Tidak Langsung	2006	682,060	507,600	856,520	3,500	4,140	2,860
	2009	883,932	695,804	1,071,832	5,843	4,797	6,643
Pelanggan Waria	2006	83,130	61,610	104,640	2,240	1,300	3,180
	2009	71,316	42,140	100,236	3,077	523	5,397
Pasangan Pelanggan WPS L	2006	1,433,760	1,063,610	1,803,900	4,540	3,620	5,460
	2009	1,420,240	1,205,344	1,634,910	9,625	8,296	10,730
Pasangan Pelanggan WPS TL	2006	399,900	298,720	501,080	720	780	650
	2009	518,410	411,197	625,382	1,817	1,448	1,988
Warga Binaan Pemasarakatan	2006	96,210	75,580	116,840	5,210	4,340	6,080
	2009	140,559	140,559	140,559	5,106	3,233	6,978
Populasi Umum Tanah Papua (15-49 Thn)	2006	1,297,758	1,258,100	1,312,550	27,500	27,960	27,040
	2009	1,354,979	1,261,212	1,422,783	27,550	14,864	41,486
Total Populasi (15-49 Thn)	2006	121,784,330			193,030	169,230	216,820
	2009	122,959,811			186,257	132,089	287,357

Hasil estimasi tahun 2009 yang lebih rendah dari hasil estimasi sebelumnya tidak serta merta menggambarkan bahwa jalannya epidemi HIV di Indonesia sudah dapat dikendalikan atau adanya penurunan jumlah populasi rawan tertular HIV. Hasil estimasi jumlah beberapa populasi berisiko dan ODHA yang lebih rendah pada proses estimasi tahun 2009, lebih disebabkan karena adanya peningkatan jumlah dan kualitas data pemetaan populasi rawan terinfeksi HIV dan perbaikan cara penghitungan beberapa subpopulasi. Selain itu, dari hasil estimasi tahun 2009 dapat dilihat peningkatan rata-rata proporsi ODHA pada hampir semua subpopulasi rawan tertular HIV. Peningkatan tertinggi terjadi

pada subpopulasi pasangan penasun (21%) , diikuti oleh penasun (9%), waria (5%), LSL (2%), WPS (2.1%) serta pelanggan dan pasangan seks tetapnya (0.3%).

Proses estimasi 2009 ini diuntungkan oleh beberapa kondisi, yaitu banyak pihak yang menyadari keuntungan adanya informasi estimasi, dan ketersediaan data yang jauh lebih banyak secara kuantitas, terutama data pemetaan subpopulasi rawan terinfeksi HIV, data Survei Podes dan data surveilans sentinel HIV, serta surveilans survei perilaku, dan lain-lain.

Hambatan yang ditemukan dalam proses estimasi diantaranya disebabkan oleh kondisi data tersebar di banyak tempat, belum terkumpul pada satu tempat misalnya pusat data surveilans. Selain itu seringkali tanggapan atau respon yang terlambat dari berbagai pemangku kepentingan di tingkat nasional maupun daerah terhadap hasil estimasi. Umpan balik sangat penting untuk mengecek terhadap ketidaktepatan dalam melakukan perhitungan estimasi.

Kelompok Kerja Estimasi dan tim pengkaji dari WHO dan UNAIDS serta pemangku kepentingan di tingkat nasional yang melakukan kajian berkesimpulan bahwa hasil pemetaan pada subpopulasi yang lebih tersembunyi dan terstigma seperti LSL, penasun, dan WPS tak langsung baru mencerminkan jumlah yang terjangkau atau teridentifikasi saja. Sehingga untuk memperkirakan jumlah subpopulasi tersebut dilakukan penghitungan dengan memasukan faktor koreksi berupa persentase yang sudah pernah dijangkau oleh berbagai program dari hasil STBP 2009. Sedangkan penghitungan estimasi subpopulasi WPS langsung dan waria tidak menggunakan faktor koreksi mengingat kedua subpopulasi tersebut lebih mudah teridentifikasi oleh para pelaku program yang melakukan pemetaan.

6 Rekomendasi

Berdasarkan pengalaman dari proses penghitungan serta hasil estimasi jumlah populasi rawan terinfeksi HIV dan estimasi jumlah orang yang sudah terinfeksi HIV tahun 2009, maka dirumuskan beberapa rekomendasi untuk menindaklanjuti hasil tersebut, sebagai berikut

-  Perlu dilakukan sosialisasi dan penjelasan yang terbuka bahwa hasil estimasi populasi rawan terinfeksi HIV di Indonesia tahun 2009 merupakan koreksi dari hasil kegiatan estimasi sebelumnya. Perbedaan hasil estimasi merupakan kombinasi dari ketersediaan data yang jauh lebih banyak dibandingkan pada periode-periode sebelumnya dan juga penggunaan metode estimasi pemodelan regresi yang menekan pengaruh subjektivitas pelaku estimasi dalam melakukan penghitungan estimasi.
-  Hasil Estimasi perlu digunakan dalam penentuan denominator untuk indikator cakupan program pengendalian HIV dan AIDS di tingkat kabupaten, provinsi, serta nasional.
-  Perlu dilanjutkan kegiatan pemetaan subpopulasi rawan yang selama ini telah dilakukan terutama yang terkait dengan pelaksanaan program pengendalian HIV dan AIDS, serta hasilnya agar dapat dilaporkan ke Kementerian Kesehatan RI. Agar ada standarisasi pelaksanaan pemetaan perlu disusun pedoman yang menjadi acuan bersama.
-  Surveilans sentinel HIV perlu dilakukan di semua wilayah di Indonesia pada semua subpopulasi rawan, bila diketahui jumlah subpopulasi tersebut memadai untuk dilakukan surveilans.
-  Mulai memasukkan variabel penting dalam kegiatan survei yang bersifat periodik yang bersifat nasional, agar variabel tersebut dapat digunakan dalam proses estimasi mendatang.
-  Kegiatan estimasi populasi rawan perlu dilakukan setiap 2-3 tahun dengan menggunakan metode yang memanfaatkan berbagai sumber data yang ada dan menekan unsur subjektivitas dalam proses perhitungan jumlah populasi rawan.
-  Sebaiknya kegiatan estimasi dilakukan di provinsi masing-masing, sehingga kebutuhan terhadap sumber data lokal bisa diperoleh lebih cepat dan lebih akurat.
-  Hasil penghitungan estimasi jumlah populasi rawan terinfeksi HIV tahun 2009 diharapkan dapat digunakan sebagai perbaikan pemodelan epidemi HIV dan kebutuhan sumber daya sebelumnya.

Lampiran

Hasil Pemodelan Regresi Poisson

Tabel 17. Nilai koefisien regresi poisson, standard error, p-value, dan 95% confidence interval untuk model WPS langsung

Variabel	Koefisien	Std. Error	p-Value	95% CI	
Populasi 15-49 thn	6.59E-07	7.22E-09	0.000	6.45E-07	6.73E-07
Persentase kelurahan	0.0075	0.0004	0.000	0.0066	0.0083
Persentase perempuan yang tinggal di kelurahan	-0.0032	0.0004	0.000	-0.0041	-0.0024
Persentase desa yang ada lokalisasi	-0.0111	0.0006	0.000	-0.0122	-0.0099
Rangking kab/kota: 2	0.8913	0.0139	0.000	0.8640	0.9185
Rangking kab/kota: 3	1.0265	0.0135	0.000	1.0001	1.0529
Rangking kab/kota: 4	1.7671	0.0131	0.000	1.7414	1.7928
Rangking kab/kota: 5	2.1911	0.0140	0.000	2.1637	2.2186
Provinsi: 12. Sumatera Utara	2.1005	0.0545	0.000	1.9938	2.2072
Provinsi: 14. Riau	2.9409	0.0545	0.000	2.8341	3.0477
Provinsi: 15. Jambi	1.4054	0.0590	0.000	1.2899	1.5210
Provinsi: 16. Sumatera Selatan	1.2989	0.0600	0.000	1.1814	1.4165
Provinsi: 17. Bengkulu	1.0823	0.0619	0.000	0.9609	1.2037
Provinsi: 18. Lampung	0.7290	0.0621	0.000	0.6073	0.8508
Provinsi: 19. Bangka Belitung	1.9802	0.0656	0.000	1.8517	2.1088
Provinsi: 21. Kepulauan Riau	3.0998	0.0554	0.000	2.9913	3.2083
Provinsi: 31. DKI Jakarta	3.3586	0.0553	0.000	3.2503	3.4670
Provinsi: 32. Jawa Barat	3.1218	0.0551	0.000	3.0138	3.2297
Provinsi: 33. Jawa Tengah	2.7996	0.0543	0.000	2.6931	2.9060
Provinsi: 34. DI Yogyakarta	1.4543	0.0800	0.000	1.2975	1.6110
Provinsi: 35. Jawa Timur	2.2455	0.0542	0.000	2.1393	2.3517
Provinsi: 36. Banten	1.8263	0.0607	0.000	1.7074	1.9453
Provinsi: 51. Bali	3.0737	0.0545	0.000	2.9669	3.1804
Provinsi: 52. Nusa Tenggara Barat	1.5721	0.0582	0.000	1.4580	1.6863
Provinsi: 53. Nusa Tenggara Timur	1.7168	0.0599	0.000	1.5994	1.8342
Provinsi: 61. Kalimantan Barat	2.6620	0.0548	0.000	2.5546	2.7693
Provinsi: 62. Kalimantan Tengah	1.9462	0.0576	0.000	1.8334	2.0590
Provinsi: 63. Kalimantan Selatan	1.9326	0.0597	0.000	1.8155	2.0497
Provinsi: 64. Kalimantan Timur	1.7172	0.0612	0.000	1.5972	1.8372
Provinsi: 71. Sulawesi Utara	1.7616	0.0660	0.000	1.6323	1.8909
Provinsi: 72. Sulawesi Tengah	1.8036	0.0592	0.000	1.6874	1.9197

Variabel	Koefisien	Std. Error	p-Value	95% CI	
Provinsi: 73. Sulawesi Selatan	1.5819	0.0571	0.000	1.4699	1.6938
Provinsi: 74. Sulawesi Tenggara	0.7320	0.0788	0.000	0.5776	0.8865
Provinsi: 75. Gorontalo	0.2148	0.1514	0.156	-0.0819	0.5116
Provinsi: 76. Sulawesi Barat	0.8185	0.0691	0.000	0.6831	0.9540
Provinsi: 81. Maluku	3.0663	0.0558	0.000	2.9569	3.1756
Provinsi: 82. Maluku Utara	0.7800	0.0993	0.000	0.5854	0.9746
Provinsi: 91. Papua Barat	2.4708	0.0596	0.000	2.3540	2.5875
Provinsi: 94. Papua	3.0699	0.0559	0.000	2.9603	3.1794
Konstanta	1.4613	0.0551	0.000	1.3533	1.5693

Tabel 18. Nilai koefisien regresi poisson, standard error, p-value, dan 95% confidence interval untuk model WPS tak langsung

Variabel	Koefisien	Std. Error	p-Value	95% CI	
Populasi 15-49 thn	4.29E-07	8.95E-09	0.000	4.11E-07	4.46E-07
Persentase kelurahan	0.0007	0.0001	0.000	0.0005	0.0009
Persentase desa yang ada pub, diskotik, atau karaoke	0.0279	0.0004	0.000	0.0272	0.0286
Persentase desa yang ada lokalisasi	-0.0012	0.0005	0.033	-0.0022	-0.0001
Rangking kab/kota: 2	0.0789	0.0117	0.000	0.0560	0.1019
Rangking kab/kota: 3	0.2876	0.0108	0.000	0.2664	0.3087
Rangking kab/kota: 4	0.3539	0.0122	0.000	0.3301	0.3777
Rangking kab/kota: 5	1.0843	0.0112	0.000	1.0623	1.1064
Provinsi: 12. Sumatera Utara	3.3936	0.2585	0.000	2.8870	3.9002
Provinsi: 13. Sumatera Barat	1.3169	0.2674	0.000	0.7929	1.8410
Provinsi: 14. Riau	2.6537	0.2597	0.000	2.1447	3.1626
Provinsi: 15. Jambi	2.9491	0.2591	0.000	2.4413	3.4570
Provinsi: 16. Sumatera Selatan	3.0795	0.2589	0.000	2.5721	3.5868
Provinsi: 17. Bengkulu	2.7167	0.2591	0.000	2.2090	3.2244
Provinsi: 18. Lampung	2.5020	0.2593	0.000	1.9938	3.0101
Provinsi: 19. Bangka Belitung	2.6458	0.2598	0.000	2.1365	3.1550
Provinsi: 21. Kepulauan Riau	4.1939	0.2587	0.000	3.6868	4.7010
Provinsi: 31. DKI Jakarta	4.7747	0.2587	0.000	4.2676	5.2818
Provinsi: 32. Jawa Barat	3.6683	0.2586	0.000	3.1614	4.1752
Provinsi: 33. Jawa Tengah	3.5258	0.2586	0.000	3.0189	4.0326
Provinsi: 34. DI Yogyakarta	2.7117	0.2679	0.000	2.1865	3.2368

Variabel	Koefisien	Std. Error	p-Value	95% CI	
Provinsi: 35. Jawa Timur	2.2962	0.2586	0.000	1.7893	2.8030
Provinsi: 36. Banten	3.4851	0.2591	0.000	2.9772	3.9930
Provinsi: 51. Bali	4.4537	0.2584	0.000	3.9473	4.9601
Provinsi: 52. Nusa Tenggara Barat	3.5037	0.2589	0.000	2.9963	4.0110
Provinsi: 53. Nusa Tenggara Timur	1.8892	0.2622	0.000	1.3752	2.4031
Provinsi: 61. Kalimantan Barat	4.2053	0.2584	0.000	3.6988	4.7117
Provinsi: 62. Kalimantan Tengah	2.9258	0.2604	0.000	2.4154	3.4361
Provinsi: 63. Kalimantan Selatan	2.5794	0.2598	0.000	2.0701	3.0887
Provinsi: 64. Kalimantan Timur	1.8521	0.2707	0.000	1.3215	2.3826
Provinsi: 71. Sulawesi Utara	2.9529	0.2603	0.000	2.4426	3.4631
Provinsi: 72. Sulawesi Tengah	2.0768	0.2605	0.000	1.5664	2.5873
Provinsi: 73. Sulawesi Selatan	2.2787	0.2597	0.000	1.7696	2.7878
Provinsi: 74. Sulawesi Tenggara	2.2714	0.2606	0.000	1.7607	2.7821
Provinsi: 75. Gorontalo	2.2032	0.2884	0.000	1.6379	2.7684
Provinsi: 81. Maluku	3.7427	0.2588	0.000	3.2355	4.2499
Provinsi: 82. Maluku Utara	3.3240	0.2595	0.000	2.8154	3.8327
Provinsi: 91. Papua Barat	3.3010	0.2592	0.000	2.7929	3.8091
Provinsi: 94. Papua	4.0304	0.2588	0.000	3.5231	4.5377
Konstanta	1.5028	0.2584	0.000	0.9963	2.0093

Tabel 19. Nilai koefisien regresi poisson, standard error, p-value, dan 95% confidence interval untuk model waria

Variabel	Koefisien	Std. Error	p-Value	95% CI	
Populasi 15-49 thn	1.30E-06	1.24E-08	0.000	1.28E-06	1.33E-06
Persentase kelurahan	0.0027	0.0002	0.000	0.0024	0.0030
Persentase desa yang ada pub, diskotik, atau karaoke	0.0199	0.0006	0.000	0.0187	0.0211
Rangking kab/kota: 2	0.2467	0.0172	0.000	0.2131	0.2804
Rangking kab/kota: 3	0.3579	0.0165	0.000	0.3257	0.3902
Rangking kab/kota: 4	0.4052	0.0160	0.000	0.3738	0.4367
Rangking kab/kota: 5	0.6020	0.0160	0.000	0.5707	0.6332
Provinsi: 12. Sumatera Utara	0.2322	0.1841	0.207	-0.1286	0.5930
Provinsi: 13. Sumatera Barat	-1.0273	0.3656	0.005	-1.7438	-0.3108
Provinsi: 14. Riau	0.8410	0.1838	0.000	0.4807	1.2014
Provinsi: 15. Jambi	0.8500	0.1852	0.000	0.4870	1.2130

Variabel	Koefisien	Std. Error	p-Value	95% CI	
Provinsi: 16. Sumatera Selatan	0.8719	0.1844	0.000	0.5104	1.2333
Provinsi: 17. Bengkulu	1.6834	0.1873	0.000	1.3162	2.0506
Provinsi: 18. Lampung	1.1025	0.1839	0.000	0.7421	1.4628
Provinsi: 19. Bangka Belitung	0.9723	0.1906	0.000	0.5988	1.3459
Provinsi: 21. Kepulauan Riau	0.5027	0.1852	0.007	0.1397	0.8656
Provinsi: 31. DKI Jakarta	-0.0287	0.1845	0.876	-0.3903	0.3329
Provinsi: 32. Jawa Barat	-0.0226	0.1841	0.902	-0.3834	0.3382
Provinsi: 33. Jawa Tengah	0.2819	0.1838	0.125	-0.0783	0.6420
Provinsi: 34. DI Yogyakarta	0.0362	0.1945	0.852	-0.3451	0.4175
Provinsi: 35. Jawa Timur	0.6302	0.1834	0.001	0.2707	0.9897
Provinsi: 36. Banten	-0.3415	0.1880	0.069	-0.7100	0.0271
Provinsi: 51. Bali	1.0611	0.1843	0.000	0.6999	1.4223
Provinsi: 52. Nusa Tenggara Barat	1.2561	0.1852	0.000	0.8931	1.6190
Provinsi: 53. Nusa Tenggara Timur	0.0100	0.1908	0.958	-0.3638	0.3839
Provinsi: 61. Kalimantan Barat	-0.0965	0.1851	0.602	-0.4592	0.2663
Provinsi: 62. Kalimantan Tengah	-0.2846	0.1952	0.145	-0.6672	0.0979
Provinsi: 63. Kalimantan Selatan	1.2735	0.1848	0.000	0.9113	1.6356
Provinsi: 64. Kalimantan Timur	-0.2460	0.1879	0.190	-0.6143	0.1222
Provinsi: 71. Sulawesi Utara	1.1817	0.1841	0.000	0.8208	1.5426
Provinsi: 72. Sulawesi Tengah	-0.1854	0.1916	0.333	-0.5610	0.1902
Provinsi: 73. Sulawesi Selatan	0.3255	0.1860	0.080	-0.0390	0.6900
Provinsi: 74. Sulawesi Tenggara	-0.2548	0.2002	0.203	-0.6472	0.1377
Provinsi: 75. Gorontalo	0.1084	0.2007	0.589	-0.2849	0.5018
Provinsi: 81. Maluku	1.2167	0.1859	0.000	0.8523	1.5812
Provinsi: 82. Maluku Utara	0.0205	0.1947	0.916	-0.3611	0.4020
Provinsi: 91. Papua Barat	0.3791	0.1908	0.047	0.0051	0.7532
Provinsi: 94. Papua	0.2540	0.1886	0.178	-0.1157	0.6237
Konstanta	2.7586	0.1833	0.000	2.3993	3.1179

Tabel 20. Nilai koefisien regresi poisson, standard error, p-value, dan 95% confidence interval untuk model LSL

Variabel	Koefisien	Std. Error	p-Value	95% CI	
Populasi 15-49 thn	1.23E-06	2.03E-09	0.000	1.22E-06	1.23E-06
Persentase kelurahan	0.0146	0.0003	0.000	0.0141	0.0151
Persentase laki-laki yang tinggal di kelurahan	-0.0045	0.0003	0.000	-0.0050	-0.0039
Persentase desa yang ada bioskop	0.0648	0.0004	0.000	0.0641	0.0656
Persentase desa yang ada pub, diskotik, atau karaoke	0.0003	0.0001	0.011	0.0001	0.0006
Rangking kab/kota: 2	-0.0937	0.0033	0.000	-0.1002	-0.0872
Rangking kab/kota: 3	-0.4315	0.0032	0.000	-0.4378	-0.4251
Rangking kab/kota: 4	-0.5004	0.0033	0.000	-0.5070	-0.4939
Rangking kab/kota: 5	0.1597	0.0030	0.000	0.1537	0.1656
Provinsi: 12. Sumatera Utara	-0.0181	0.0122	0.137	-0.0420	0.0057
Provinsi: 14. Riau	-0.0528	0.0126	0.000	-0.0775	-0.0280
Provinsi: 18. Lampung	0.9215	0.0118	0.000	0.8982	0.9447
Provinsi: 21. Kepulauan Riau	0.6119	0.0125	0.000	0.5873	0.6364
Provinsi: 31. DKI Jakarta	0.7270	0.0114	0.000	0.7046	0.7493
Provinsi: 32. Jawa Barat	1.0191	0.0109	0.000	0.9976	1.0405
Provinsi: 33. Jawa Tengah	1.4476	0.0110	0.000	1.4260	1.4691
Provinsi: 35. Jawa Timur	0.5430	0.0110	0.000	0.5214	0.5646
Provinsi: 51. Bali	1.8480	0.0114	0.000	1.8256	1.8703
Provinsi: 52. Nusa Tenggara Barat	0.6268	0.0128	0.000	0.6018	0.6518
Provinsi: 61. Kalimantan Barat	-1.8034	0.0196	0.000	-1.8417	-1.7650
Provinsi: 71. Sulawesi Utara	0.9621	0.0124	0.000	0.9378	0.9865
Provinsi: 73. Sulawesi Selatan	-0.5622	0.0267	0.000	-0.6145	-0.5099
Provinsi: 81. Maluku	-0.6681	0.0245	0.000	-0.7161	-0.6201
Konstanta	5.9063	0.0114	0.000	5.8841	5.9286

Tabel 21. Nilai koefisien regresi poisson, standard error, p-value, dan 95% confidence interval untuk model penusun

Variabel	Koefisien	Std. Error	p-Value	95% CI	
Populasi 15-49 thn	7.32E-07	5.61E-09	0.000	7.21E-07	7.43E-07
Persentase kelurahan	0.0105	0.0010	0.000	0.0086	0.0125
Persentase laki-laki yang tinggal di kelurahan	-0.0001	0.0009	0.912	-0.0019	0.0017
Persentase desa yang ada kejahatan penyalahgunaan narkoba	0.0077	0.0004	0.000	0.0069	0.0085
Persentase desa yang ada kejahatan peredaran gelap narkoba	-0.0042	0.0005	0.000	-0.0053	-0.0031
Provinsi: 12. Sumatera Utara	2.7559	0.1675	0.000	2.4276	3.0843
Provinsi: 14. Riau	1.3879	0.1690	0.000	1.0565	1.7192
Provinsi: 15. Jambi	1.8672	0.1696	0.000	1.5348	2.1995
Provinsi: 16. Sumatera Selatan	3.5755	0.1681	0.000	3.2461	3.9050
Provinsi: 18. Lampung	1.0078	0.1737	0.000	0.6674	1.3483
Provinsi: 21. Kepulauan Riau	3.0841	0.1688	0.000	2.7532	3.4151
Provinsi: 31. DKI Jakarta	3.9458	0.1674	0.000	3.6176	4.2739
Provinsi: 32. Jawa Barat	3.4717	0.1675	0.000	3.1435	3.7999
Provinsi: 33. Jawa Tengah	3.3569	0.1674	0.000	3.0288	3.6850
Provinsi: 35. Jawa Timur	3.7669	0.1675	0.000	3.4387	4.0951
Provinsi: 36. Banten	2.6862	0.1681	0.000	2.3568	3.0157
Provinsi: 51. Bali	3.1744	0.1676	0.000	2.8459	3.5030
Provinsi: 52. Nusa Tenggara Barat	2.2898	0.1689	0.000	1.9586	2.6209
Provinsi: 61. Kalimantan Barat	1.8087	0.1682	0.000	1.4790	2.1385
Provinsi: 71. Sulawesi Utara	2.8262	0.1729	0.000	2.4873	3.1650
Provinsi: 73. Sulawesi Selatan	1.8536	0.1685	0.000	1.5233	2.1839
Kab/kota: Kota	0.1642	0.0333	0.000	0.0990	0.2294
Konstanta	1.9971	0.1676	0.000	1.6687	2.3255

Formulir Pengumpulan Data Pemetaan

No. Kolom	Nama Kolom			Keterangan
1	No			Nomor urut
2	Kabupaten/Kota			Di isi dengan nama kabupaten/kota. Untuk nama kabupaten ditulis langsung namanya (contoh : Tangerang), sedangkan untuk nama kota ditulis dengan mencantumkan kata kota didepannya (Kota Tangerang)
3	Jumlah Penduduk	Laki-laki	15-49 Thn	Di isi dengan jumlah penduduk laki-laki yang berusia antara 15 - 49 tahun dikabupaten/kota dimaksud pada kolom 2
4			Total	Di isi dengan jumlah total penduduk laki-laki dikabupaten/kota dimaksud pada kolom 2
5		Perempuan	15-49 Thn	Di isi dengan jumlah penduduk perempuan yang berusia antara 15 - 49 tahun dikabupaten/kota dimaksud pada kolom 2
6			Total	Di isi dengan jumlah total penduduk perempuan dikabupaten/kota dimaksud pada kolom 2
7		Tahun	Di isi dengan tahun untuk data jumlah penduduk pada kolom 3 - 6 beserta sumbernya. Contoh : 2009/Kota Tangerang dalam angka, BPS	
8		Jumlah WPS Langsung	Dinkes	Di isi dengan jumlah Wanita Penjaja Seks yang ada di lokalisasi, jalanan, warung remang-remang atau lokasi lainnya tempat WPS menjajakan seks secara langsung di kabupaten/kota dimaksud pada kolom 2 hasil pemetaan/pendataan Dinas Kesehatan dalam 1 atau 2 tahun terakhir. Jika data yang tersedia lebih dari 2 tahun yang lalu, Di isi dengan tahunnya. Contoh 1000 (2006)
9	Dinsos		Di isi dengan data yang sama dengan kolom 8 tetapi merupakan hasil pemetaan/pendataan dinas sosial	
10	LSM		Di isi dengan data yang sama dengan kolom 8 tetapi merupakan hasil pemetaan/pendataan lembaga swadaya masyarakat yang bekerja menjangkau/mendampingi WPS dimaksud	
11	Jumlah WPS Tak Langsung	Dinkes	Di isi dengan jumlah Wanita Penjaja Seks yang ada di panti pijat, hotel, bar/karaoke atau lokasi lainnya tempat WPS menjajakan seks secara tidak langsung di kabupaten/kota dimaksud pada kolom 2 hasil pemetaan/pendataan Dinas Kesehatan dalam 1 atau 2 tahun terakhir. Jika data yang tersedia lebih dari 2 tahun yang lalu, Di isi dengan tahunnya. Contoh 1000 (2006)	
12		Dinas Pariwisata	Di isi dengan data yang sama dengan kolom 11 tetapi merupakan hasil pemetaan/pendataan dinas sosial	
13		LSM	Di isi dengan data yang sama dengan kolom 11 tetapi merupakan hasil pemetaan/pendataan lembaga swadaya masyarakat yang bekerja menjangkau/mendampingi WPS dimaksud	
14	Jumlah penghuni LP	Laki-laki	Narkoba	Di isi dengan jumlah penghuni LP (Napi dan Tahanan) laki-laki terkait dengan kasus Narkoba yang ada di LP dalam wilayah kabupaten/kota dimaksud pada kolom 2
15			Total	Di isi dengan jumlah penghuni LP (Napi dan Tahanan) laki-laki yang ada di LP dalam wilayah kabupaten/kota dimaksud pada kolom 2
16		Perempuan	Narkoba	Di isi dengan jumlah penghuni LP (Napi dan Tahanan) perempuan terkait dengan kasus Narkoba yang ada di LP dalam wilayah kabupaten/kota dimaksud pada kolom 2
17			Total	Di isi dengan jumlah penghuni LP (Napi dan Tahanan) perempuan yang ada di LP dalam wilayah kabupaten/kota dimaksud pada kolom 2
18	Jumlah Penasun	Dinkes	Di isi dengan jumlah Pengguna Napza Suntik di kabupaten/kota dimaksud pada kolom 2 hasil pemetaan/pendataan Dinas Kesehatan dalam 1 atau 2 tahun terakhir. Jika data yang tersedia lebih dari 2 tahun yang lalu, Di isi dengan tahunnya. Contoh 1000 (2006)	
19		LSM	Di isi dengan data yang sama dengan kolom 18 tetapi merupakan hasil pemetaan/pendataan lembaga swadaya masyarakat yang bekerja menjangkau/mendampingi Penasun dimaksud	
20		Polisi	Di isi dengan jumlah orang yang ditangkap polisi terkait kasus Narkoba di wilayah kabupaten/kota dimaksud pada kolom 2 dalam 1 tahun terakhir	
21		Lainnya	Di isi dengan jumlah Pengguna Napza Suntik di kabupaten/kota dimaksud pada kolom 2 hasil pemetaan/pendataan lembaga lainnya	

No. Kolom	Nama Kolom	Keterangan
22	Jumlah Waria	Dinkes Di isi dengan jumlah Waria Penjaja Seks yang menjajakan seks di kabupaten/kota dimaksud pada kolom 2 hasil pemetaan/pendataan Dinas Kesehatan dalam 1 atau 2 tahun terakhir. Jika data yang tersedia lebih dari 2 tahun yang lalu, Di isi dengan tahunnya. Contoh 100 (2006)
23		Dinsos Di isi dengan data yang sama dengan kolom 22 tetapi merupakan hasil pemetaan/pendataan dinas sosial
24		LSM Di isi dengan data yang sama dengan kolom 22 tetapi merupakan hasil pemetaan/pendataan lembaga swadaya masyarakat yang bekerja menjangkau/mendampingi Waria dimaksud
25	Jumlah LSL	Dinkes Di isi dengan jumlah LSL/Gay Penjaja Seks yang menjajakan seks di kabupaten/kota dimaksud pada kolom 2 hasil pemetaan/pendataan Dinas Kesehatan dalam 1 atau 2 tahun terakhir. Jika data yang tersedia lebih dari 2 tahun yang lalu, Di isi dengan tahunnya. Contoh 100 (2006)
26		LSM Di isi dengan data yang sama dengan kolom 25 tetapi merupakan hasil pemetaan/pendataan lembaga swadaya masyarakat yang bekerja menjangkau/mendampingi LSL dimaksud
27		Lainnya Di isi dengan data yang sama dengan kolom 25 tetapi merupakan hasil pemetaan/pendataan lembaga lembaga lainnya
28	Prevalensi HIV (tuliskan jumlah sampel reaktif/jumlah sampel contoh : 2/100)	WPS Langsung Diisi dengan jumlah sampel reaktif dengan tes antibodi HIV dan jumlah total sampel dari hasil kegiatan surveilans HIV terakhir pada Wanita Penjaja Seks yang ada di lokalisasi, jalanan, warung remang-remang atau lokasi lainnya tempat WPS menjajakan seks secara langsung di kabupaten/kota dimaksud pada kolom 2. Contoh 2/100 artinya ada 2 sampel reaktif dari 100 sampel yang diperiksa
29		Tahun Diisi dengan tahun pelaksanaan surveilans dimaksud pada kolom 28
30		WPS Tak Langsung Diisi dengan jumlah sampel reaktif dengan tes antibodi HIV dan jumlah total sampel dari hasil kegiatan surveilans HIV terakhir pada Wanita Penjaja Seks yang ada di panti pijat, hotel, bar/karaoke atau lokasi lainnya tempat WPS menjajakan seks secara tidak langsung di kabupaten/kota dimaksud pada kolom 2.
31		Tahun Diisi dengan tahun pelaksanaan surveilans dimaksud pada kolom 30
32		Waria Diisi dengan jumlah sampel reaktif dengan tes antibodi HIV dan jumlah total sampel dari hasil kegiatan surveilans HIV terakhir pada Waria Penjaja Seks di kabupaten/kota dimaksud pada kolom 2.
33		Tahun Diisi dengan tahun pelaksanaan surveilans dimaksud pada kolom 33
34		Penasun Diisi dengan jumlah sampel reaktif dengan tes antibodi HIV dan jumlah total sampel dari hasil kegiatan surveilans HIV terakhir pada Pengguna Napza Suntik di kabupaten/kota dimaksud pada kolom 2.
35		Tahun Diisi dengan tahun pelaksanaan surveilans dimaksud pada kolom 34
36		LSL Diisi dengan jumlah sampel reaktif dengan tes antibodi HIV dan jumlah total sampel dari hasil kegiatan surveilans HIV terakhir pada LSL di kabupaten/kota dimaksud pada kolom 2.
37		Tahun Diisi dengan tahun pelaksanaan surveilans dimaksud pada kolom 36
38		Napi Diisi dengan jumlah sampel reaktif dengan tes antibodi HIV dan jumlah total sampel dari hasil kegiatan surveilans HIV terakhir pada penghuni LP di kabupaten/kota dimaksud pada kolom 2.
39		Tahun Diisi dengan tahun pelaksanaan surveilans dimaksud pada kolom 38
40		Napi Narkoba Diisi dengan jumlah sampel reaktif dengan tes antibodi HIV dan jumlah total sampel dari hasil kegiatan surveilans HIV terakhir pada penghuni LP dengan kasus Narkoba atau LP Narkotika di kabupaten/kota dimaksud pada kolom 2.
41		Tahun Diisi dengan tahun pelaksanaan surveilans dimaksud pada kolom 40
42		Darah donor Diisi dengan jumlah kantong darah reaktif dengan tes antibodi HIV dan jumlah total kantong darah yang diperiksa HIV dari hasil kegiatan penapisan darah donor 1 tahun terakhir di kabupaten/kota dimaksud pada kolom 2.
43		Tahun Diisi dengan tahun pelaksanaan surveilans dimaksud pada kolom 42



DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
(DITJEN PP & PL)



Jl. Percetakan Negara No. 29
Kotak Pos 223 Jakarta 10560

Telp. (021) 4247608
Fax. (021) 4207807

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PENYAKIT DAN
PENYEHATAN LINGKUNGAN

NOMOR : HK.01.05/III.2/1247/2010

TENTANG

TIM PENYUSUN ESTIMASI POPULASI RAWAN TERINFEKSI HIV
DAN ORANG DENGAN HIV AIDS (ODHA)
TAHUN 2009-2010

DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PENYAKIT
DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN

- Menimbang :
- bahwa epidemi HIV di Indonesia terkonsentrasi pada populasi berperilaku risiko tinggi
 - bahwa estimasi populasi rawan terinfeksi HIV dan ODHA untuk mengetahui seberapa besar masalah epidemi HIV dan AIDS di Indonesia beserta sebarannya di Propinsi dan Kabupaten/Kota.
 - bahwa estimasi terakhir dilaksanakan tahun 2006 oleh karena itu dilakukan kembali pada tahun 2009
 - bahwa untuk kegiatan tersebut perlu dibentuk Tim untuk proses penyelesaian estimasi tahun 2009-2010 yang ditetapkan dengan keputusan Direktur Jenderal PP dan PL
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 - Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Nomor 5063) ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 ;
 - Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional ;

Sekretaris Direktorat Jenderal	Telp. 4209930	Direktorat Surveilans Epidemiologi, Imunisasi dan Kesehatan Mata	Telp. 4248631
Direktorat Pengendalian Penyakit Menular Langsung (Dit P2ML)	Telp. 4248538	(Dit. Septis dan Kusta)	
Direktorat Pengendalian Penyakit Berwabah Biotang (Dit P2B2)	Telp. 4247573	Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular (Dit P2TN)	Telp. 4288944
		Direktorat Penyehatan Lingkungan (Dit. PL)	Telp. 4245778

6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN TENTANG TIM PENYUSUN ESTIMASI POPULASI RAWAN TERINFEKSI HIV DAN ORANG DENGAN HIV AIDS (ODHA) TAHUN 2009-2010**
- KEDUA** : Susunan Tim Penyusun Estimasi sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama adalah sebagai berikut :
- Penasihat : Dirjen PP dan PL
- Pengarah : Direktur P2ML
- Ketua : dr. Nunung B. Priyatni, M.Epid
- Sekretaris : Naning Nugrahini, S.K.M., M.K.M.
- Anggota : 1. Eli Winardi, S.K.M., M.K.M.
2. Vini Sutriani, S.Psi., M.P.H.
- Tim Ahli : 1. dr. Pandu Riono, M.P.H.
2. Aang Sutisna, M.P.H.
3. M. Noor Farid
- KETIGA** : Tim bertugas untuk mengumpulkan data dan mengolah data yang terkait dengan estimasi sampai dengan penulisan laporan akhir estimasi
- KEEMPAT** : Tim telah bertugas sejak bulan Agustus 2009, dengan mengirimkan surat permintaan data untuk estimasi ke seluruh Dinas Kesehatan Provinsi se-Indonesia dan akan berakhir pada bulan Mei 2010.
- KELIMA** : Tim bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal PP&PL melalui Direktur P2ML serta menyampaikan laporan final hasil estimasi berupa buku estimasi populasi rawan terinfeksi HIV dan ODHA Tahun 2009-2010 selambat-lambatnya 2 minggu setelah *peer review* yang direncanakan pada bulan April 2010.
- KEENAM** : Biaya pelaksanaan untuk kegiatan estimasi dibebankan pada anggaran Proyek GF-AIDS R4 Tahun 2009-2010

KETUJUHAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku sejak tim mulai bekerja pada bulan Agustus 2009. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI J A K A R T A
PADA TANGGAL 2 Juni 2010

DIREKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIC OF INDONESIA
DIREKTOR JENDERAL
PENGENDALIAN PENYAKIT
ISPA
PENYAKITANLI, NERACUNAN
Prof. Dr. Tiandra Yoga Aditama, Sp.P(K),MARS, DTM&H, DTCE
NIP 195509031980121001

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Sesditjen PP dan PL Kementerian Kesehatan RI;
2. Direktur P2ML selaku PR GF ATM Komponen AIDS & TB;
3. Kepala Subdit AIDS & PMS selaku PM GF ATM Komponen AIDS;
4. PMU GF R4 Komponen AIDS;
5. PMU GF R8 Komponen AIDS;
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Daftar Hadir Pertemuan

DAFTAR HADIR PERTEMUAN PENETAPAN METODE DAN SUMBER DATA ESTIMASI POPULASI RAWAN

HOTEL SOFYAN CIKINI 2-3 NOPEMBER 2009		HOTEL SOFYAN BETAWI 20 NOPEMBER 2009	
NO	NAMA	NO	NAMA
	INSTANSI		INSTANSI
1.	Deden Wibawa	1.	Kurniasih
	AIDS-INA		Ditjenpas
2.	Hendrajid PW	2.	Nurholis Majid
	BNN-Litbang		FHI
3.	Togi Siahaan	3.	Erson
	BPS		GF AIDS
4.	Nurholis	4.	Sunarsih
	FHI		IPPI
5.	Anang S	5.	Abdullah Denovan
	GF-AIDS		JOTHI
6.	Iman Abdurrachman	6.	Hendrajid PW
	GWL-INA		Litbang BNN
7.	Ienes Angelo	7.	Susi
	GWL--INA		OPSI
8.	Susi	8.	Priya Subrata
	Opsi		PKBI
9.	Priya Subroto	9.	Eka Hidayat
	PKBI		Sekretariat KPAN
10.	Eli Winardi	10.	Aminzar
	Kemenkes Subdit AIDS & PMS		Kemenkes Subdit AIDS & PMS
11.	Eko Saputro	11.	Victoria Idrawati
	Kemenkes Subdit AIDS & PMS		Kemenkes Subdit AIDS & PMS
12.	Ari W Sari	12.	Eva Musdalifah
	Kemenkes Subdit AIDS & PMS		Kemenkes Subdit AIDS & PMS
13.	Rahmi Solehah	13.	Priajie Citolaksono
	Kemenkes Subdit AIDS & PMS		Kemenkes Subdit AIDS & PMS
14.	Priajie	14.	Pandu Riono
	Kemenkes Subdit AIDS & PMS		Konsultan Estimasi (Kemenkes)
15.	Leli Wahyuniar	15.	Muhammad N. Farid
	UNAIDS		Konsultan Estimasi (Kemenkes)
16.	Pandu Riono	16.	Aang Sutrisna
	Konsultan Estimasi (Kemenkes)		Konsultan Estimasi (HCPI)
17.	Muhammad N. Farid		
	Konsultan Estimasi (Kemenkes)		
18.	Aang Sutrisna		
	Konsultan Estimasi (HCPI)		

DAFTAR HADIR LOKAKARYA KESEPAKATAN HASIL ESTIMASI HOTEL LUMIRE, SENEN, JAKARTA PUSAT, 8 FEBRUARI 2010

NO	NAMA	INSTANSI	NO	NAMA	INSTANSI
1.	Sidayu Ariteja	BAPPENAS	20.	Eka N. H	Sekretariat KPAN
2.	Djafar	BKKBN	21.	Lely Wahyuniar	UNAIDS
3.	S. Happy H.	BPS	22.	Gelora Manurung	UNICEF
4.	Agung Tri Wahyanto	Kemendiknas	23.	Irawan Kosasih	WHO
5.	Agung Tri Wahyanto	Kemendiknas	24.	Oscar	WHO
6.	Nancy Anggraeni	Kemenkes Pusdasur	25.	Sri Pandam Pulungsih	WHO
7.	dr. Endang Budi Hastuti	Kemenkes Subdit AIDS & PMS	26.	Iman Abdurrachman	GWL INA
8.	Eli Winardi, SKM, MKM	Kemenkes Subdit AIDS & PMS	27.	Scott	JOTHI
9.	Nurjannah	Kemenkes Subdit AIDS & PMS	28.	Aldo	OPSI
10.	Eko Saputro	Kemenkes Subdit AIDS & PMS	29.	Yudi Manggala	PKBI Pusat
11.	Siti Zarah Eka Putri	Kemenkes Subdit AIDS & PMS	30.	Deden Wibawa	AIDS INA
12.	Maryani	Kemenkes Subdit AIDS & PMS	31.	Siti Sulami	FHI
13.	Viny S. Tobing	Kemenkes Subdit AIDS & PMS	32.	Sujai	GF AIDS
14.	Eva Muzdalifah	Kemenkes Subdit AIDS & PMS	33.	Marni Radini	GF AIDS
15.	Mulia Jonie	Kemensos Subdit Yansos ODHA	34.	Taufik Alif Fuad	GF AIDS
16.	Syihabuddin Latief	Kementerian Agama	35.	Abdur Rahim	GF AIDS
17.	Samsudin	Kemepora	36.	Erson	GF AIDS
18.	Wenita Indrasari	Sekretariat KPAN	37.	Pandu Riono	Konsultan Estimasi (Kemenkes)
19.	Irma Siahaan	Sekretariat KPAN	38.	Muhammad N. Farid	Konsultan Estimasi (Kemenkes)
			39.	Aang Sutrisna	Konsultan Estimasi (HCPI)

DAFTAR HADIR
PERTEMUAN VALIDASI DATA & REVISI HASIL PENGHITUNGAN ESTIMASI TAHUN 2009
HOTEL INNA SINDHU, DENPASAR 24-25 NOVEMBER 2009

NO	NAMA	INSTANSI	NO	NAMA	INSTANSI
1.	Sugihartini, SKM	Dinkes Provinsi Babel	48.	dr. Arnold Tiniap	Dinkes Provinsi Papua Barat
2.	Yusrizal, SKM, MPH	Dinkes Provinsi Babel	49.	Duma Ido	Dinkes Provinsi Riau
3.	I Nyoman Suarcayasa	Dinkes Provinsi Bali	50.	Wiwit Gemiwati, SKM, M.Kes	Dinkes Provinsi Riau
4.	dr. I Ketut Subrata	Dinkes Provinsi Bali	51.	Patmawati Pajja	Dinkes Provinsi Sulbar
5.	dr. Gde Agus Suryadinata	Dinkes Provinsi Bali	52.	Makmur Selomo	Dinkes Provinsi Sulbar
6.	Asmawati	Dinkes Provinsi Banten	53.	Alfina Adeu, SKM, M.Si	Dinkes Provinsi Sulteng
7.	Dendi	Dinkes Provinsi Banten	54.	Musrianti Syachrim, SKM	Dinkes Provinsi Sulteng
8.	Erna Irawaty, SKM	Dinkes Provinsi Bengkulu	55.	Kartina, SKM, M.Kes	Dinkes Provinsi Sultra
9.	dr. Rosmedy H.T, MM	Dinkes Provinsi Bengkulu	56.	dr. Hj. Wiwi Sri W	Dinkes Provinsi Sultra
10.	Akhmad Akhadi	Dinkes Provinsi DIY	57.	Dr. Jemmy Lampus	Dinkes Provinsi Sulut
11.	Setyarini Hestu Lestari	Dinkes Provinsi DIY	58.	Oksye Umboh	Dinkes Provinsi Sulut
12.	Mirsad	Dinkes Provinsi DKI Jakarta	59.	dr. Irene, MKM	Dinkes Provinsi Sumbar
13.	dr. Widayastuti, M.Kes	Dinkes Provinsi DKI Jakarta	60.	Trisnayanti	Dinkes Provinsi Sumbar
14.	dr. Supandi M Abdullah	Dinkes Provinsi Gorontalo	61.	Dr. Dani	Dinkes Provinsi Sumsel
15.	Farid I Adam, S.Si, M.Kes, Apt	Dinkes Provinsi Gorontalo	62.	Deddy Ismail, MM	Dinkes Provinsi Sumsel
16.	Yuzar I.B.I	Dinkes Provinsi Jabar	63.	Andi Ilham Lubis	Dinkes Provinsi Sumut
17.	Ridawiyani	Dinkes Provinsi Jabar	64.	Sukarni	Dinkes Provinsi Sumut
18.	Lidya Mulyati, SKM	Dinkes Provinsi Jambi	65.	M. Sunan Raja	Kemenkes Ditjen PP & PL
19.	Azwar Djauhari	Dinkes Provinsi Jambi	66.	dr. Dyah Erti Mustikawati, MPH	Kemenkes Subdit AIDS & PMS
20.	Sadono Wiwoho	Dinkes Provinsi Jateng	67.	dr. Asik Surya, MPPM	Kemenkes Subdit AIDS & PMS
21.	Listijani Sukwati G, SKM, M.Kes	Dinkes Provinsi Jateng	68.	dr. F. Jeanne Uktolseja, Mkes	Kemenkes Subdit AIDS & PMS
22.	Budi Rahaju	Dinkes Provinsi Jatim	69.	dr. Endang Budi Hastuti	Kemenkes Subdit AIDS & PMS
23.	Achmad Maburr	Dinkes Provinsi Jatim	70.	dr. Afriana Nurhalina	Kemenkes Subdit AIDS & PMS
24.	dr. Monthe Khrisman, M.Kes	Dinkes Provinsi Kalbar	71.	dr. Wisnu Hariadi	Kemenkes Subdit AIDS & PMS
25.	Rudi Anshari, M.Kes	Dinkes Provinsi Kalbar	72.	dr. Ainor Rasyid	Kemenkes Subdit AIDS & PMS
26.	H. Yusransyah	Dinkes Provinsi Kalsel	73.	Nurjannah, SKM, Mkes	Kemenkes Subdit AIDS & PMS
27.	Mursalim	Dinkes Provinsi Kalsel	74.	Victoria Indrawati, SKM, MSc	Kemenkes Subdit AIDS & PMS
28.	dr. Wineini Murhaeni	Dinkes Provinsi Kalteng	75.	Eli Winardi, SKM, MKM	Kemenkes Subdit AIDS & PMS
29.	Farthiah Herawati, SKM	Dinkes Provinsi Kalteng	76.	Eko Saputro, SKM, Mkes	Kemenkes Subdit AIDS & PMS
30.	Dame Sihotang	Dinkes Provinsi Kaltim	77.	Viny Sutriani, S.Psi, MPH	Kemenkes Subdit AIDS & PMS
31.	Sutri Cahyono	Dinkes Provinsi Kaltim	78.	Ari Wulan Sari, SKM	Kemenkes Subdit AIDS & PMS
32.	Dian Febrianti	Dinkes Provinsi Kepri	79.	dr. Bangkit Purwandari	Kemenkes Subdit AIDS & PMS
33.	Esther Maya Sofa	Dinkes Provinsi Kepri	80.	Maryani	Kemenkes Subdit AIDS & PMS
34.	Mandala Noras, SKM, M.Epid	Dinkes Provinsi Lampung	81.	Prasetya Eka Hardianto, S.Kom	Kemenkes Subdit AIDS & PMS
35.	dr. Dyah Iskreami	Dinkes Provinsi Lampung	82.	Naning Nugrahini	Kemenkes Subdit AIDS & PMS
36.	Hengki B, SKM	Dinkes Provinsi Maluku	83.	Adi S	Kemenkes Subdit AIDS & PMS
37.	Dr. Ritha Tahitu, M.Kes	Dinkes Provinsi Maluku	84.	dr. Fanny J. Silfanus	KPAN
38.	dr. Liasari Armajin, M.Kes	Dinkes Provinsi Maluku	85.	Irma Siahaan	KPAN
39.	Sueba Alwi	Dinkes Provinsi Maluku	86.	Eka Hidayat	KPAN
40.	Rozana	Dinkes Provinsi NAD	87.	Tina Boonto	UNAIDS
41.	dr. Abdul Fatah, MPPM	Dinkes Provinsi NAD	88.	dr. Sri Pandam Pulungsih	WHO
42.	Dr. Ida Bagus Jelantik	Dinkes Provinsi NTB	89.	Dr. Oscar Barreneche	WHO
43.	Hartawan	Dinkes Provinsi NTB	90.	Steven Harsono	CHAI
44.	dr. SMJ Koamesah	Dinkes Provinsi NTT	91.	dr. Abby R	HCPI
45.	Charlota Wamole	Dinkes Provinsi NTT	92.	Pandu Riono	Konsultan Estimasi (Kemenkes)
46.	dr. Beeri W	Dinkes Provinsi Papua	93.	Muhammad N. Farid	Konsultan Estimasi (Kemenkes)
47.	P. Pasaribu	Dinkes Provinsi Papua	94.	Aang Sutrisna	Konsultan Estimasi (HCPI)

**DAFTAR HADIR PERTEMUAN
PEER REVIEW PROSES & HASIL PENGHITUNGAN ESTIMASI
Hotel Akmani, 20-21 April 2010**

1. Linette Collins	AusAID
2. dr. Ulia Safrana	BNN
3. M.Retno DD, S.Psi, M.Si	BNN
4. Bob Magnani	FHI
5. Erson	GF AIDS
6. Sofie Yunita	GF AIDS
7. Ratna K Soehoed	HCPI
8. Drg. Dyah Mustikawati, MPH	Kemenkes Subdit TB
9. Naning Nugrahini	Kemenkes Subdit AIDS & PMS
10. Endang Budi Hastuti	Kemenkes Subdit AIDS & PMS
11. Eli Winardi	Kemenkes Subdit AIDS & PMS
12. Margarita Meita	Kemenkes Subdit AIDS & PMS
13. Viny Sutriani	Kemenkes Subdit AIDS & PMS
14. Pandu Riono	Konsultan GF
15. M. Noor Farid	Konsultan GF
16. Aang Sutrisna	Konsultan HCPI
17. Kemal N Siregar	KPAN
18. Wenita Indrasari	KPAN
19. Rahmat Hidayat	PKBI
20. Nancy Fee	UNAIDS
21. Lely Wahyuniar	UNAIDS
22. Wiwat Peerapatanapokin	UNAIDS/East-West Center
23. Gray Sattler	UNODC
24. Virginia Loo	WHO
25. Sri Pandam	WHO
26. Irawan Kosasih	WHO
27. Oscar M Barreneche	WHO INO
28. Renu Garg	WHO SEARO
29. Txema Calleja	WHO/ HQ

Filename: Est09new candra dulkan
Directory: F:\buku estimasi all
Template: C:\Documents and Settings\user\Application
Data\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Title:
Subject:
Author: Muhammad N. Farid
Keywords:
Comments:
Creation Date: 10/13/2010 2:45:00 PM
Change Number: 2
Last Saved On: 10/13/2010 2:45:00 PM
Last Saved By: Arifin
Total Editing Time: 3 Minutes
Last Printed On: 10/13/2010 2:45:00 PM
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 91
Number of Words: 19,952 (approx.)
Number of Characters: 113,727 (approx.)

